



SALINAN

BUPATI PASANGKATU  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
PERATURAN DAERAH PASANGKAYU  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU  
dan  
BUPATI PASANGKAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
6. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

## BAB II SISTEMATIKA

### Pasal 2

- (1) RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I. Pendahuluan;
  - BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - BAB III. Permasalahan dan isu strategis;
  - BAB IV. Visi dan Misi Daerah;
  - BAB V. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
  - BAB VI. Penutup.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

- (1) RPJPD disusun dengan mengacu pada RPJP Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045;
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan Pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahunan yang memuat visi, misi dan arah Pembangunan jangka panjang Daerah tahun 2025-2045.

### Bagian Kedua Fungsi

### Pasal 4

RPJPD berfungsi:

- a. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan sasaran dan arah kebijakan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RPJMD;
- b. Sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, serta pemangku kepentingan pembangunan dalam menentukan arah pembangunan Daerah.

## BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD;
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 6

- (1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 Nomor 5) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 15 November 2024

Pjs. BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

MADDARESKI SALATIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
MULYADI, SH  
Pembina, IV/a  
NIP: 19791115 200804 1 001

# **RANCANGAN AKHIR**

## **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2025-2045**

## DAFTAR SINGKATAN

AKB	: Angka Kematian Bayi
AKE	: Angka Kecukupan Energi
AKI	: Angka Kematian Ibu
ALKI	: Alur Laut Kepulauan Indonesia
ALSINTAN	: Alat dan Mesin Pertanian
AMDAL	: Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
ANDALALIN	: Analisis Dampak Lalu Lintas
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BKPRS	: Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BRIN	: Badan Riset dan Inovasi Nasional
BTS	: Base Transceiver Station
COVID-19	: <i>Corona Virus Disease</i> Tahun 2019
DAU	: Dana Alokasi Umum
DDDTLH	: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
DED	: <i>Detail Engineering Design</i>
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
HIV/AIDS	: <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome</i>
HLS	: Harapan Lama Sekolah
IHK	: Indeks Harga Konsumen
IID	: Indeks Inovasi Daerah
IKA	: Indeks Kualitas Air
IKL	: Indeks Kualitas Tutupan Lahan
IKLH	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKLHD	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
IKN	: Ibukota Negara
INPRES	: Instruksi Presiden

IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IPP	: Indeks Pelayanan Publik
IRB	: Indeks Reformasi Birokrasi
Karhutla	: Kebakaran Hutan dan Lahan
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KPPB	: Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
KSK	: Kawasan Strategis Kabupaten
KTI	: Kawasan Timur Indonesia
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
MDGS	: <i>Millenium Development Goals</i>
MDPL	: Meter di Atas Permukaan Laut
NBM	: Neraca Bahan Makanan
ORMAS	: Organisasi Kemasyarakatan
PDAM	: Perusahaan Daerah Air MInum
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
Perda	: Peraturan Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PPKS	: Pusat Penelitian Kelapa Sawit
PPN	: Perencanaan Pembangunan Nasional
Renja-PD	: Rencana Kerja Perangkat Daerah
Renstra-PD	: Rencana Strategis Perangkat Daerah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RLS	: Rata-rata Lama Sekolah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RTH	: Ruang Terbuka Hijau
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SAKERNAS	: Survei Angkatan Kerja Nasional
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
SD	: Sekolah Dasar
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>

SDM	: Sumber Daya Manusia
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SSGBI	: Survei Status Gizi Balita Indonesia
SSGI	: Survei Status Gizi Indonesia
SUSENAS	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
TBS	: <i>Treasury Billing System</i>
TFP	: <i>Total Factor Productivity</i>
TFR	: <i>Total Fertility Rate</i>
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
UHH	: Umur Harapan Hidup
UMK	: Upah Minimum Kabupaten/Kota
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
UU	: Undang-Undang
UU HKPD	: Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945
WDP	: Wajar Dengan Pengecualian
WEF	: <i>World Economic Forum</i>
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian



# DAFTAR ISI

Daftar Singkatan ☞ i

Daftar Isi ☞ iv

Daftar Tabel ☞ v

Daftar Gambar ☞ vii

## **BAB I PENDAHULUAN ☞ 1**

- 1.1. Latar Belakang ☞ 1
- 1.2. Maksud dan Tujuan ☞ 4
- 1.3. Dasar Hukum ☞ 4
- 1.4. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ☞ 6
- 1.5. Sistematika Penulisan ☞ 7

## **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ☞ 9**

- 2.1. Aspek Geografis dan Demografis ☞ 9
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ☞ 42
- 2.3. Aspek Daya Saing ☞ 60
- 2.4. Aspek Pelayanan Umum ☞ 88
- 2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 ☞ 92
- 2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik ☞ 99
- 2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah ☞ 110

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ☞ 121**

- 3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah ☞ 121
- 3.2. Isu-Isu Strategis ☞ 127

## **BAB IV VISI DAN MISI DAERAH ☞ 139**

- 4.1. Visi Daerah ☞ 139
- 4.2. Misi Daerah ☞ 142

## **BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH ☞ 145**

- 5.1. Arah Kebijakan ☞ 145
- 5.2. Sasaran Pokok ☞ 150

## **BAB VI PENUTUP ☞ 163**

- 6.1. Kaidah Pelaksanaan ☞ 163
- 6.2. Kaidah Pelaksanaan ☞ 164

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Kondisi Daya Dukung Daya Tampung Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu ☞ 16
Tabel 2.2.	Sebaran Spasial Status Daya Dukung Daya Tampung Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu ☞ 16
Tabel 2.3.	Status Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Air Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu ☞ 20
Tabel 2.4.	Sebaran Spasial Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Air Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu ☞ 23
Tabel 2.5.	Daerah Rawan bencana PerKecamatan di Kabupaten Pasangkayu ☞ 26
Tabel 2.6.	Nilai IDSD Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 ☞ 86
Tabel 2.7.	Nilai IDSD Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 ☞ 87
Tabel 2.8.	Indeks SAKIP dan IPP Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat ☞ 89
Tabel 2.9.	Capaian Kinerja Indikator Makro Kabupaten Pasangkayu Periode 2005-2025 ☞ 97
Tabel 2.10.	Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 – 2045 ☞ 100
Tabel 2.11.	Proyeksi Jumlah Penduduk per Jenis Kelamin di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 – 2045 ☞ 102
Tabel 2.12.	Proyeksi Jumlah Penduduk per Kelompok Usia di Kabupaten Pasangkayu 2025-2045 ☞ 103
Tabel 2.13.	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal di Kabupaten Pasangkayu ☞ 106
Tabel 2.14.	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Penduduk di Kabupaten Pasangkayu ☞ 107
Tabel 2.15.	Proyeksi Kebutuhan Sambungan Listrik Rumah Tangga di Kabupaten Pasangkayu ☞ 107
Tabel 2.16.	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Pasangkayu ☞ 108
Tabel 2.17.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pasangkayu ☞ 109
Tabel 2.18.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Pasangkayu ☞ 110
Tabel 2.19.	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Ikan (Ton) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 ☞ 113
Tabel 2.20.	Kawasan Pariwisata Kabupaten Pasangkayu Berdasarkan RTRW Revisi ☞ 116
Tabel 2.21.	Indikasi Program/Proyek Strategis Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasangkayu ☞ 119

Tabel 4.1.	Penyelarasan Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Barat, dan RPJPD Kabupaten Pasangkayu ☞ 141
Tabel 4.2.	Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Barat dan RPJPD Kabupaten Pasangkayu ☞ 142
Tabel 4.3.	Keterkaitan Pokok Visi, Misi & Penjelasan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah ☞ 143
Tabel 4.4.	Penyelarasan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Barat, dan RPJPD Kabupaten Pasangkayu ☞ 144
Tabel 5.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasangkayu ☞ 146
Tabel 5.2.	Keterkaitan Visi, Misi, Sasaran Pokok, Indikator, dan Target Kinerja 2045 Kabupaten Pasangkayu ☞ 150
Tabel 5.3.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator, dan Target Kinerja Menurut Periode Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu ☞ 152
Tabel 5.4.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Kinerja Menurut Periode Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu ☞ 155

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1. Keterkaitan RPJPD Kabupaten Pasangkayu dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ☞ 7
- Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Pasangkayu ☞ 10
- Gambar 2.2. Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan ☞ 10
- Gambar 2.3. Peta D3TLH Pangan Kabupaten Pasangkayu ☞ 18
- Gambar 2.4. Perbandingan Kebutuhan Pangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 dan 2045 ☞ 19
- Gambar 2.5. Peta D3TLH Air Kabupaten Pasangkayu ☞ 22
- Gambar 2.6. Grafik Perbandingan Kebutuhan Pangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 dan 2045 ☞ 23
- Gambar 2.7. Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Pasangkayu ☞ 27
- Gambar 2.8. Peta Rawan Bencana Banjir Bandang Kabupaten Pasangkayu ☞ 28
- Gambar 2.9. Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Pasangkayu ☞ 29
- Gambar 2.10. Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Pasangkayu ☞ 30
- Gambar 2.11. Peta Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Pasangkayu ☞ 31
- Gambar 2.12. Peta Rawan Bencana Gelombang Tinggi Kabupaten Pasangkayu ☞ 32
- Gambar 2.13. Peta Rawan Bencana Karhutla Kabupaten Pasangkayu ☞ 33
- Gambar 2.14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2022 ☞ 34
- Gambar 2.15. Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu dengan Kabupaten Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat, 2022 ☞ 35
- Gambar 2.16. Perkembangan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2022 ☞ 35
- Gambar 2.17. Perbandingan IKA dan IKL Kabupaten Pasangkayu dengan Kabupaten Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat, 2022 ☞ 36
- Gambar 2.18. Persentase Sampah yang Tertangani di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2022 ☞ 36
- Gambar 2.19. Perkembangan Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Tahun 2005 – 2023 ☞ 37
- Gambar 2.20. Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2005 dan 2023 ☞ 38
- Gambar 2.21. Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2005 dan 2023 ☞ 39
- Gambar 2.22. Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Pasangkayu, 2005 dan 2023 ☞ 40

- Gambar 2.23. Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2023 41
- Gambar 2.24. Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan Tahun 2010 dan 2023 41
- Gambar 2.25. Sebaran Penduduk per Kecamatan Tahun 2010 dan 2023 42
- Gambar 2.26. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2005 – 2023 43
- Gambar 2.27. Pertumbuhan Sektor Ekonomi Utama Kabupaten Pasangkayu Tahun 2011 – 2023 44
- Gambar 2.28. Pertumbuhan Komponen Pengeluaran PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2011 – 2023 45
- Gambar 2.29. Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2014 – 2023 46
- Gambar 2.30. Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2006-2023 47
- Gambar 2.31. Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pasangkayu Tahun 2007-2023 (%) 48
- Gambar 2.32. Perkembangan TPT Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, dan Indonesia 2005 – 2023 51
- Gambar 2.33. Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dan Tidak Bekerja Tahun 2010 – 2023 52
- Gambar 2.34. Prevalensi Stunting di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2022 (%) 53
- Gambar 2.35. Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2021 56
- Gambar 2.36. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2010 – 2023 57
- Gambar 2.37. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2010 – 2023 (%) 58
- Gambar 2.38. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2018 – 2022 (%) 59
- Gambar 2.39. Perkembangan PDRB Harga Konstan dan PDRB Harga Nominal Kabupaten Pasangkayu Tahun 2010 – 2023 60
- Gambar 2.40. Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006 dan 2023 62
- Gambar 2.41. Kontribusi Lima Sektor Utama Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2010 dan 2023 62
- Gambar 2.42. Kontribusi Komponen Pengeluaran Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2010 dan 2023 63
- Gambar 2.43. Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Pasangkayu Tahun 2010 – 2023 65
- Gambar 2.44. PDRB per Kapita Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat, 2010 dan 2023 66

- Gambar 2.45. Perkembangan Inflasi di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2008 – 2023 ☞ 66
- Gambar 2.46. Rasio Kewirausahaan Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 ☞ 67
- Gambar 2.47. Perbandingan Rasio Kewirausahaan Kabupaten Pasangkayu dengan Kabupaten Lainnya di Provinsi Lainnya Tahun 2017-2022 ☞ 68
- Gambar 2.48. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasangkayu Tahun 2010-2022 ☞ 70
- Gambar 2.49. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Pasangkayu Tahun 2010-2022 ☞ 72
- Gambar 2.50. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2010-2022 (Tahun) ☞ 76
- Gambar 2.51. Pertumbuhan HLS dan RLS Kabupaten Pasangkayu Tahun 2011-2022 (%) ☞ 77
- Gambar 2.52. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2022 (%) ☞ 78
- Gambar 2.53. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2010-2022 (Juta Rupiah) ☞ 79
- Gambar 2.54. Perkembangan TPAK Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia 2005 – 2023 ☞ 81
- Gambar 2.55. Perkembangan Jumlah Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2010 – 2023 ☞ 82
- Gambar 2.56. Rasio Ketergantungan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2009-2022 ☞ 84
- Gambar 2.57. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 ☞ 88
- Gambar 2.58. Opini BPK atas LKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2005-2022 ☞ 90
- Gambar 2.59. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2022 ☞ 90
- Gambar 2.60. Indeks SPBE Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 dan 2022 ☞ 91
- Gambar 2.61. Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Pasangkayu dengan Kabupaten Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 ☞ 92
- Gambar 2.62. Proyeksi Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 – 2045 ☞ 100
- Gambar 2.63. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 – 2045 ☞ 101
- Gambar 2.64. Proyeksi Jumlah Berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 – 2045 ☞ 102
- Gambar 2.65. Proyeksi Jumlah Berdasarkan Kelompok Produktif dan Non-Produktif Kabupaten Pasangkayu, 2025 – 2045 ☞ 104
- Gambar 2.66. Piramida Penduduk Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 dan 2045 ☞ 104

- Gambar 2.67. Kontribusi Sub Sektor Perkebunan dan Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018-2022 (%) 112
- Gambar 2.68. Peta Kawasan Strategis Kabupaten Pasangkayu Berdasarkan RTRW Revisi 115
- Gambar 2.69. Skema Keterkaitan Antara Kawasan Strategis di Kabupaten Pasangkayu 118
- Gambar 5.1. Pentahapan Tema Pembangunan Daerah Kab. Pasangkayu 145

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menandai dimulainya era baru praktik perencanaan pembangunan di Indonesia. Secara filosofis, menurut undang-undang ini, sistem perencanaan pembangunan Nasional diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dari perspektif daerah, terbitnya undang-undang ini juga dinilai sangat positif karena telah memberi ruang yang luas kepada pemerintah daerah untuk mendesain perencanaan pembangunan daerahnya sendiri sesuai dengan karakteristik, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi. Namun kondisi ini bukan tanpa konsekuensi. Pemerintah daerah semakin dituntut untuk menggunakan pendekatan dan mengembangkan proses perencanaan pembangunan daerah yang memungkinkan sasaran-sasaran pembangunan daerah dapat tercapai secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Sesuai arahan undang-undang ini, seluruh desain perencanaan pembangunan daerah harus dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Pemerintah daerah wajib menyusun berbagai



dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka satu tahun.

Menyangkut RPJPD, alasan utama penyusunannya adalah untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah. Secara substansial, RPJPD merupakan dokumen yang lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan dan fleksibilitas yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. Dari segi muatan, RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan, yaitu tahun 2025-2045.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD memuat visi, misi, sasaran pokok, dan arah kebijakan pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Khusus untuk RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045, proses penyusunannya mengakomodasi perencanaan wilayah Kabupaten Pasangkayu dalam 20 tahun ke depan, dengan memasukkan peran sub wilayah dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang diatur di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014-2034. RTRW berposisi memberi arahan spasial dalam perumusan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu untuk 20 tahun ke depan.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045 dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan forum Konsultasi Publik, konsultasi vertikal ke pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan Peraturan Daerah RPJPD.

Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045 menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan berorientasi proses dan pendekatan berorientasi substansi. Dari sisi proses, penyusunan RPJPD Kabupaten Pasangkayu menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Sedangkan dari sisi substansi, penyusunan RPJPD Kabupaten Pasangkayu menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif, dan pendekatan spasial.

Secara teknis, proses penyusunan RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Sebagai sebuah dokumen yang mempunyai jangka waktu panjang dan lahir dari sebuah proses penyusunan dokumen yang komprehensif dan partisipatif, RPJPD ini harus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya mengenai kesepakatan terhadap Visi dan Misi yang ingin dicapai dalam 20 tahun ke depan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud memberikan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. RPJPD menjadi peta jalan atau koridor bagi arah pembangunan daerah yang akan dilaksanakan secara bertahap melalui periodisasi lima tahunan dalam jangka waktu 20 tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD), dokumen perencanaan jangka pendek (RKPD), dan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

## **1.3. Dasar Hukum**

Penyusunan RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045 menggunakan berbagai peraturan perundangan sebagai dasar hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

6. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014-2034.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
  17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
  18. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

#### **1.4. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045 disusun dengan mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat untuk memastikan adanya sinkronisasi dengan arahan kebijakan yang bersifat *top-down*, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Sinkronisasi dimaksud mulai dari Visi dan Misi, Sasaran Utama, Tujuan (Arah) Pembangunan, hingga Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dari segi keruangan, RPJPD Kabupaten Pasangkayu juga berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasangkayu. RTRW berposisi memberi arahan spasial kepada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu untuk 20 tahun ke depan.

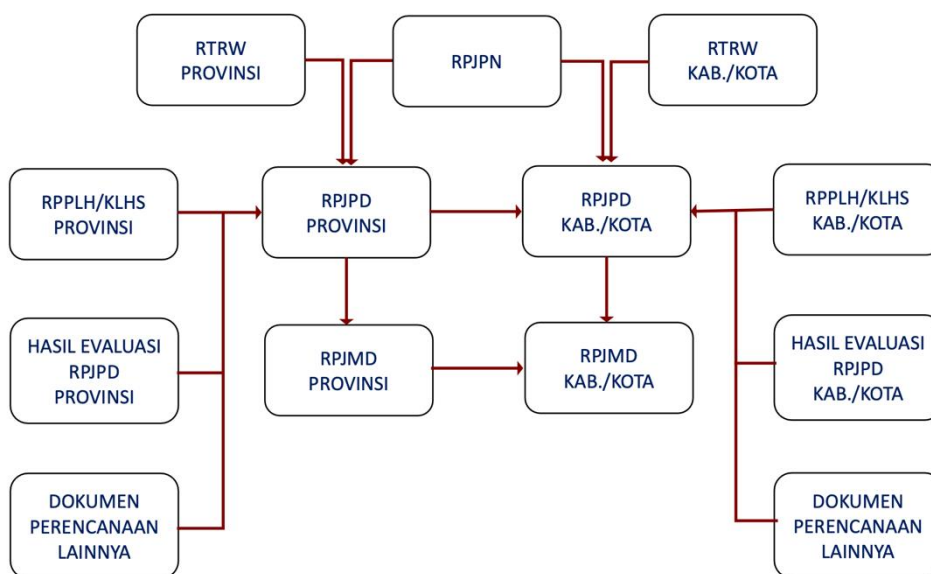
Penyusunan RPJPD Kabupaten Pasangkayu juga memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menggunakan analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk memastikan bahwa desain perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu benar-benar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Sejumlah substansi yang terdapat di dalam dokumen KLHS-RPJPD, seperti daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH), isu strategis dan

permasalahan pembangunan daerah, serta rekomendasi, dipastikan terakomodir di dalam RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045.

RPJPD ini selanjutnya merupakan dasar utama bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasangkayu untuk periode lima tahun sesuai dengan masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu. Selanjutnya RPJMD tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun.

Bagi Perangkat Daerah, RPJMD merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) untuk periode lima tahun. Renstra-PD selanjutnya menjadi bahan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) setiap tahun.

Gambar 1.1.  
Keterkaitan RPJPD Kabupaten Pasangkayu dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045 terdiri atas 6 (enam) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan uraian mengenai latar belakang penyusunan dan penetapan RPJPD ini, dasar hukum yang dijadikan dasar penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, hubungan antara RPJPD

Kabupaten Pasangkayu dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dan sistematika penyusunan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, berisi deskripsi mengenai kondisi faktual Kabupaten Pasangkayu dalam aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis, berisi deskripsi mengenai berbagai permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi dan isu-isu strategis yang berpengaruh bagi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pasangkayu.

Bab IV Visi dan Misi Daerah, yang menguraikan Visi Daerah, Sasaran Visi, dan Misi Daerah Kabupaten Pasangkayu untuk 20 tahun ke depan.

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah, yang menguraikan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu dalam 20 tahun ke depan. Bab ini juga memuat pentahapan pembangunan Daerah lima tahunan selama periode 2025-2045.

Bab VI Penutup, menguraikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045.

## **BAB II**

# **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

### **2.1. Aspek Geografis dan Demografis**

#### **2.1.1. Kondisi Geografis**

Kabupaten Pasangkayu terletak di Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi ini dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004 dan merupakan provinsi ke-33 di Indonesia. Sementara itu, Kabupaten Pasangkayu, dulunya bernama Kabupaten Mamuju Utara, dimekarkan dari Kabupaten Mamuju pada tahun 2003 melalui UU Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada saat itu, Kabupaten Mamuju Utara masih di wilayah Sulawesi Selatan, dengan empat kecamatan, yaitu Bambalamotu, Pasangkayu, Baras, dan Sarudu.

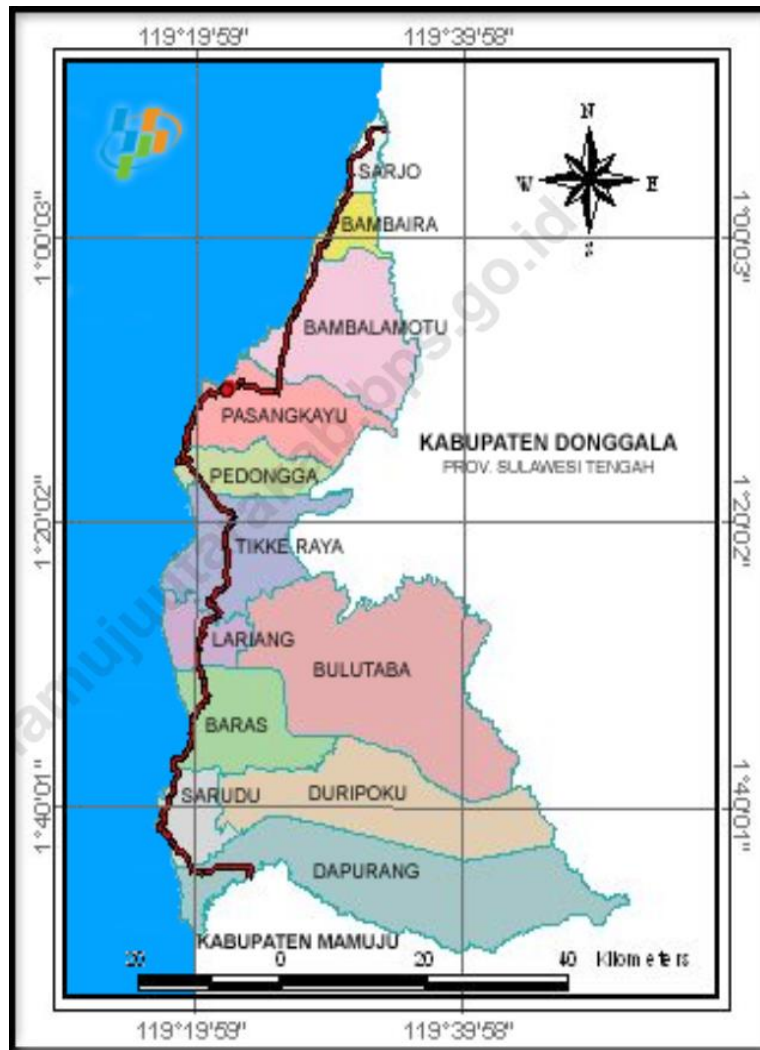
##### **2.1.1.1. Batas Wilayah**

Secara geografis, kabupaten ini terletak antara 3°39' sampai 4°16' Lintang Selatan dan 119°53' sampai 120°27' Bujur Timur. Berdasarkan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017, luas area Kabupaten Pasangkayu adalah 3.043,75 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 12 kecamatan, 59 desa, dan 4 kelurahan. Adapun batas wilayah Kabupaten Pasangkayu sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah
- Selatan : Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah
- Barat : Selat Makassar
- Timur : Kabupaten Donggala

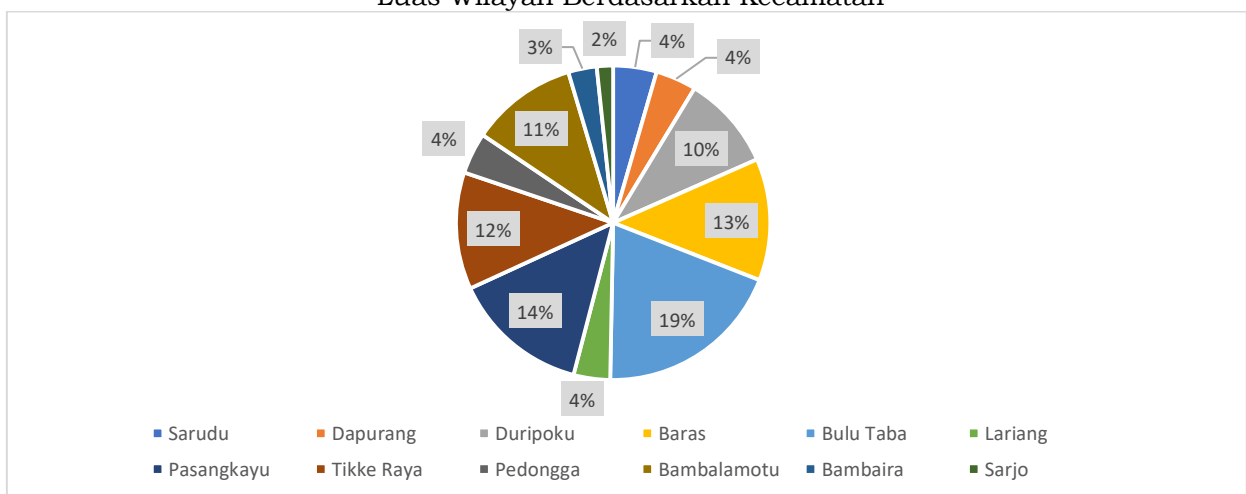


Gambar 2.1.  
Peta Administrasi Kabupaten Pasangkayu



Sumber: BPS

Gambar 2.2.  
Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan



Sumber: BPS, diolah

Hingga tahun 2023, Kabupaten Pasangkayu memiliki 12 Kecamatan, yaitu: Sarudu, Dapurang, Duripoku, Baras, Bulu Taba, Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Tikke Raya, Pedongga, Bambalamotu, Bambaira, dan Sarjo. Dari 12 kecamatan tersebut, kecamatan terluas adalah Bulu Taba (428,62 km<sup>2</sup>) atau sekitar 19 persen dari total wilayah Kabupaten Pasangkayu dan kecamatan terkecil adalah Sarjo (37,03 km<sup>2</sup>). Sementara itu, dilihat dari jarak kantor kecamatan ke ibukota kabupaten, kecamatan yang terjauh adalah Duripoku, yaitu sejauh 102 km, sedangkan kecamatan terdekat adalah Kabupaten Pasangkayu, yang juga merupakan ibukota kabupaten. Jika dibandingkan dengan luas kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Pasangkayu menempati urutan terluas kedua setelah Kabupaten Mamuju.

#### **2.1.1.2. Topografi**

Secara fisik, wilayah Kota Kabupaten Pasangkayu didominasi oleh lahan datar dan sedikit berbukit. Secara umum, ketinggian wilayah ini berada pada 0-2.175 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan kelerengan lahan yang didominasi oleh datar (0-2%) sebesar 36,59 persen, diikuti oleh curam (>40%) sebesar 25,04 persen. Faktor kelerengan lahan ini menjadi salah satu faktor dalam menentukan kesesuaian atau daya dukung lahan. Dari sisi ketinggian dari permukaan laut, wilayah di Kabupaten Pasangkayu memiliki ketinggian yang bervariasi dari yang terendah, yaitu Kecamatan Pasangkayu (4 mdpl), sedangkan yang tertinggi adalah Kecamatan Bulu Taba (38 mdpl).

Dalam kaitannya dengan topografi yang relatif datar, maka pada musim hujan sering menimbulkan masalah dalam bentuk daerah genangan. Hidrologi fisik dari wilayah dapat tergambarkan dari ketinggian air muka tanah dan keberadaan sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil. Wilayah Kecamatan Pasangkayu cukup dikenal dengan adanya sungai-sungai besar membentang dalam wilayah ini, yakni sebanyak 3 sungai besar, terdiri dari: Sungai Babia, Sungai Sulu, dan Sungai Kabupaten Pasangkayu. Sementara ketinggian air muka tanah secara umum di wilayah ini berada pada kisaran 1,0 - 2,0 meter.

#### **2.1.1.3. Iklim**

Tipe iklim di Kabupaten Pasangkayu berdasarkan klasifikasi Schmidh-Fergusson digolongkan ke dalam tipe iklim A1, sedangkan tipe iklim menurut

klasifikasi Oldeman digolongkan tipe iklim A. Dengan klasifikasi tersebut, maka Kabupaten Pasangkayu memiliki potensi pengembangan untuk sektor pertanian dengan berbagai komoditasnya.

Secara umum, Kabupaten Pasangkayu beriklim tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau berlangsung dari bulan April hingga September, sedangkan musim hujan berlangsung dari bulan Oktober hingga Maret. Pada tahun 2021, jumlah hari hujan terbanyak di Kabupaten Pasangkayu terjadi pada bulan Agustus, September, dan November, yaitu sebanyak 20 hari hujan. Sementara itu, jumlah hari hujan terendah terjadi pada bulan Februari, yaitu 12 hari hujan. Sementara itu, curah hujan tertinggi terjadi di bulan Agustus dan September, yaitu 538,5 mm, sedangkan rata-rata hujan tertinggi terjadi pada bulan September yaitu 29,92 mm/hari. Kondisi ini relatif lebih rendah dibanding tahun 2008, dimana curah hujan berkisar antara 124 mm hingga 703 mm. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Januari, yaitu sebesar 124 mm, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi di bulan Juli, yaitu sebesar 703 mm. Pada tahun 2008, total hari hujan berkisar antara 10 hari hingga 24 hari tiap bulannya. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Agustus, sedangkan jumlah hari hujan terendah terjadi pada bulan Januari, Februari, dan Mei.

#### **2.1.1.4. Kondisi Batuan**

Pembentukan batuan di Pulau Sulawesi mengalami proses yang kompleks. Pulau ini terbentuk akibat pertemuan tiga lempeng besar, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Di pulau ini terdapat tiga mandala geologi, yaitu Mandala Sulawesi Barat, Sulawesi Timur, dan Banggai Sula. Kabupaten Pasangkayu termasuk dalam Mandala Sulawesi Barat. Dengan karakteristik tersebut, Kabupaten Pasangkayu memiliki beragam jenis batuan, dimana terdapat sejumlah formasi, yaitu:

- a. Formasi Kabupaten Pasangkayu, terdiri dari perselingan batupasir dengan batulempung, setempat bersisipan dengan konglomerat dan batugamping. Formasi ini tersebar di area ibukota Kabupaten Pasangkayu, yaitu bagian barat wilayah Kecamatan Pasangkayu dan di bagian selatan memanjang dari sekitar Sungai Lariang, yaitu di bagian tengah wilayah Kecamatan Baras

memanjang dan melebar hingga ke bagian tengah wilayah Kecamatan Sarudu di Selatan.

- b. Formasi Lariang, terdiri dari perselingan konglomerat dengan batu pasir. Formasi ini sebanding dengan Molasa Celebes yang bercirikan batuan klastika dengan butir yang lebih halus.
- c. Endapan aluvial, terdiri dari endapan aluvial sungai, endapan rawa, endapan aluvial pantai, yang penyebarannya meliputi dataran rendah di pantai Barat Kabupaten Pasangkayu. Areanya memanjang dari selatan di sekitar muara Sungai Karossa hingga dataran rendah di utara di sekitar muara Sungai Lariang.

#### **2.1.1.5. Potensi Daerah**

Kabupaten Pasangkayu memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Khusus di sub-sektor pertanian, terdapat sejumlah komoditas yang menjadi unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Komoditas tersebut meliputi tanaman pangan, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu. Adapun pada tanaman perkebunan, terdapat sejumlah komoditas yang menjadi unggulan yaitu kelapa sawit, kelapa, dan kakao. Di Kabupaten Pasangkayu juga berpotensi dikembangkan peternakan, seperti sapi, kerbau, kambing dan ayam, serta pengembangan tanaman hortikultura, seperti jeruk dan sayuran. Potensi di sub sektor pertanian ini didukung oleh luas lahan tegal/kebu dan ladang/huma yang merupakan kabupaten yang memiliki lahan terluas dibanding daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2022, luas lahan tegal/kebun dan ladang/huma di Kabupaten Pasangkayu masing-masing sebesar 48.518 ha dan 43.525 ha atau berkontribusi masing-masing sekitar 36 persen dan 45 persen dari total luas lahan tegal/kebun dan ladang/huma di Provinsi Sulawesi Barat. Sementara itu, jika dilihat lebih detail pada komoditas-nya, perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu menempati area seluas 59.933 ha di tahun 2022 atau sekitar 55 persen dari total luas lahan sawit di Provinsi Sulawesi Barat. Kondisi ini menempatkan Kabupaten Pasangkayu sebagai produsen kelapa sawit terbesar di Provinsi Sulawesi Barat dengan volume produksi sebesar 139.508 ton di tahun 2022 atau sekitar 53 persen dari total produksi kelapa sawit di Sulawesi Barat. Tidak

hanya unggul dari volume dan luas area produksi, Kabupaten Pasangkayu juga memiliki produktivitas kelapa sawit tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu 3.816,5 kg/ha, atau lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Sulawesi Barat, yaitu sebesar 3.545 kg/ha. Hal ini menunjukkan posisi Kabupaten Pasangkayu sebagai lumbung produksi kelapa sawit di Provinsi Sulawesi Barat.

Kabupaten Pasangkayu juga memiliki potensi untuk pengembangan industri pengolahan yang berbasis pada komoditas pertanian, kehutanan, dan perikanan. Jenis industri yang berpotensi dikembangkan di antaranya adalah industri pangan dan industri agro. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak tujuh perusahaan skala besar/sedang yang beroperasi di Kabupaten Pasangkayu yang mempekerjakan sebanyak 815 tenaga kerja dan menghasilkan output produksi senilai Rp7.360,03 milyar. Saat ini juga sudah terdapat upaya untuk mendorong industrialisasi melalui pengembangan Kawasan Industri di Kecamatan Tikke Raya yang berpotensi didorong untuk menjadi Kawasan Industri (KI). Keberadaan kawasan industri ini akan semakin penting seiring dengan peran dari Kabupaten Pasangkayu sebagai salah satu penopang Ibu Kota Nusantara (IKN).

#### **2.1.1.6. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TL) merupakan suatu gambaran kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu atau serangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan intensitas pembangunan apakah masih dapat dikembangkan dan ditambahkan. Selain itu dapat menjadi informasi dasar dalam mengkaji perencanaan suatu wilayah agar tidak berdampak lingkungan.

Deskripsi dari D3TL merupakan perbandingan antara ketersediaan pelayanan ekosistem dengan kebutuhan masyarakat. Daya dukung lingkungan (D3TL) dimulai dari klasifikasi karakteristik ekoregion yang terdiri dari bentang lahan, tipe vegetasi alami dan karakteristik penutupan lahan. Data tersebut menjadi bahan pembuatan dan perhitungan peta layanan atau kinerja jasa ekosistem. Selanjutnya layanan jasa ekosistem penyediaan pangan dan air menjadi dasar penentuan status D3TL indikatif.

### **Daya Dukung Daya Tampung Pangan**

Secara sederhana, daya dukung daya tampungan pangan merupakan selisih penyediaan pangan suatu wilayah dengan kebutuhan penduduk akan pangan pada wilayah tersebut. Daya dukung penyediaan pangan sendiri merupakan deskripsi suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara berkelanjutan. Pengukuran daya dukung penyediaan pangan dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana produksi pangan dalam wilayah tersebut mampu memenuhi kebutuhan lokal. Pemenuhan kebutuhan pangan mencakup pertimbangan terhadap jenis pangan produktivitas dan kualitas. Perhitungan ketersediaan pangan dilakukan dengan mengidentifikasi potensi pangan di Kabupaten Pasangkayu dari data Neraca Bahan Makanan (NBM) dalam satuan energi (kkal) berdasarkan jenis pangan yang tersedia didalam wilayah.

Adapun kebutuhan penduduk didasarkan pada perhitungan kebutuhan pangan individu, dengan mempertimbangkan standar Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.110 kalori per hari per kapita yang didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia. Hasil perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kabupaten Pasangkayu digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat kelebihan atau kekurangan pasokan pangan dalam wilayah tersebut.

Tabel 2.1.

Kondisi Daya Dukung Daya Tampung Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu

No.	Kecamatan	Jumlah Populasi (jiwa)	Ketersediaan Pangan (kkal)	Kebutuhan Pangan (kkal)	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Status Ambang Batas Penduduk (Jiwa)
1	Bambaira	10.941	6.757.651.883	8.386.276.500	8.642	-2.299
2	Bambalamotu	21.571	20.877.647.305	16.534.171.500	26.750	5.179
3	Baras	23.689	28.202.238.611	18.157.618.500	36.033	12.344
4	Bulu Taba	12.668	42.653.063.725	9.710.022.000	54.681	42.013
5	Dapurang	18.602	83.961.739.447	14.258.433.000	108.032	89.430
6	Duripoku	6.854	21.031.619.845	5.253.591.000	27.028	20.174
7	Lariang	8.221	9.662.111.070	6.301.396.500	12.311	4.090
8	Pasangkayu	36.888	27.682.294.377	28.274.652.000	35.359	-1.529
9	Pedongga	14.221	10.549.319.594	10.900.396.500	13.461	-760
10	Sarjo	8.970	4.567.220.490	6.875.505.000	5.831	-3.139
11	Sarudu	16.722	10.685.707.495	12.817.413.000	13.645	-3.077
12	Tikke Raya	19.080	25.891.555.887	14.624.820.000	32.943	13.863
<b>Total</b>		<b>198.427</b>	<b>292.522.169.730</b>	<b>152.094.295.500</b>	<b>374.716</b>	<b>176.289</b>

Sumber: Pengolahan Data D3TLH Kabupaten Pasangkayu, 2022

Tabel 2.2.

Sebaran Spasial Status Daya Dukung Daya Tampung Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu

No.	Kecamatan	Status Daya Dukung Pangan (ha)	
		Belum Melampaui	Sudah Melampaui
1	Bambaira	3.768,55	2.282,42
2	Bambalamotu	15.956,22	4.335,41
3	Baras	22.902,07	5.344,77
4	Bulu Taba	42.426,27	2.012,32
5	Dapurang	85.555,73	5.639,54
6	Duripoku	18.717,97	1.372,50
7	Lariang	5.163,44	2.738,23
8	Pasangkayu	19.963,14	7.426,84
9	Pedongga	6.138,02	2.571,65
10	Sarjo	1.948,05	1.832,79
11	Sarudu	6.444,50	3.403,87
12	Tikke Raya	19.364,02	4.964,33
<b>Total</b>		<b>248.347,98</b>	<b>43.924,68</b>

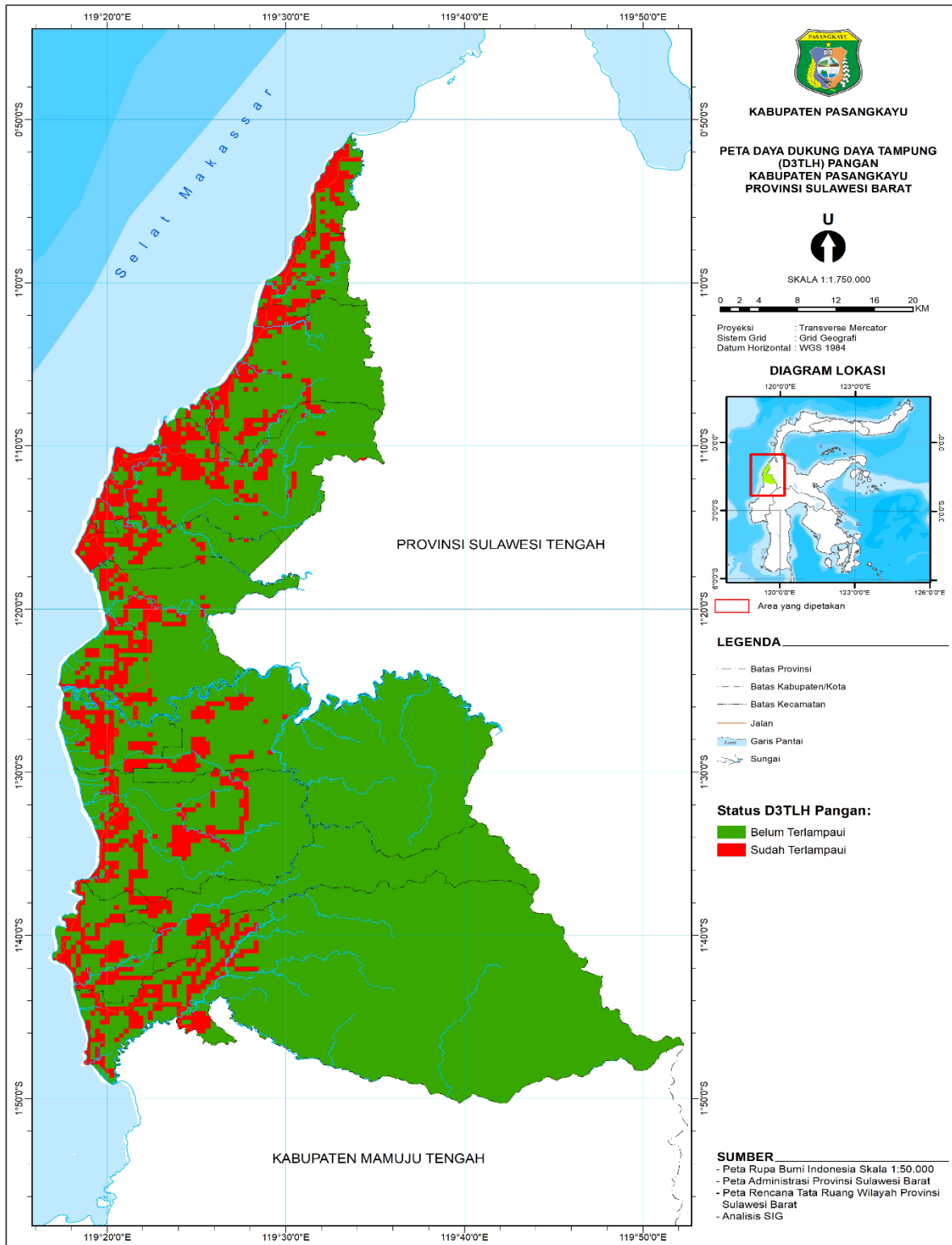
Sumber: Pengolahan Data D3TLH Kabupaten Pasangkayu, 2022

Secara umum, status Daya Dukung Daya Tampung pangan di Kabupaten Pasangkayu dalam kondisi belum terlampaui. Hal tersebut terlihat dari penyediaan pangan saat ini berada pada angka sekitar 292,5 miliar kkal, sedangkan kebutuhan hanya sebesar 152 miliar kkal berdasarkan jumlah penduduk sebesar 198.427 jiwa. Sehingga kondisi pangan Kabupaten Pasangkayu masih surplus sekitar 140 miliar kkal yang setara dengan 183 ribu jiwa penduduk. Namun hal perlu menjadi perhatian, bahwa terdapat beberapa beberapa kecamatan yang memiliki kebutuhan pangan yang lebih besar dibandingkan penyediaan seperti Kecamatan Bambaira, Pedongga, Sarjo, Sarudu, dan Pasangkayu sebagai ibukota kabupaten.

Secara spasial, status daya dukung pangan baik di Kabupaten Pasangkayu dengan persentase sekitar 15 persen yang terlampaui. Beberapa Kecamatan pun perlu menjadi perhatian status daya dukung pangannya. Kecamatan Sarjo memiliki status daya dukung pangan yang terlampaui cukup luas yaitu sekitar 48 persen dari luas wilayah. Kecamatan Lariang, dan Sarudu memiliki status daya dukung pangan yang terlampaui sekitar 34 persen dari luasan kecamatan tersebut. Adapun Kecamatan Pasangkayu selaku ibukota memiliki status daya dukung pangan yang terlampaui sebesar 27 persen dari luasan wilayahnya.



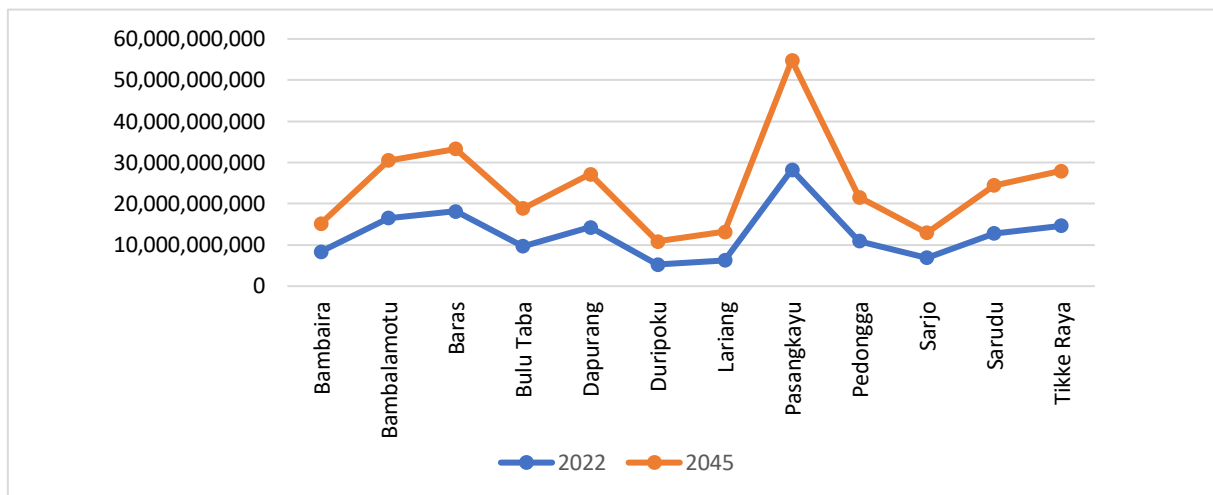
Gambar 2.3.  
Peta D3TLH Pangan Kabupaten Pasangkayu



Hal yang menjadi perhatian, bahwa pertambahan jumlah penduduk yang pesat dimasa yang akan datang mengakibatkan permintaan pangan yang besar pula, dan berdampak terhadap status daya dukung pangan di masa yang akan

datang. Tren pun telah memeplihatkan bahwa, jumlah penduduk semakin bertambah pada setiap wilayah di Kabupaten pasangkayu. Pertambahan penduduk yang diikuti peningkatan kebutuhan pangan akan terjadi wilayah padat penduduk seperti ibukota kabupaten.

Gambar 2.4.  
Perbandingan Kebutuhan Pangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 dan 2045



Sumber: Pengolahan Data D3TLH Kabupaten Pasangkayu, 2022

### Daya Dukung Daya Tampung Air

Daya dukung penyediaan air, atau kapasitas penyediaan air, merujuk pada kemampuan sistem atau infrastruktur air untuk menyediakan pasokan air yang cukup dan bermutu bagi penduduk yang membutuhkannya. Kehadiran kapasitas ini sangat krusial dalam menjamin ketersediaan air yang memadai untuk berbagai kebutuhan, termasuk untuk rumah tangga, sektor komersial, industri, pertanian, dan bidang lainnya di suatu daerah. Evaluasi status daya dukung penyediaan air melibatkan perbandingan antara perhitungan ketersediaan air dan kebutuhan air khususnya di Kabupaten Pasangkayu.

Penyediaan air diperoleh berdasarkan perhitungan identifikasi potensi air yang didasarkan pada data potensi wilayah Sungai yang diperoleh dari data debit air setiap DAS, data air permukaan, dan potensi air tanah. Nilai potensi penyediaan air tersebut diintegrasikan dengan Sistem Informasi geografis dan indeks jasa lingkungan penyediaan air untuk mengalokasikan potensi air. Dengan pendekatan ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ketersediaan air di Kabupaten Pasangkayu, sehingga hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang berbasis pada informasi yang lebih akurat dan relevan.

Kebutuhan energi bahan pangan diperoleh melalui perhitungan Angka Kecukupan Energi (AKE) penduduk dan kebutuhan air domestik dihitung dengan mengacu pada Permen LHK No.17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam pembangunan suatu daerah. Selain kebutuhan air domestik, kebutuhan air tutupan lahan juga perlu diikutsertakan dalam perhitungan kebutuhan air suatu daerah. Bila angka kebutuhan melampaui persediaan berarti daya dukung daya tampung terlampaui, sebaliknya bila kebutuhan lebih kecil dari persediaan maka diperoleh informasi status daya dukung daya tampung belum terlampaui. Nilai potensi air yang digunakan dalam satuan energi ( $m^3$ ) yang tersedia di dalam wilayah.

Tabel 2.3.  
Status Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Air Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu, 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Populasi (jiwa)	Ketersediaan Air ( $m^3$ )	Kebutuhan Air Penduduk ( $m^3$ )	Kebutuhan air Lahan ( $m^3$ )	Kebutuhan air Keseluruhan ( $m^3$ )	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Status Ambang Batas Penduduk (jiwa)
1	Bambaira	10.941	16.887.312	8.752.800	24.735.250	33.488.050	-9.793	-20.734
2	Bambalamotu	21.571	52.657.492	17.256.800	66.071.229	83.328.029	-16.673	-38.244
3	Baras	23.689	70.655.501	18.951.200	135.477.306	154.428.506	-80.959	-104.648
4	Bulu Taba	12.668	108.452.105	10.134.400	74.555.940	84.690.340	42.573	29.905
5	Dapurang	18.602	209.661.144	14.881.600	98.355.403	113.237.003	138.759	120.157
6	Duripoku	6.854	52.134.020	5.483.200	38.020.761	43.503.961	17.655	10.801
7	Lariang	8.221	23.361.242	6.576.800	57.492.966	64.069.766	-42.662	-50.883
8	Pasangkayu	36.888	70.141.158	29.510.400	134.852.069	164.362.469	-80.829	-117.717
9	Pedongga	14.221	25.529.755	11.376.800	64.277.396	75.654.196	-48.422	-62.643
10	Sarjo	8.970	11.624.312	7.176.000	18.606.083	25.782.083	-8.717	-17.687
11	Sarudu	16.722	26.208.298	13.377.600	66.083.230	79.460.830	-49.843	-66.565
12	Tikke Raya	19.080	64.848.452	15.264.000	175.328.361	190.592.361	-138.084	-157.164
<b>Total</b>		<b>198.427</b>	<b>732.160.790</b>	<b>158.741.600</b>	<b>953.855.993</b>	<b>1.112.597.593</b>	<b>-276.995</b>	<b>-475.422</b>

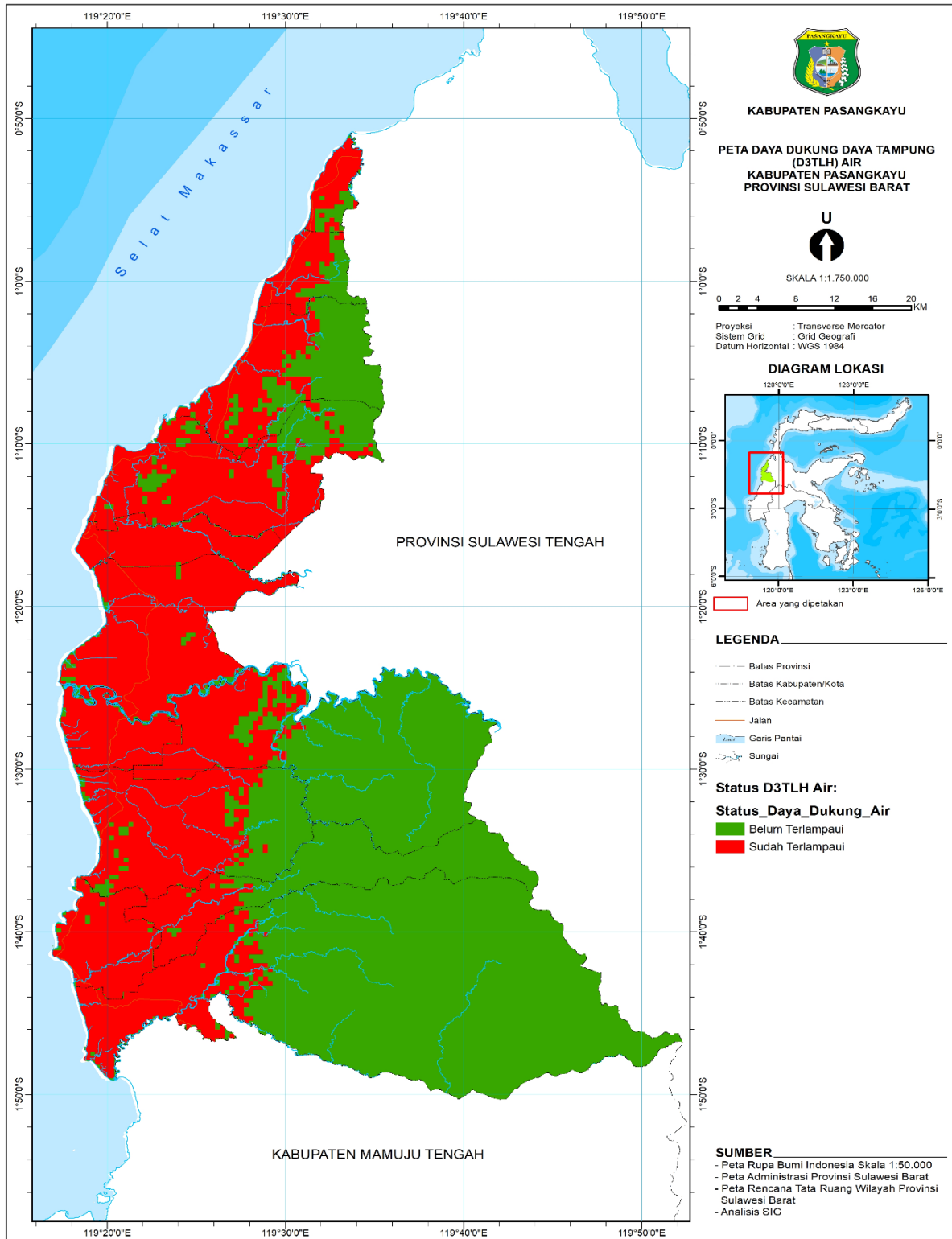
Sumber: Pengolahan Data D3TLH Kabupaten Pasangkayu, 2022

Secara umum, status daya dukung daya tampung air di Kabupaten Pasangkayu dalam kondisi telah terlampaui. Hal tersebut terlihat dari penyediaan air saat ini berada pada angka sekitar 732 juta  $m^3$ , sedangkan kebutuhan sekitar 1,1 miliar  $m^3$ . Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan air penduduk sebesar 158 juta  $m^3$ , dan kebutuhan air dari lahan sebesar 953 juta  $m^3$ . Status Daya dukung daya tampung air yang telah terlampaui hampir terjadi

diseluruh kecamatan di Kabupate Pasangkayu, kecuali Kecamatan Bulu Taba, dapurang, dan Durpoku.

Secara spasial, status daya dukung air yang terlampaui Kabupaten Pasangkayu telah mencapai hampir 47 persen dari luas wilayah daratan Kabupaten Pasangkayu. Kecamatan Lariang, Pedongga, Sarudu, dan Tikke Raya memiliki wilayah lebih dari 90 persen yang berstatus daya dukung airnya terlampaui. Hal tersebut dipengaruhi karena Sebagian besar wilayahnya berada pada daerah pesisir, dan jumlah penduduk. Kecamatan Bambaira, Baras, Sarjo, dan Pasangkayu sebagai ibukota Kabupaten memiliki status daya dukung airnya terlampaui berada pada kisaran 65-75 persen dri luas wilayahnya. Adapun Kecamatan Bulu Taba, Dapurang, dan Duripoku memiliki status daya dukung air yang terlampaui kurang dari 30 persen dari luas wilayahnya.

Gambar 2.5.  
Peta D3TLH Air Kabupaten Pasangkayu



Sumber: Pengolahan Data D3TLH Kabupaten Pasangkayu, 2022

Tabel 2.4.

Sebaran Spasial Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Air Menurut Kecamatan

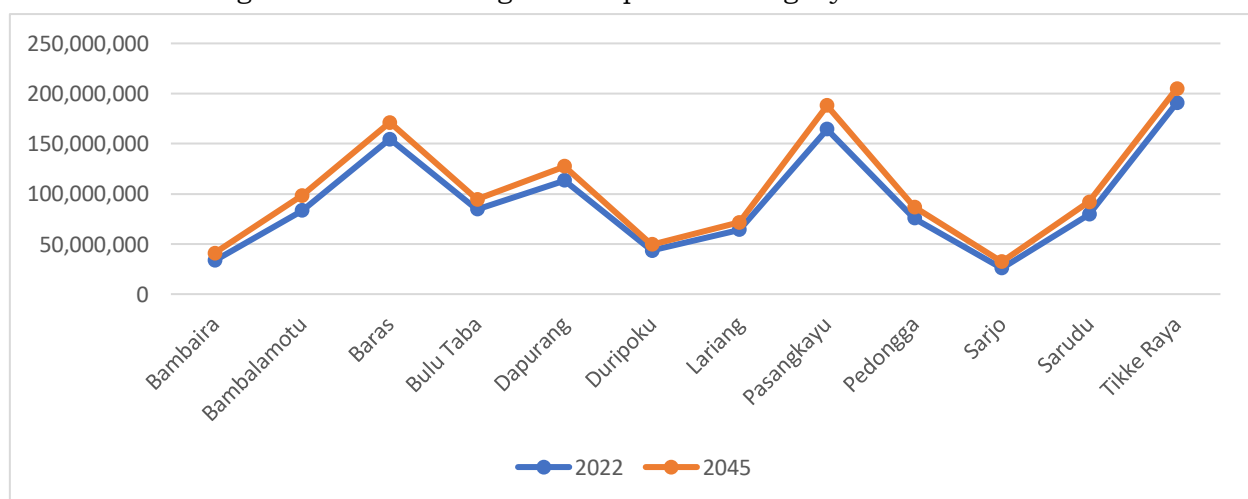
No.	Kecamatan	Status Daya Dukung Air (ha)	
		Belum Melampaui	Sudah Melampaui
1	Bambaira	2.077,51	3.973,47
2	Bambalamotu	10.171,28	10.120,35
3	Baras	8.517,82	19.729,02
4	Bulu Taba	33.358,78	11.079,81
5	Dapurang	76.915,62	14.279,66
6	Duripoku	14.276,31	5.814,15
7	Lariang	317,31	7.584,36
8	Pasangkayu	7.060,45	20.329,54
9	Pedongga	217,65	8.492,02
10	Sarjo	990,06	2.790,78
11	Sarudu	338,88	9.509,49
12	Tikke Raya	1.317,13	23.011,22
<b>Total</b>		<b>155.558,80</b>	<b>136.713,86</b>

Sumber: Pengolahan Data D3TLH Kabupaten Pasangkayu, 2022

Pertambahan jumlah penduduk yang pesat di masa yang akan datang mengakibatkan permintaan air yang besar pula, dan berdampak terhadap status daya dukung pangan di masa yang akan datang. Pertambahan penduduk yang diikuti peningkatan lahan yang membutuhkan air untuk lahan pertanian secara umum.

Gambar 2.6.

Perbandingan Kebutuhan Pangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 dan 2045



Sumber: Pengolahan Data D3TLH Kabupaten Pasangkayu, 2022

#### **2.1.1.7. Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Kerusakan Lingkungan Hidup**

Dampak dari lingkungan hidup suatu wilayah dapat dilihat dari bencana pada wilayah tersebut. Bencana merupakan kejadian yang menimbulkan kerusakan yang akan menyebabkan kerugian pada kehidupan, baik itu secara individu ataupun publik. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 mendefinisikan bencana merupakan sebagai suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana pun banyak disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari faktor alam, non alam, dan manusia atau secara sosial.

Bencana alam merupakan suatu bencana yang disebabkan oleh fenomena alam yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Daerah yang beriklim tropis ditandai dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang terkadang cukup ekstrim. Hal tersebut akan menimbulkan beberapa bentuk bencana alam yang terjadi di Indonesia. Salah satu bentuk bencana alam yang sering muncul di Indonesia adalah bencana yang bersifat hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan kekeringan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah meluncurkan hasil kajian risiko bencana yang dikeluarkan di halaman web <http://inarisk.bnpb.go.id>. Kajian risiko bencana tersebut dianalisis melalui beberapa pendekatan dan sejarah atau catatan kebencanaan yang pernah terjadi. Melalui data tersebut dapat diidentifikasi potensi bencana yang dapat terjadi di Kabupaten Pasangkayu. Berdasarkan laman <http://inarisk.bnpb.go.id> terdapat beberapa jenis bencana yang berpotensi terjadi dengan probabilitas tinggi, yaitu banjir, banjir bandang, gempa bumi, gelombang tinggi, tsunami, tanah longsor dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Data menunjukkan adanya beberapa area yang berpotensi terjadi bencana di setiap kecamatan di Kabupaten Pasangkayu berdasarkan situs resmi BNPB <http://inarisk.bnpb.go.id>. Jenis bencana yang paling luas

berpotensi di Kabupaten Pasangkayu adalah bencana tanah longsor. Potensi terjadinya bencana tanah longsor sekitar 98.489,44 hektar yang sebagian besar di tiga kecamatan yaitu Dapurang, Bulu Taba, dan Duripoku. Tiga kecamatan tersebut sangat berpotensi terjadi bencana tanah longsor karena berada pada daerah dataran tinggi dengan kondisi kemiringan lereng curam, dan sangat curam.

Selain bencana tanah longsor, bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memiliki potensi besar terjadi di Kabupaten Pasangkayu. Potensi terjadinya bencana karhutla sekitar 44.227,28 hektar yang tersebar keseluruh atau dua belas kecamatan yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Kecamatan Baras, dan Pasangkayu merupakan kecamatan yang memiliki potensi bencana karhutla paling luas. Potensi bencana karhutla tersebar dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat dalam membuka lahan perkebunan oleh masyarakat.

Potensi terjadinya bencana banjir, dan banjir bandang hampir di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Bambaira, dan Bambalamotu. Bencana gempa bumi berpotensi terjadi di delapan kecamatan yaitu Bambaira, Bambalamotu, Bulu Taba, Dapurang, Pasangkayu, Pedonggo, Sarjo, dan Tikke Rata. Bencana tsunami yang memiliki dampak paling besar ketika terjadi berpotensi terjadi pada seluruh kecamatan yang berada di pesisir Kabupaten Pasangkayu atau yang berbatasan langsung dengan selat makassar. Terdapat tiga kecamatan yang memiliki potensi semua jenis atau tujuh jenis bencana yang ada di Kabupaten Pasangkayu yaitu Kecamatan Dapurang, Pasangkayu, dan Pedongga.

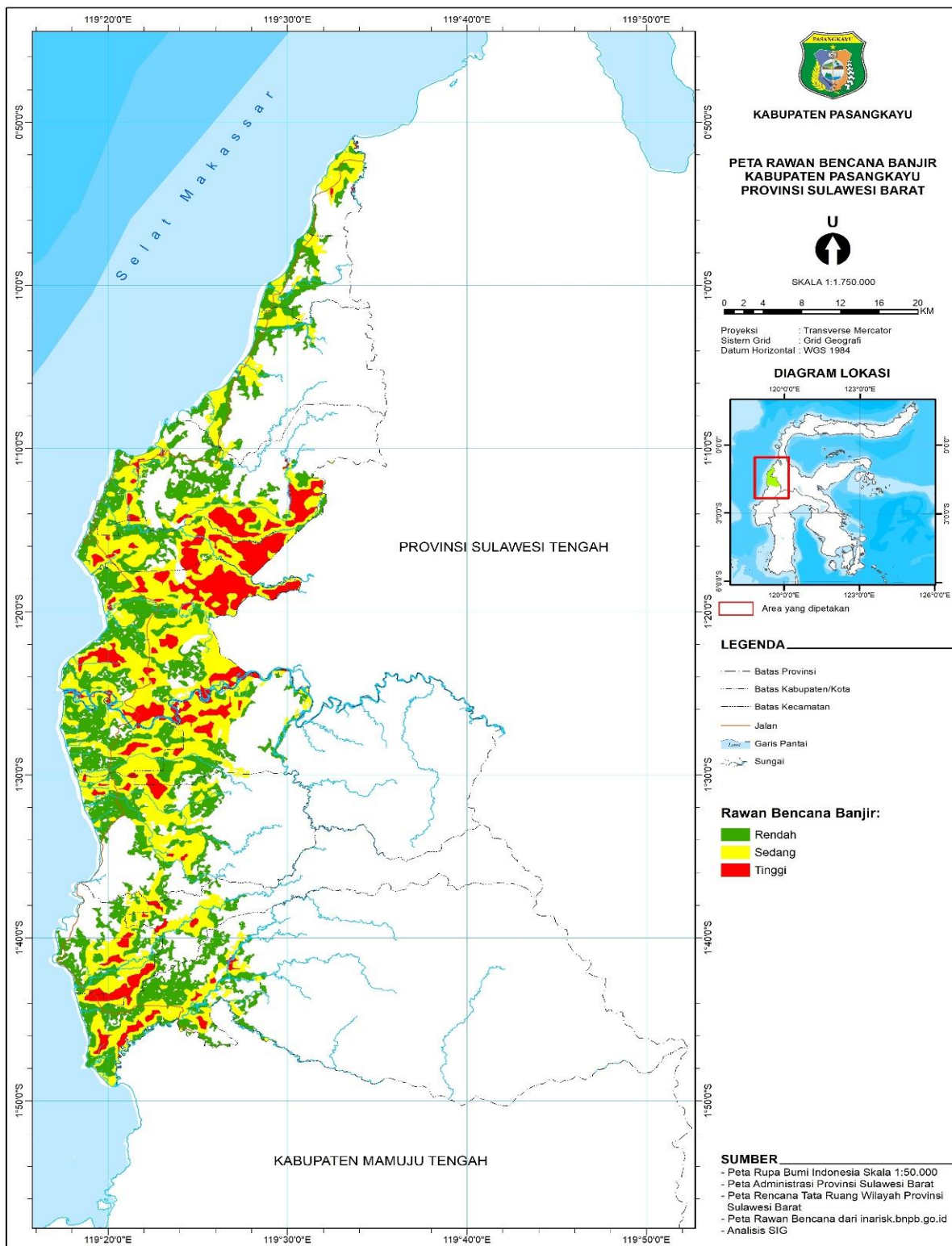


Tabel 2.5.  
Daerah Rawan Bencana PerKecamatan di Kabupaten Pasangkayu, 2023

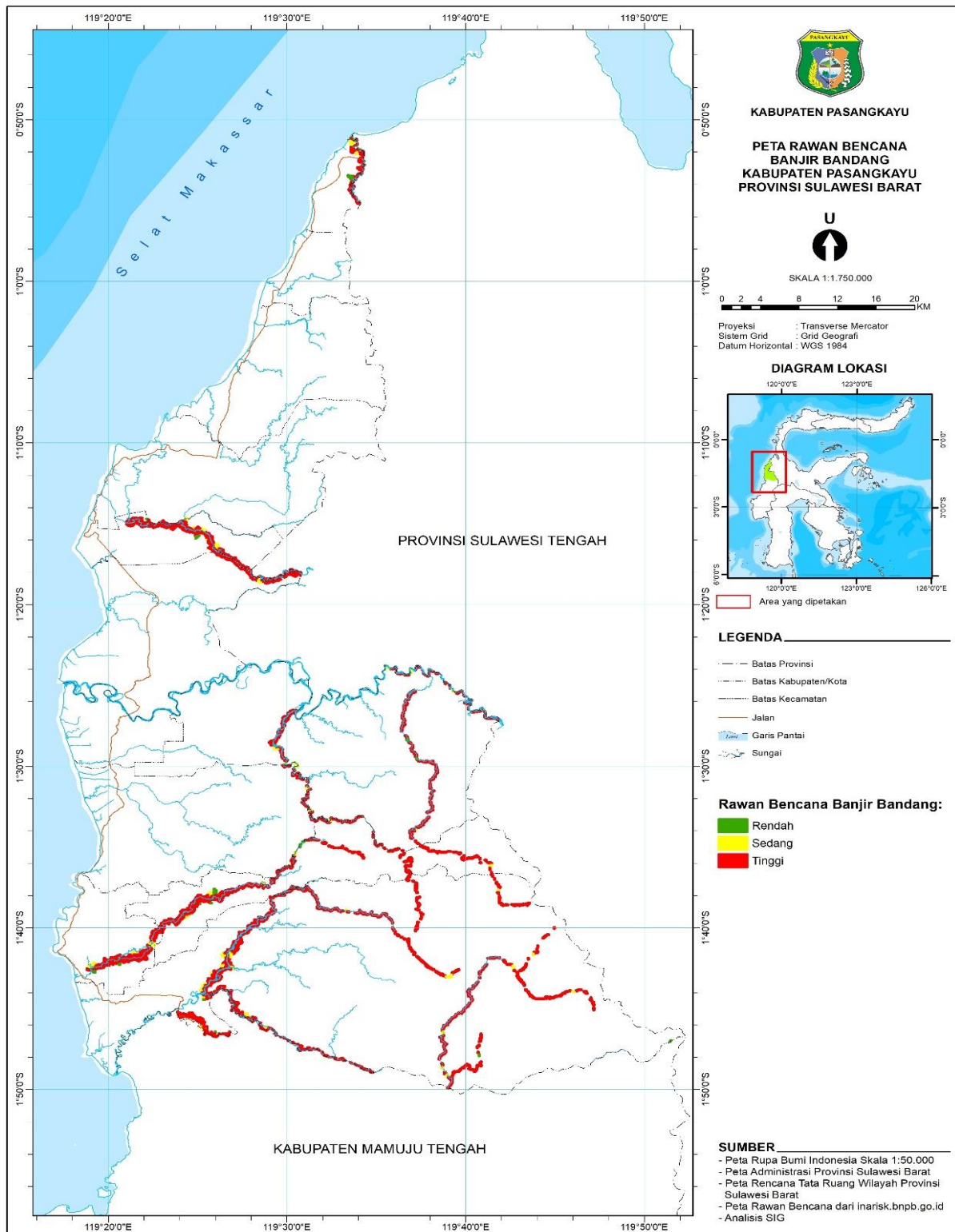
No.	Kecamatan	Banjir	Banjir Bandang	Gempa Bumi	Tanah Longsor	Tsunami	Gelombang Tinggi	Karhutla
1	Bambaira	-	-	219,87	-	241,38	217,40	600,61
2	Bambalamotu	-	-	107,34	144,96	243,59	198,42	369,84
3	Baras	471,27	88,12	-	212,94	369,83	64,53	8.842,42
4	Bulu Taba	1.291,36	654,22	281,04	17.914,37	-	-	4.580,73
5	Dapurang	1.010,49	1.937,28	54,76	68.033,24	366,67	18,69	1.207,63
6	Duripoku	199,27	953,57	-	11.388,97	-	-	2.436,36
7	Lariang	406,32	-	-	-	157,43	-	1.884,11
8	Pasangkayu	2.448,15	27,47	2.889,59	794,95	299,72	147,77	8.003,66
9	Pedongga	2.367,49	610,52	2.626,18	0,00	180,82	137,06	423,67
10	Sarjo	72,37	190,48	1.587,41	-	411,04	135,66	455,63
11	Sarudu	1.011,53	487,23	-	-	147,63	-	5.849,16
12	Tikke Raya	5.345,62	316,36	3.913,85	-	560,95	42,32	9.573,46
<b>Total</b>		<b>14.623,86</b>	<b>5.265,25</b>	<b>11.680,03</b>	<b>98.489,44</b>	<b>2.979,06</b>	<b>961,85</b>	<b>44.227,28</b>

Sumber: InaRISK, 2020

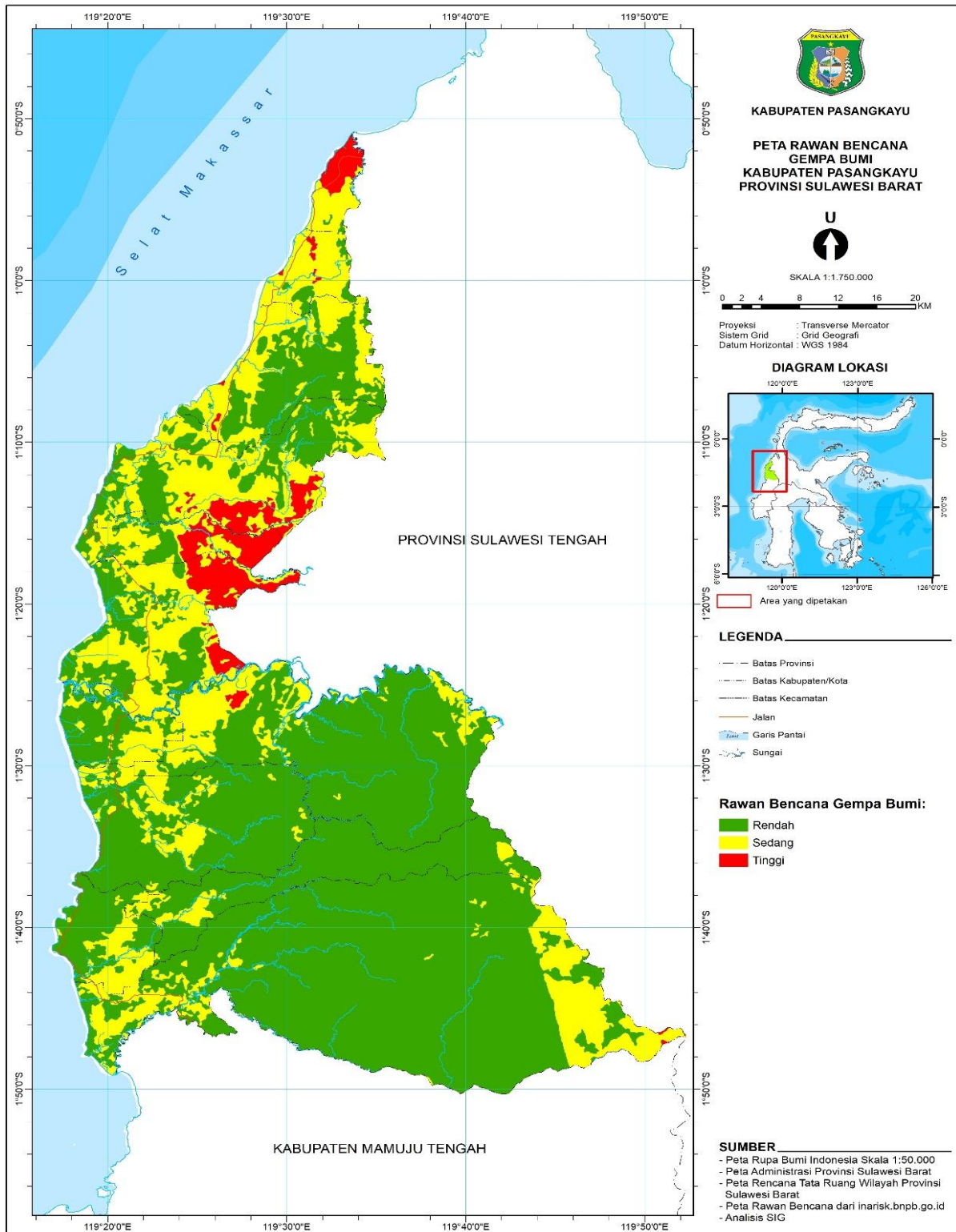
Gambar 2. 7.  
Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Pasangkayu



Gambar 2.8.  
Peta Rawan Bencana Banjir Bandang Kabupaten Pasangkayu

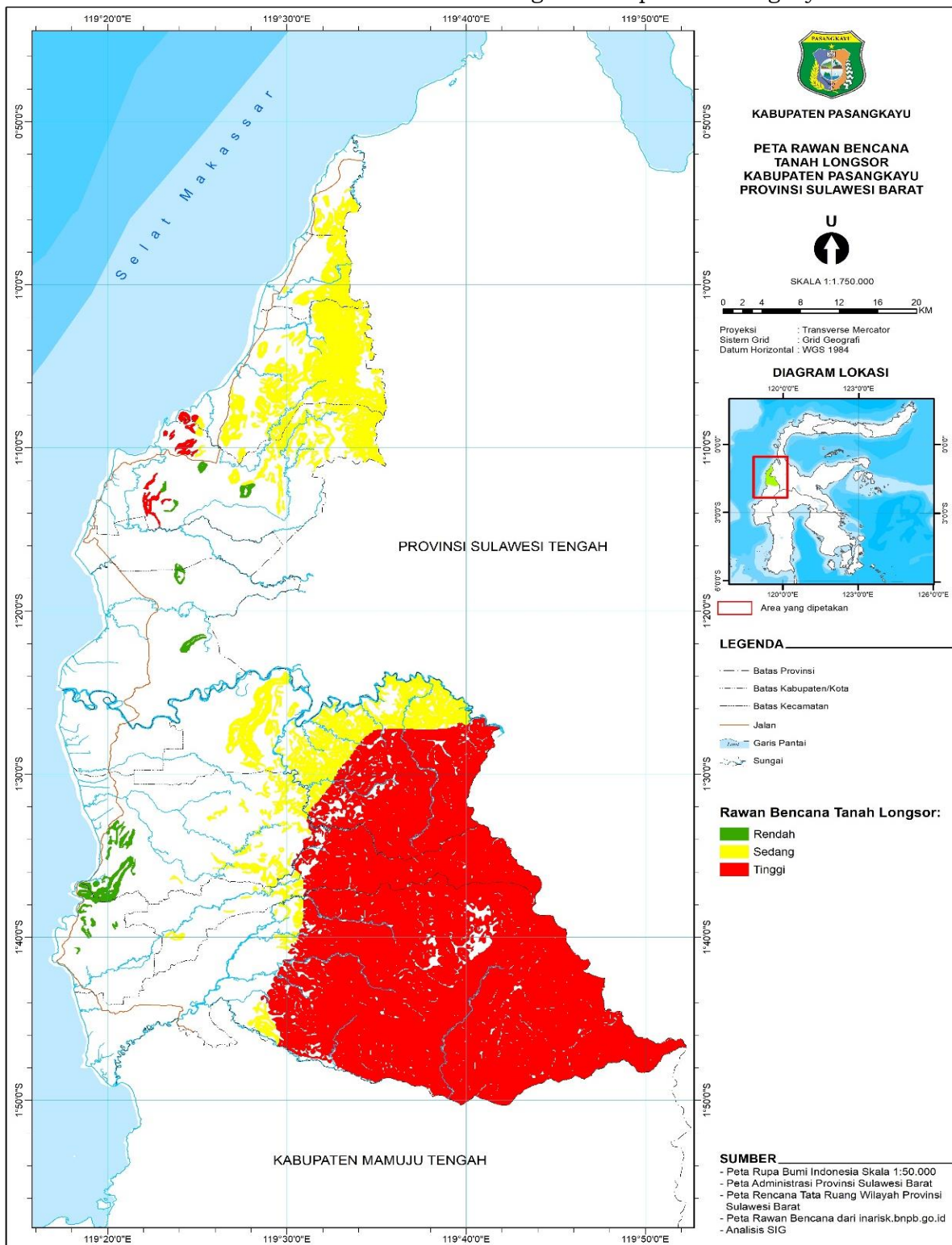


Gambar 2.9.  
Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Pasangkayu

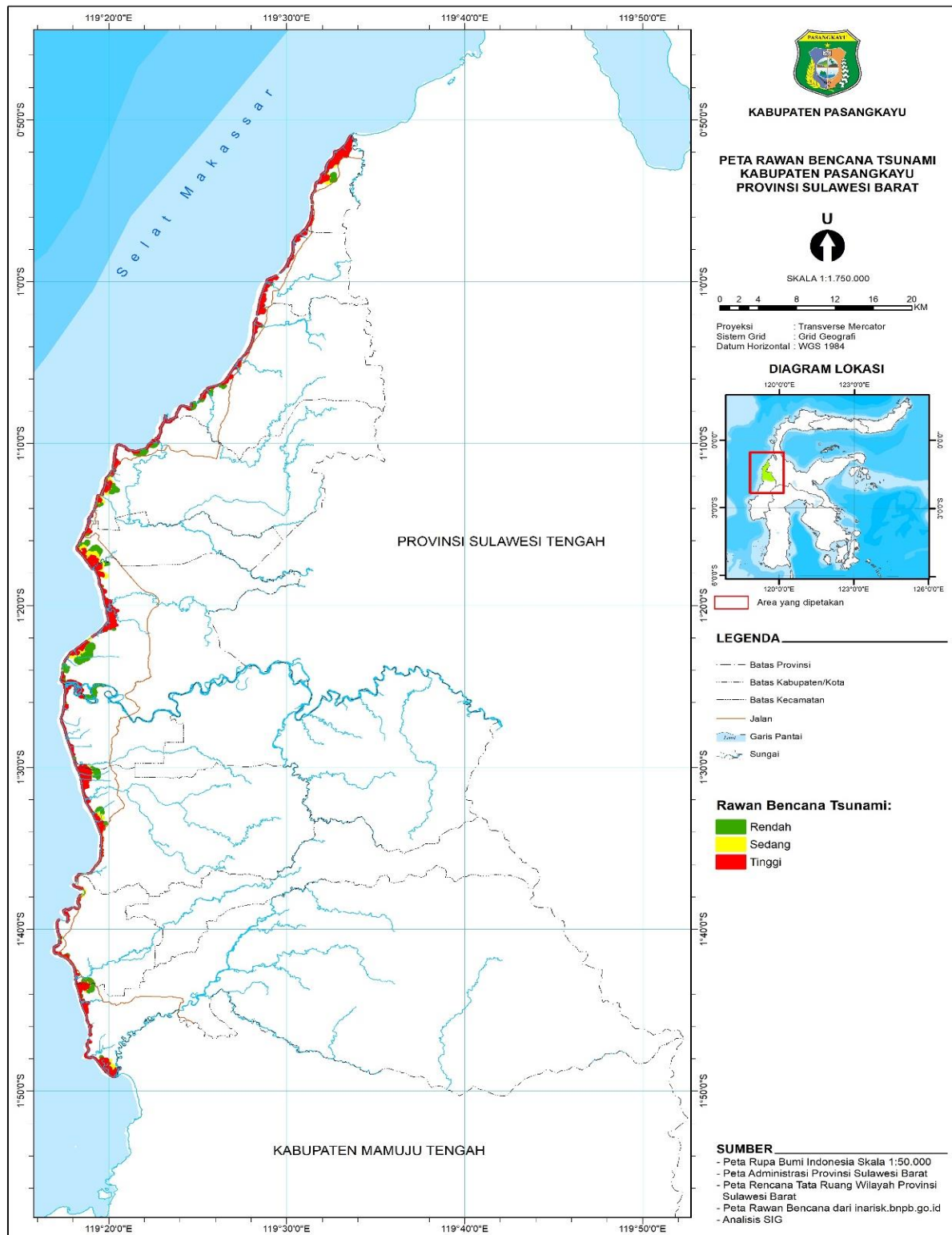




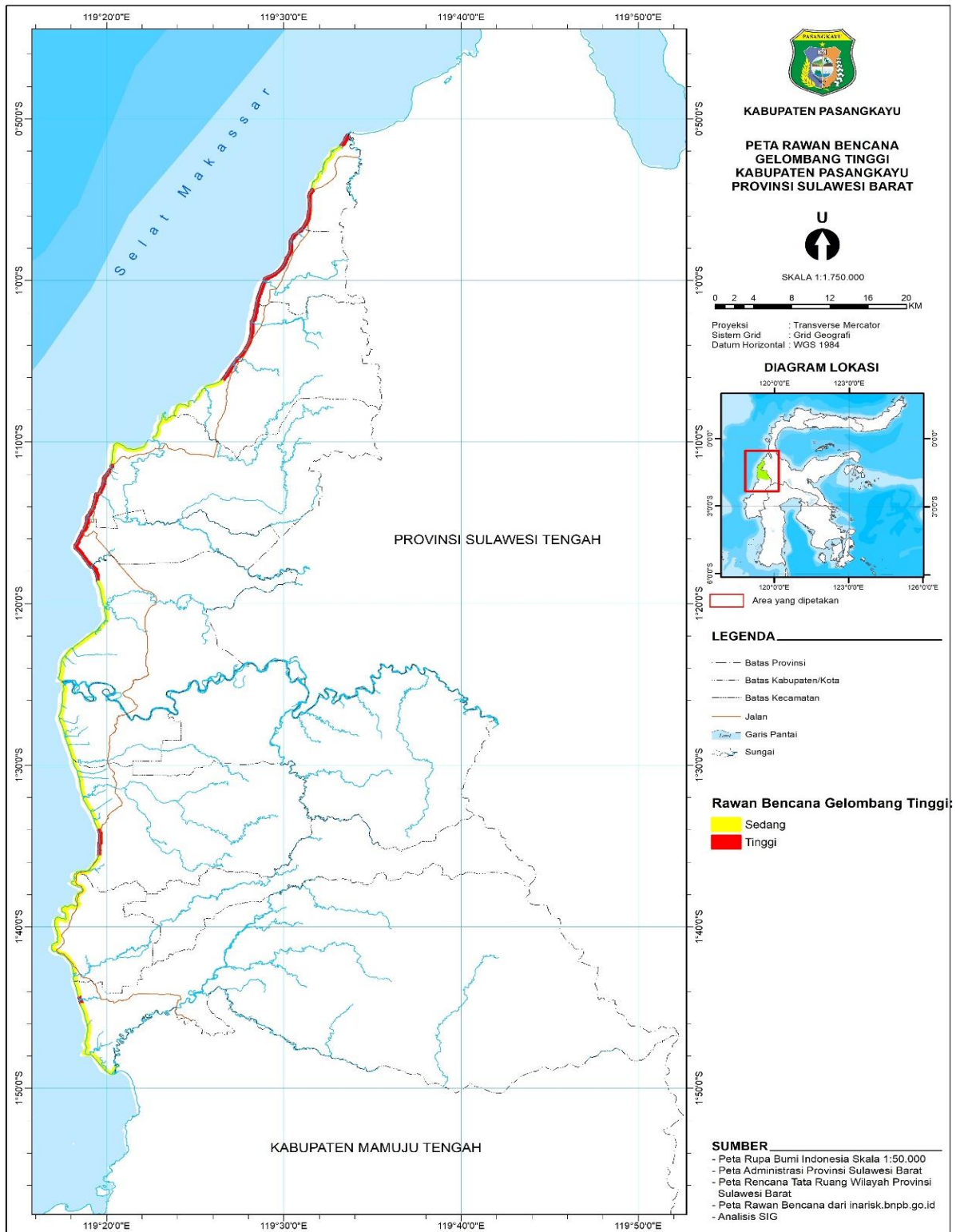
Gambar 2.10.  
Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Pasangkayu



Gambar 2. 11.  
Peta Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Pasangkayu

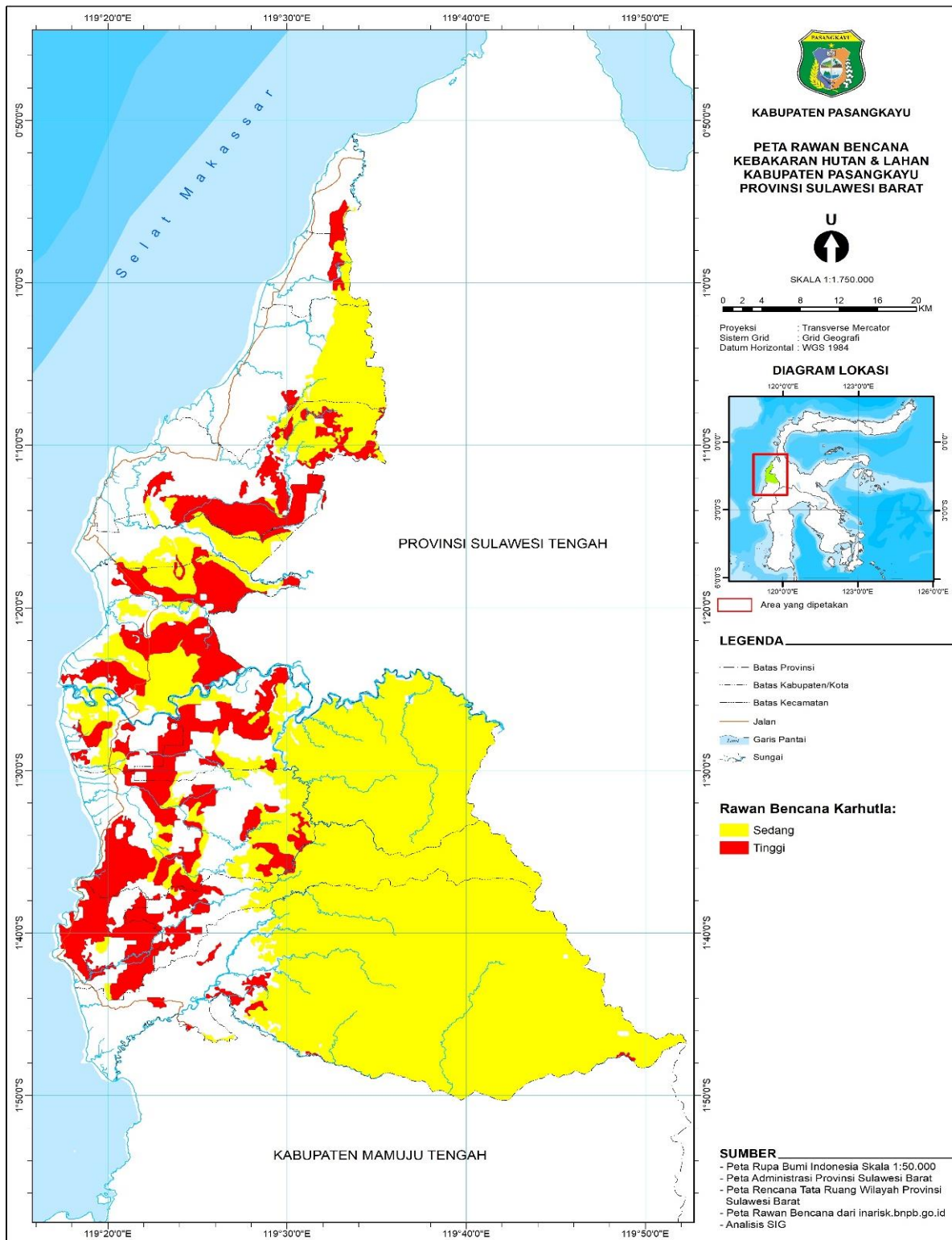


Gambar 2.12.  
Peta Rawan Bencana Gelombang Tinggi Kabupaten Pasangkayu





Gambar 2.13.  
Peta Rawan Bencana Karhutla Kabupaten Pasangkayu

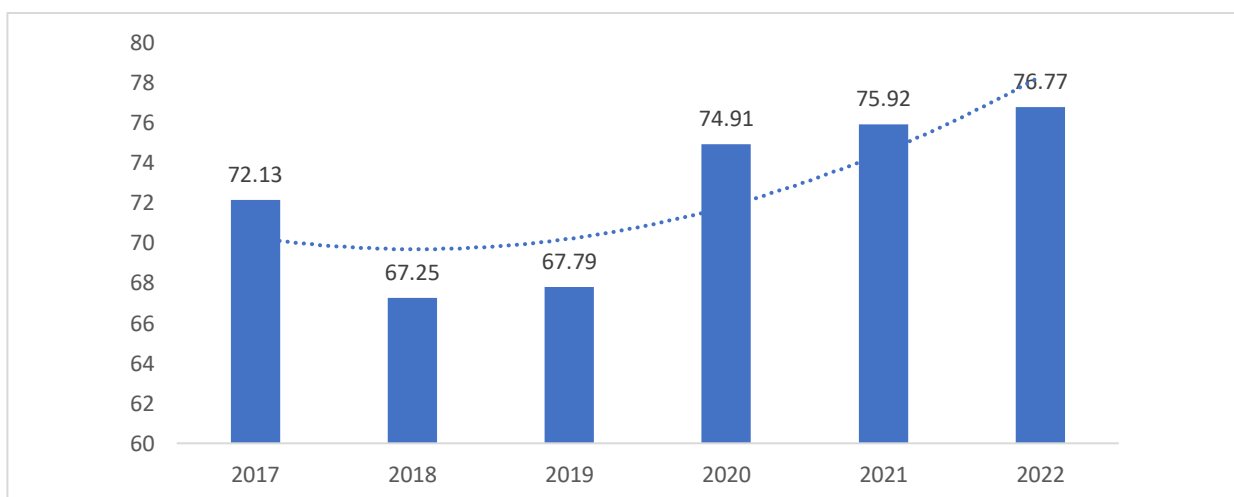




### 2.1.1.8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam menjamin kesejahteraan masyarakat serta pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Pasangkayu, ketahanan ekologi diperlukan. Sinergi dan interaksi yang kuat antara ketahanan sosial ekonomi dan ekologi dilakukan dengan pelibatan individu, masyarakat serta industri dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan baik fisik dan nonfisik secara bijaksana. Harapannya akan terwujud keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif serta lingkungan yang lestari. Komitmen Kabupaten Pasangkayu terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup masih terus terjaga. Secara tren, selama tahun 2017 hingga 2022, skor Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pasangkayu cenderung meningkat meskipun sempat menurun pada 2018 dan 2019. IKLH pada tahun 2017 mencatatkan angka 72,13, meningkat 4,64 poin menjadi 76,77 pada tahun 2022. Meskipun demikian, capaian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan dua Kabupaten lainnya yakni Mamuju (78,94) dan Mamuju Tengah (78,71).

Gambar 2.14.  
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2022

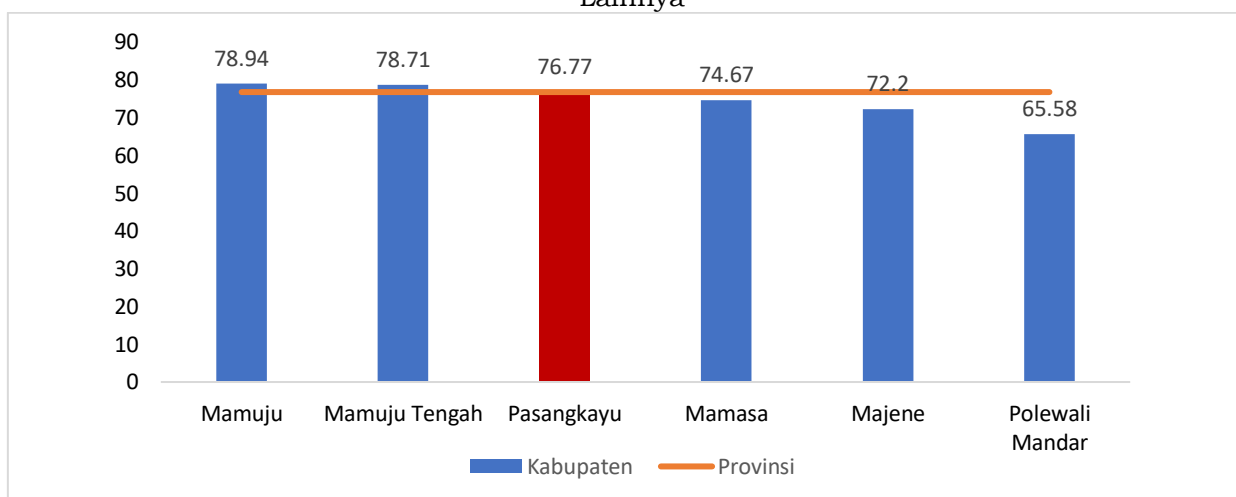


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu

Tantangan lingkungan di Kabupaten Pasangkayu adalah meningkatnya penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang kemudian menyebabkan degradasi hutan dan deforestasi. Tercermin dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) yang masih kategori sedang (65,43), lebih rendah dibandingkan dengan Mamuju (83,25), Mamuju Tengah (81,05) dan Mamasa (77,41). Selain itu, persoalan lingkungan lainnya adalah pemanfaatan sumber

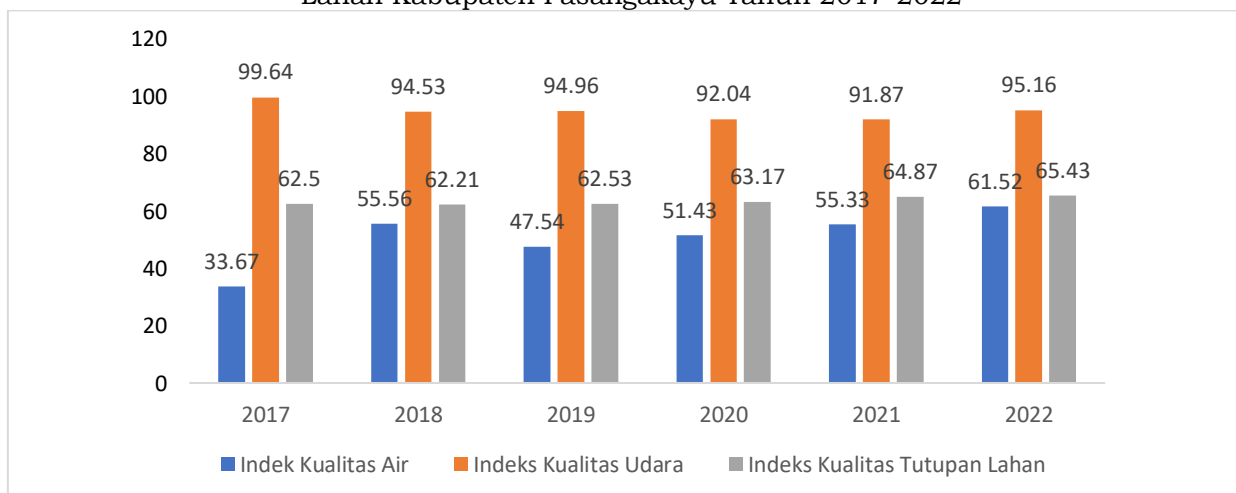
daya alam yang cenderung merusak ekosistem seperti pertambangan galian C, serta pencemaran air permukaan dan kelangkaan air. Kondisi ini terlihat dari Indeks Kualitas Air (IKA) yang masih tergolong sedang dengan angka 61,52 dan masih lebih rendah dibandingkan dengan Mamuju Tengah (63,33). Penyebab masih rendahnya kualitas air ini antara lain, eksploitasi tanah khususnya air tanah bagian dalam, berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang secara alamiah menjadi penyaring sekaligus penampung untuk air hujan, serta banyaknya limbah atau buangan industri dan rumah tangga yang polutif.

Gambar 2.15.  
Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu dengan Kabupaten Lainnya



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat

Gambar 2.16.  
Perkembangan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2022



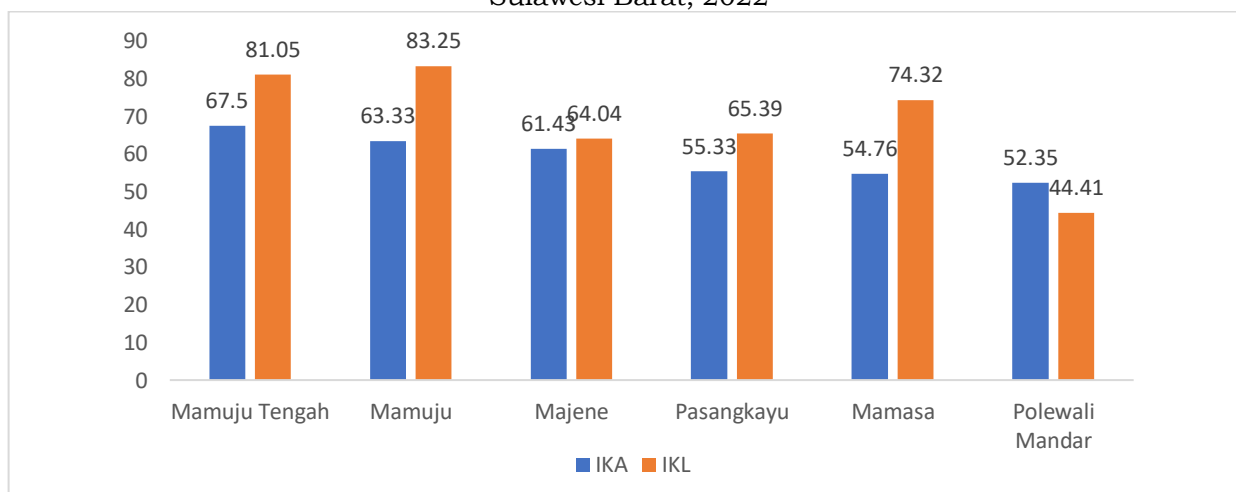
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu

Tantangan lingkungan berikutnya adalah penanganan sampah. Mengingat dari tahun 2019 hingga tahun 2022 penanganan sampah menunjukkan

perbaikan, dari 3,45 persen meningkat 12,09 persen poin menjadi 15,54 persen. Namun capaian ini masih tergolong rendah dan artinya 84,46 persen sampah yang belum ditangani dengan baik. Penyebabnya karena ekosistem pengumpulan dari bank sampah atau tempat pembuangan sampah dengan pelaku masyarakat masih belum terintegrasi dengan para pendaur ulang. Selain itu, rendahnya penanganan sampah ini dipengaruhi oleh masih kurangnya tenaga kebersihan, termasuk ketersediaan serta kelayakan armada dan kontainer sampah yang masih rendah. Pada akhirnya, sampah-sampah yang tidak tertangani dengan baik ini bisa menimbulkan persoalan seperti banjir, polusi, hingga bahkan berakhir di lautan dan mengancam ekosistem laut.

Gambar 2.17.

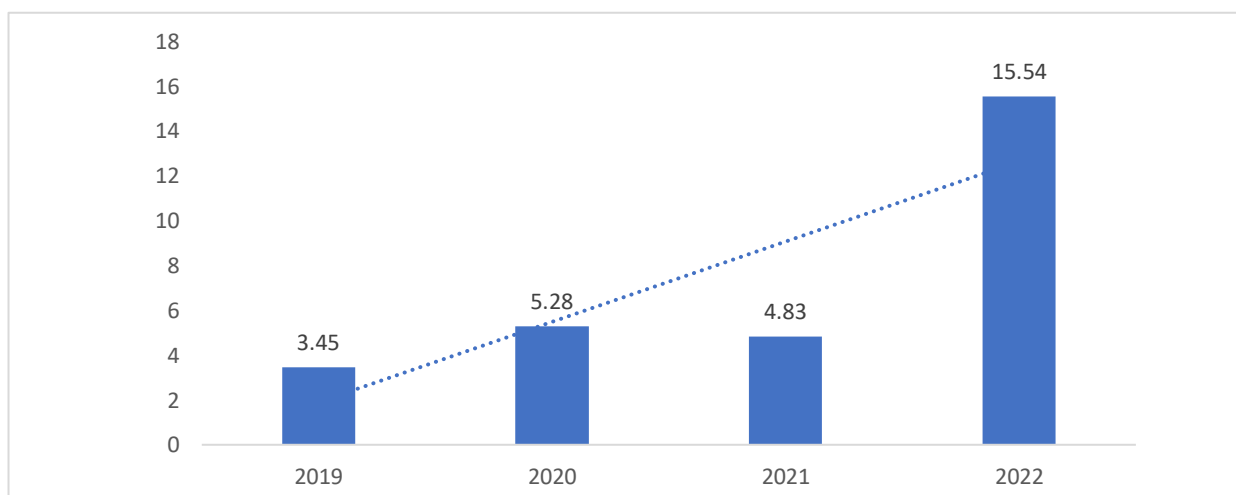
Perbandingan IKA dan IKL Kabupaten Pasangkayu dengan Kabupaten Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat, 2022



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu

Gambar 2.18.

Persentase Sampah yang Tertangani di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2022



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu

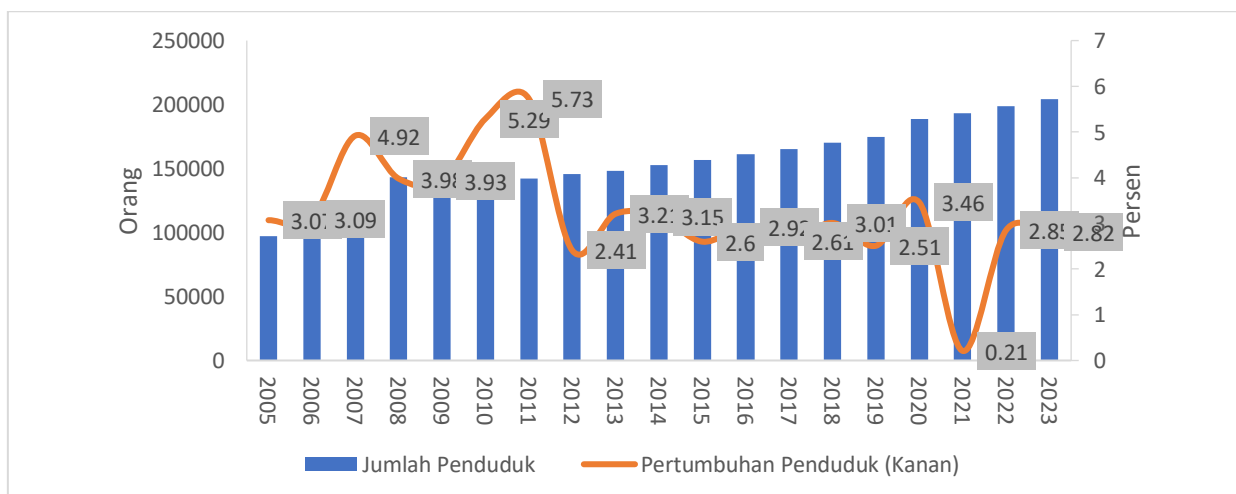
### 2.1.2. Kondisi Demografis

Kondisi jumlah penduduk di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren peningkatan, tetapi terjadi perlambatan dari sisi pertumbuhannya. Pada tahun 2005, jumlah penduduk di Kabupaten Pasangkayu sebesar 97,2 ribu orang, lalu meningkat menjadi 204,2 ribu orang pada tahun 2023. Jumlah penduduk di Kabupaten Pasangkayu berada di urutan ketiga terbanyak di Provinsi Sulawesi Barat setelah Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju, serta memiliki kontribusi sebesar 13,45 persen. Capaian ini lebih tinggi dibanding tahun 2005, dimana pada tahun itu justru Kabupaten Pasangkayu merupakan kabupaten dengan penduduk paling sedikit di Provinsi Sulawesi Barat dan hanya berkontribusi sebesar 9,7 persen. Peningkatan ini terjadi karena Kabupaten Pasangkayu menjadi tujuan migrasi penduduk, terutama yang berasal dari kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.

Secara umum, masih terjadinya tren peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Pasangkayu erat kaitannya dengan beberapa faktor, seperti penurunan tingkat kematian dan migrasi neto yang positif. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk melambat dalam beberapa tahun terakhir, bahkan sempat berada di bawah 1 persen pada tahun 2021. Perlambatan pertumbuhan penduduk merupakan kecenderungan yang umum terjadi seiring dengan penurunan tingkat kelahiran, serta mulai terjadinya migrasi keluar yang signifikan seiring dengan terbukanya peluang ekonomi di daerah lainnya, terutama peningkatan aktivitas pertambangan di Sulawesi Tengah.

Gambar 2.19.

Perkembangan Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Tahun 2005 – 2023



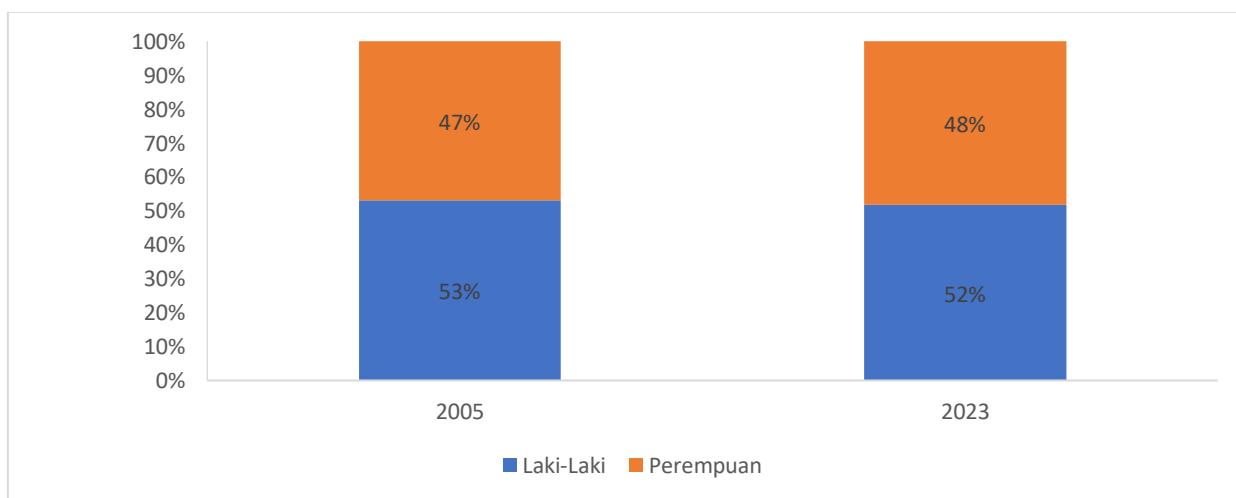
Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan jenis kelamin, tidak terjadi perubahan signifikan pada komposisi penduduk di Kabupaten Pasangkayu. Pada tahun 2005, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 113. Pada tahun 2023, penduduk laki-laki masih lebih banyak dibanding perempuan, tetapi rasio jenis kelamin menurun menjadi 108. Pertambahan jumlah penduduk laki-laki yang lebih rendah dibanding perempuan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah migrasi keluar yang umumnya dilakukan oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki. Migrasi keluar ini didorong oleh motif untuk mencari sumber-sumber penghasilan yang lebih layak di daerah lainnya.

Lebih lanjut, ditinjau dari jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia, dapat dilihat adanya perubahan komposisi penduduk, dimana kelompok usia tua (usia 65+) mengalami kenaikan dari 2 persen di tahun 2005 menjadi 3 persen di tahun 2023, sedangkan kelompok usia anak (usia <15 tahun) mengalami penurunan dari 34 persen menjadi 28 persen. Adapun kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) mengalami kenaikan 65 persen menjadi 69 persen pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pasangkayu didominasi oleh penduduk usia produktif dengan persentase yang lebih tinggi pada tahun 2023 dibanding tahun 2005. Ketersediaan penduduk usia produktif ini bisa berkontribusi pada peningkatan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

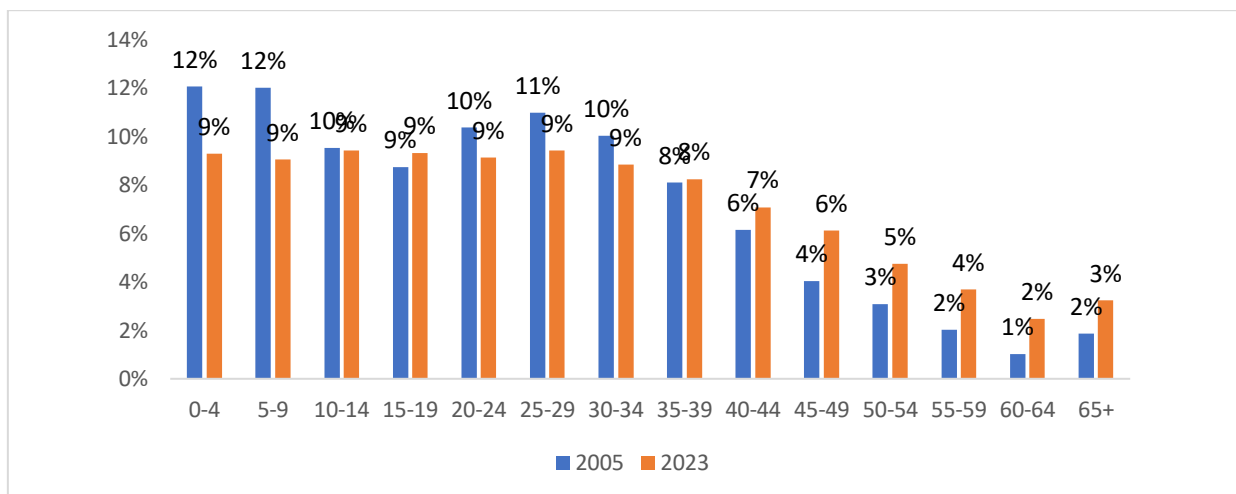
Gambar 2.20.

Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2005 dan 2023



Sumber: BPS, diolah

Gambar 2.21.  
Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2005 dan 2023

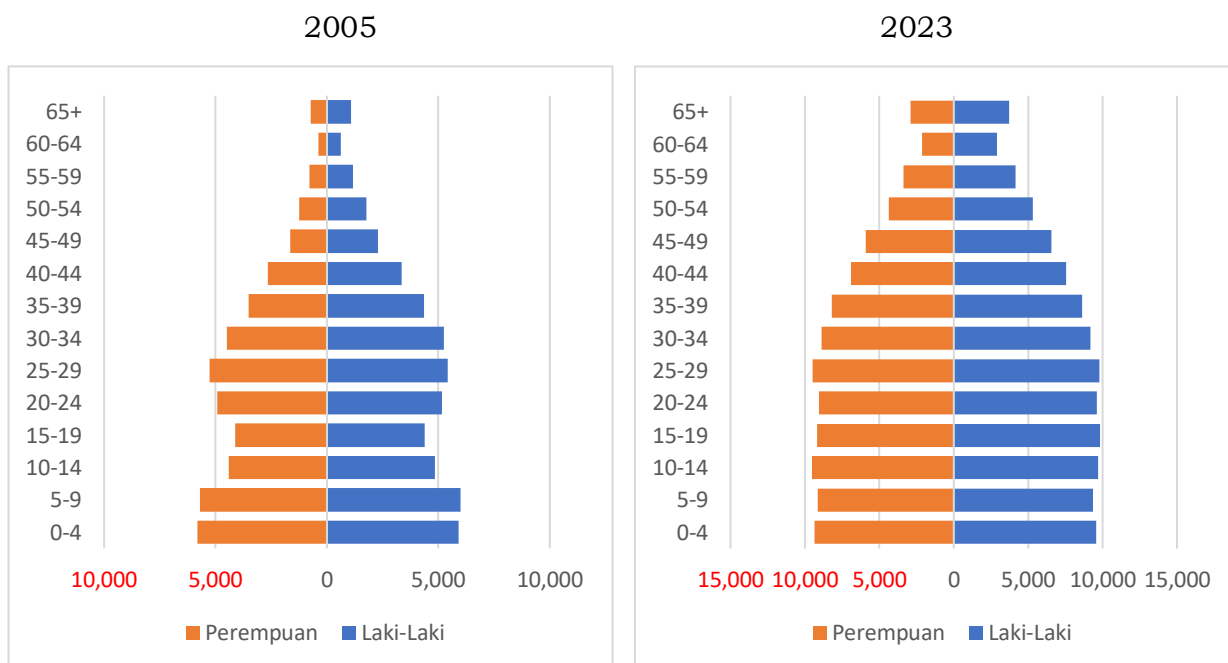


Sumber: BPS, diolah

Namun potensi ini harus didukung dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai agar sumber daya manusia dapat terserap pada aktivitas ekonomi produktif. Selain itu, pengembangan kapasitas manusia, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, juga mutlak dilakukan agar produktivitas tenaga kerja semakin meningkat.

Kondisi piramida penduduk di Kabupaten Pasangkayu antara tahun 2005 dengan tahun 2023 menunjukkan sejumlah perubahan. Komposisi penduduk antar kelompok usia lebih merata pada tahun 2023 dibanding tahun 2005. Di sisi lain, jumlah penduduk yang berusia 65 tahun ke atas mengalami peningkatan. Meskipun demikian, komposisi penduduk di usia produktif tetap paling dominan, sehingga menempatkan Kabupaten Pasangkayu di fase bonus demografi. Jika dilihat penduduk usia produktif per jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki sama dengan perempuan, yaitu masing-masing 69 persen di tahun 2023. Angka ini meningkat dari tahun 2005, yaitu laki-laki 65 persen, sedangkan perempuan 64 persen. Tren kedepan yang perlu diantisipasi adalah semakin meningkatnya komposisi penduduk usia tua, yang bukan hanya tidak produktif lagi, tapi juga membutuhkan sejumlah pelayanan publik dasar. Peningkatan proporsi penduduk usia tua ini terjadi seiring dengan semakin panjangnya usia penduduk yang tercermin pada Angka Harapan Hidup yang semakin tinggi.

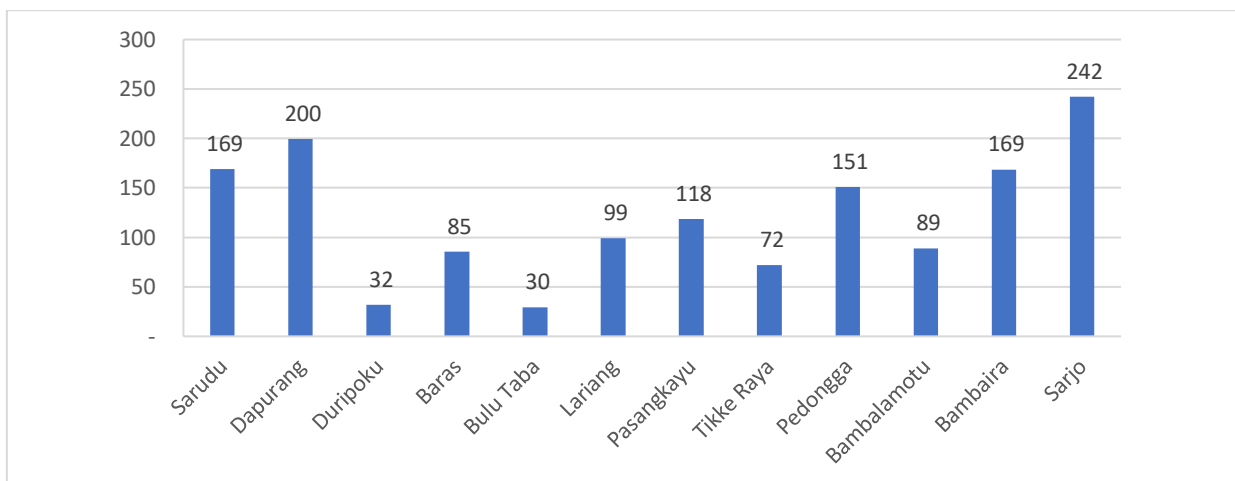
Gambar 2.22.  
Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Pasangkayu, 2005 dan 2023



Sumber: BPS, diolah

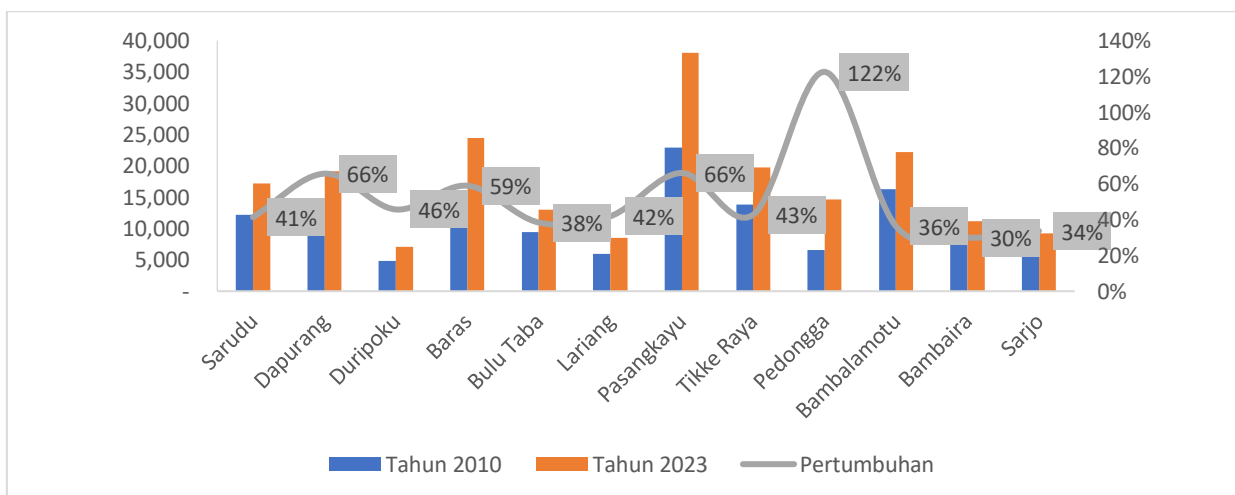
Sementara itu, jika melihat persebaran penduduk per kecamatan, maka terlihat bahwa sejumlah kecamatan dengan kategori jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2023 adalah Kecamatan Pasangkayu (38.000 orang) dan Kecamatan Bambalamotu (22.200 orang). Posisi dua kecamatan ini tidak mengalami perubahan sejak tahun 2010. Sementara itu, kecamatan dengan kategori jumlah penduduk paling sedikit pada tahun 2010 adalah Pedongga, Lariang, dan Duripoku, sedangkan pada tahun 2023 adalah Lariang, Duripoku, dan Sarjo. Terlihat bahwa tidak terjadi perubahan signifikan pada sebaran penduduk per kecamatan. Namun jika melihat pertumbuhan penduduk setiap kecamatan antara 2010 ke 2023, maka kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Pedongga (122%), sedangkan pertumbuhan terendah terjadi di Kecamatan Bambaira (30%). Sementara itu, kepadatan penduduk paling tinggi terdapat di Kecamatan Sarjo, yaitu 242 orang/km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan yang kepadatan penduduknya paling rendah adalah Bulu Taba, yaitu hanya 30 orang/km<sup>2</sup>. Salah satu faktor yang menentukan kepadatan penduduk adalah luas wilayah dari masing-masing kecamatan, dimana Sarjo memiliki wilayah paling kecil, sedangkan Bulu Taba memiliki wilayah paling luas. Pertumbuhan penduduk per kecamatan ini juga dapat mencerminkan kemajuan ekonomi di setiap kecamatan bervariasi antara satu dengan yang lainnya.

Gambar 2.23.  
Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2023



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

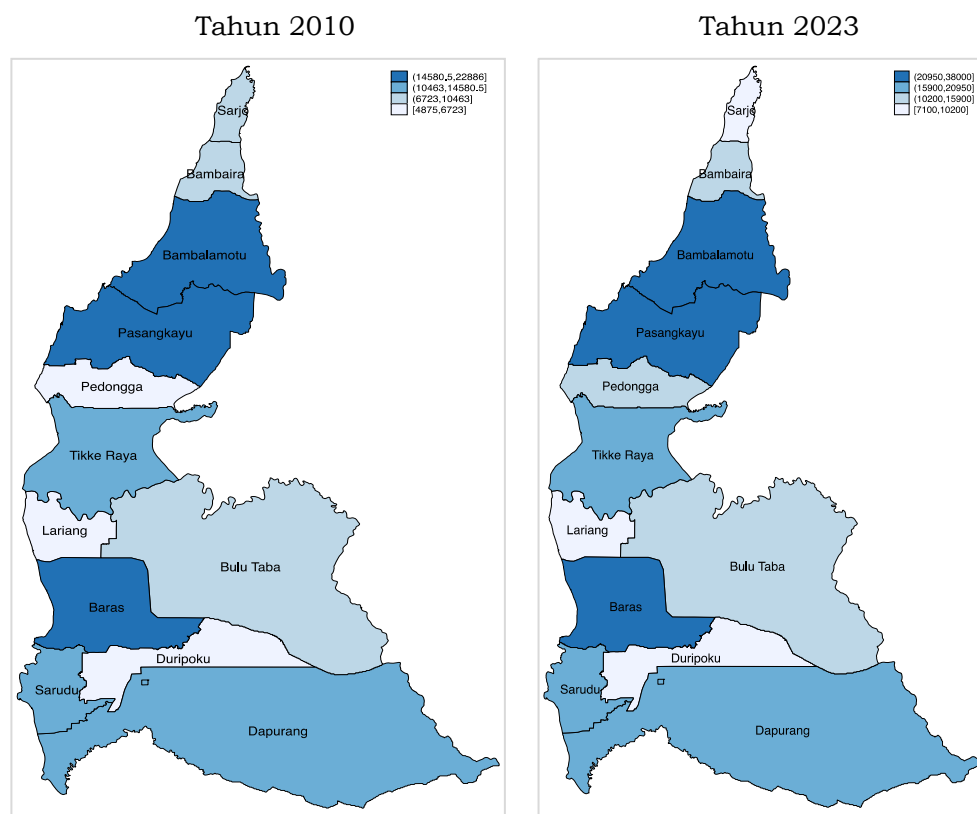
Gambar 2.24.  
Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan Tahun 2010 dan 2023



Sumber: BPS, diolah



Gambar 2.25.  
Sebaran Penduduk per Kecamatan Tahun 2010 dan 2023



Sumber: BPS, diolah

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

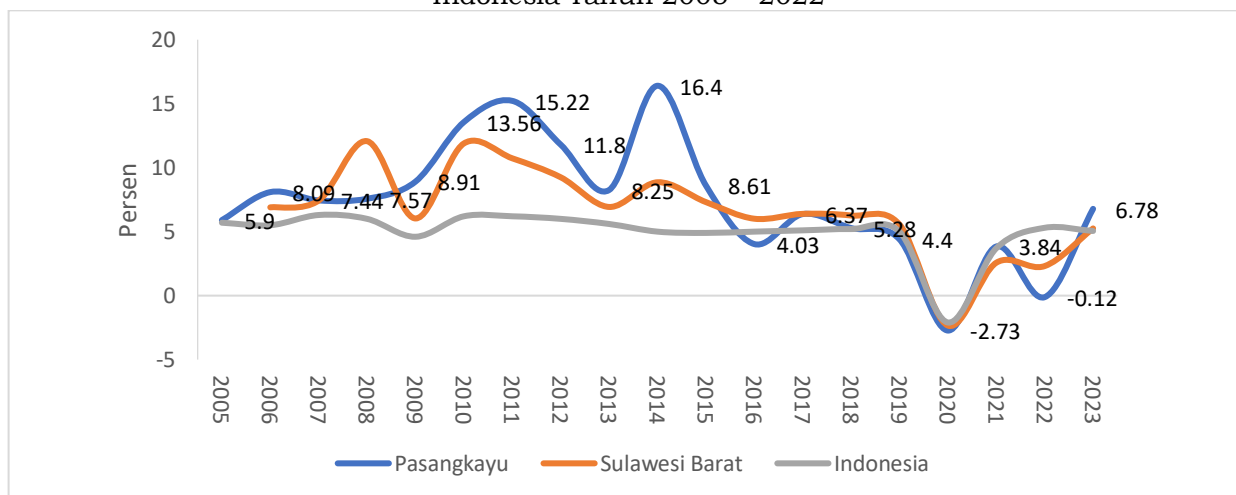
#### 2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Indikator pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur kecepatan perubahan nilai PDRB di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan peningkatan yang cepat pada nilai PDRB riil, sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang rendah atau negatif menunjukkan perlambatan atau penurunan pada nilai PDRB riil. Data statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu mengalami tren fluktuatif. Namun secara umum, terjadi tren penurunan dalam 10 tahun terakhir. Bahkan, pertumbuhan ekonomi telah menurun sebelum terjadinya pandemi COVID-19, hingga mencapai pertumbuhan terendah dalam 18 tahun terakhir, yaitu minus 2,73 persen di tahun 2020. Meskipun sempat meningkat dan kembali positif di tahun 2021 menjadi 3,84 persen, tetapi pertumbuhan kembali menurun menjadi minus 0,12 persen di tahun 2022. Namun pada tahun 2023, terjadi percepatan

pertumbuhan menjadi 6,78 persen, yang terutama ditopang oleh pertumbuhan di sektor industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, dan penyediaan akomodasi dan makan minum.

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat dan Indonesia, kinerja perekonomian Kabupaten Pasangkayu tergolong tinggi selama periode 2009 – 2015, dimana capaian pertumbuhannya melampaui Provinsi Sulawesi Barat dan Indonesia. Namun, perlambatan menjadikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu selevel dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Indonesia di periode berikutnya. Oleh karena itu, meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan di Kabupaten Pasangkayu, kondisi ini masih sejalan dengan tren perlambatan pertumbuhan yang terjadi di tingkat provinsi dan nasional. Adapun peningkatan pertumbuhan yang terjadi di tahun 2021, terjadi di hampir semua daerah karena didorong oleh faktor *base effects*, yaitu relatif rendahnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 karena pengaruh pandemi COVID-19.

Gambar 2.26.  
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2005 – 2022

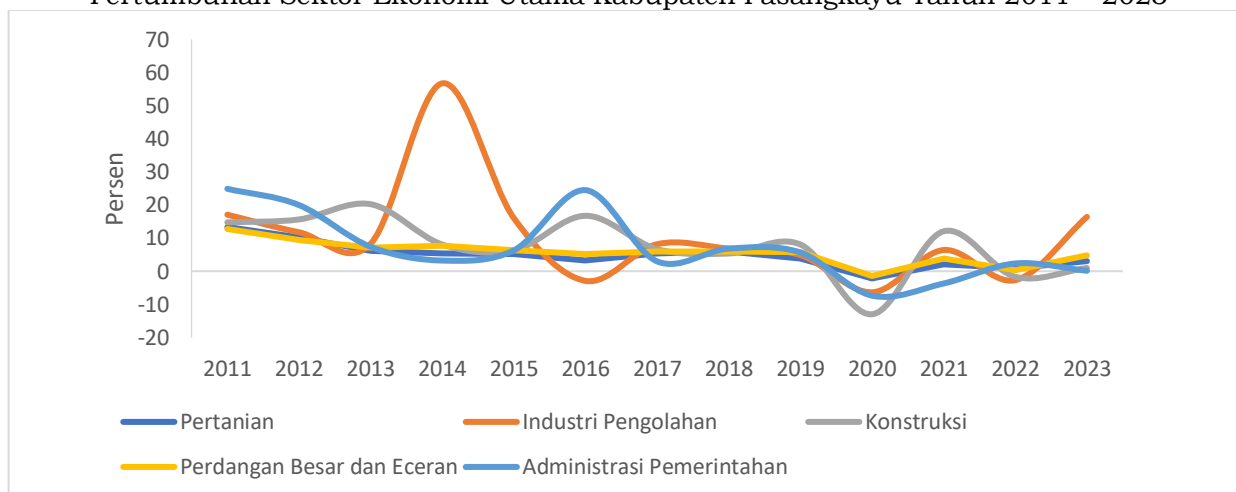


Sumber: BPS, diolah

Pertumbuhan ekonomi sektoral juga menunjukkan adanya tren penurunan pada sektor ekonomi yang menjadi penopang utama Kabupaten Pasangkayu. Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami perlambatan dari rata-rata 7,23 persen selama 2011 – 2016 menjadi 2,75 persen selama 2017 – 2023. Pada periode yang sama, sektor lain seperti industri pengolahan turun dari rata-rata 17,8 persen menjadi 4,80 persen, konstruksi turun dari 13,6 persen menjadi 2,63 persen, perdagangan besar dan

eceran turun dari 8,1 persen menjadi 3,61 persen, serta administrasi pemerintahan turun dari 14,4 persen menjadi 0,98 persen. Namun penurunan pertumbuhan sektoral ini juga dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020. Dari kelima sektor utama, tiga sektor yang pertumbuhannya terdampak negatif secara signifikan yaitu konstruksi (-13,0%), industri pengolahan (-6,3%), dan administrasi pemerintahan (-7,4%), sedangkan dua sektor lainnya, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (-2,2%) dan sektor perdagangan besar dan eceran (-1,4%) terdampak negatif secara moderat. Lebih lanjut, terjadi pertumbuhan sektor industri pengolahan yang cukup signifikan di tahun 2023, yaitu tumbuh sebesar 16,40 persen, setelah tahun sebelumnya hanya tumbuh -2,69 persen. Peningkatan ini terutama didorong oleh meningkatnya investasi di sektor industri pengolahan.

Gambar 2.27.  
Pertumbuhan Sektor Ekonomi Utama Kabupaten Pasangkayu Tahun 2011 – 2023



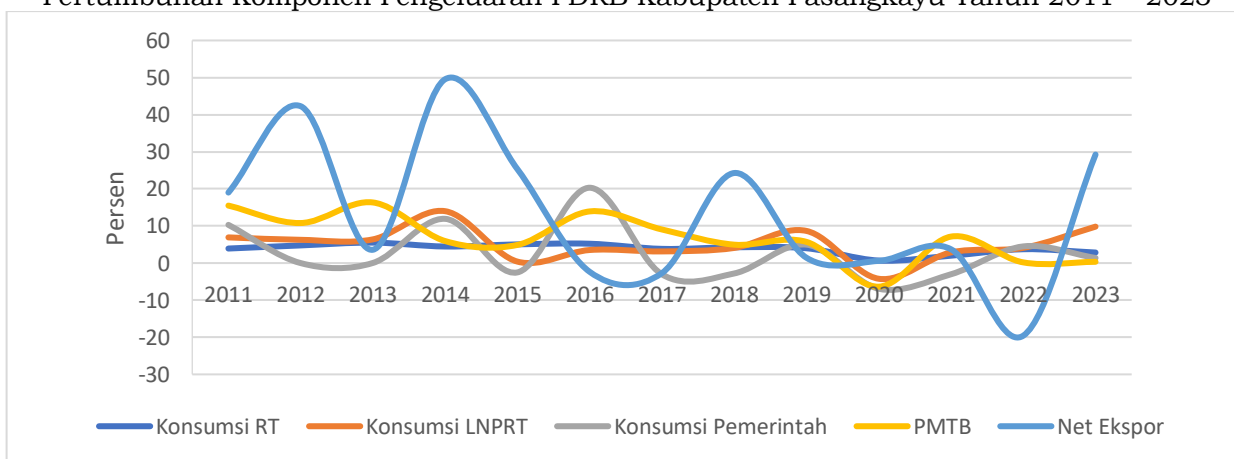
Sumber: BPS, diolah

Ditinjau dari pertumbuhan komponen pengeluaran, meskipun *net* ekspor berkontribusi dominan pada PDRB, pertumbuhan komponen *net* ekspor terbilang sangat fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik net ekspor yang dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu nilai ekspor dan nilai impor. Oleh karena itu, perubahan salah satu dari komponen net ekspor tersebut juga akan berpengaruh terhadap selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor. Lebih lanjut, salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perubahan ekspor dan impor adalah fluktuasi harga. Umumnya harga internasional mudah dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya gejolak ekonomi global, gangguan keamanan, hambatan perdagangan, dan gangguan distribusi. Hal ini bisa

berdampak pada naik turunnya harga, dan pada akhirnya akan mempengaruhi besar kecilnya transaksi produk ekspor dan impor. Pada tahun 2022 misalnya, *net* ekspor Kabupaten Pasangkayu mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 19,56 persen, karena pengaruh larangan ekspor CPO selama beberapa bulan di awal tahun 2022. Tetapi pada tahun 2023, *net* ekspor kembali tumbuh positif 29,25 persen setelah kegiatan perdagangan CPO kembali normal.

Di antara komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga tergolong stabil, tetapi sedikit menurun dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan pada tahun 2020, konsumsi rumah tangga tetap tumbuh positif di angka 0,68 persen, sedangkan komponen lainnya tumbuh negatif, seperti konsumsi Lembaga Non Pemerintah yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) tumbuh minus 4,23 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh minus 6,36 persen, konsumsi pemerintah tumbuh minus 6,92 persen. Hanya komponen *net* ekspor yang juga tetap tumbuh positif saat terjadi pandemi, yaitu sebesar 0,59 persen. Hingga tahun 2023, pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat menjadi 2,84 persen, tetapi angka ini masih relatif rendah dibanding rata-rata pertumbuhan selama tahun 2011 – 2019 sebesar 4,55 persen.

Gambar 2.28.  
Pertumbuhan Komponen Pengeluaran PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2011 – 2023



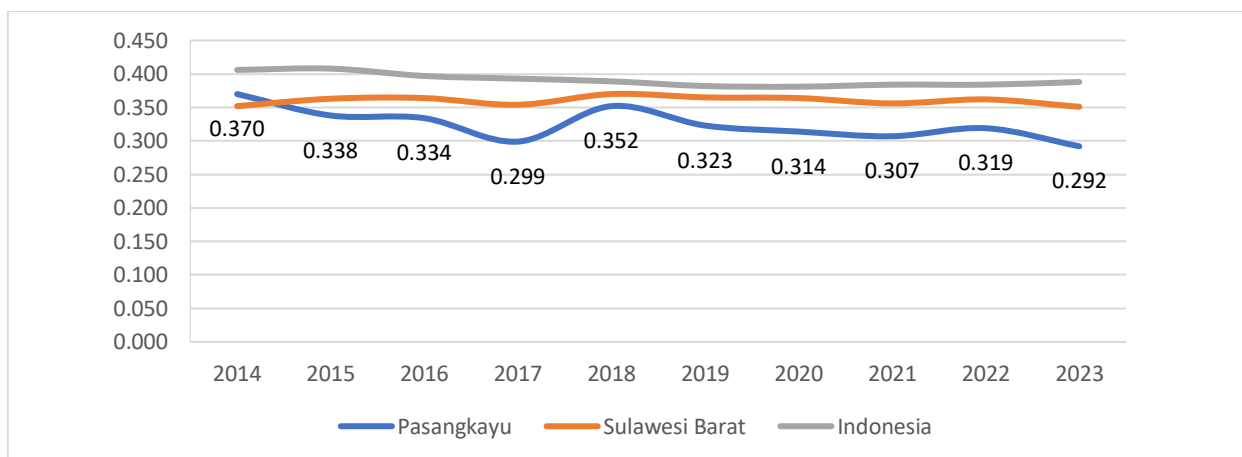
Sumber: BPS, diolah

#### 2.2.1.2. Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Rasio Gini)

Sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, upaya perlu dilakukan untuk mengatasi ketimpangan antar kelompok pendapatan. Indikator yang umum digunakan adalah rasio gini. Data menunjukkan, rasio gini Kabupaten Pasangkayu tahun 2014 – 2023 menunjukkan tren penurunan.

Meskipun sempat meningkat di tahun 2018, yaitu sebesar 0,352, tetapi menurun menjadi 0,292 di tahun 2023. Level ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pasangkayu tergolong rendah, sebab berada di bawah angka 0,3. Hal ini mengindikasikan terjadi perbaikan kesejahteraan pada kelompok menengah ke bawah, sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Sementara itu, bila dibandingkan dengan capaian rasio gini di Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, kinerja Kabupaten Pasangkayu juga tergolong lebih baik, sebab sejak tahun 2015 hingga tahun 2023, capaiannya selalu lebih rendah. Artinya, pendapatan penduduk di Kabupaten Pasangkayu secara umum relatif lebih merata dibanding rata-rata Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional.

Gambar 2.29.  
Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2014 – 2023



Sumber: BPS, diolah

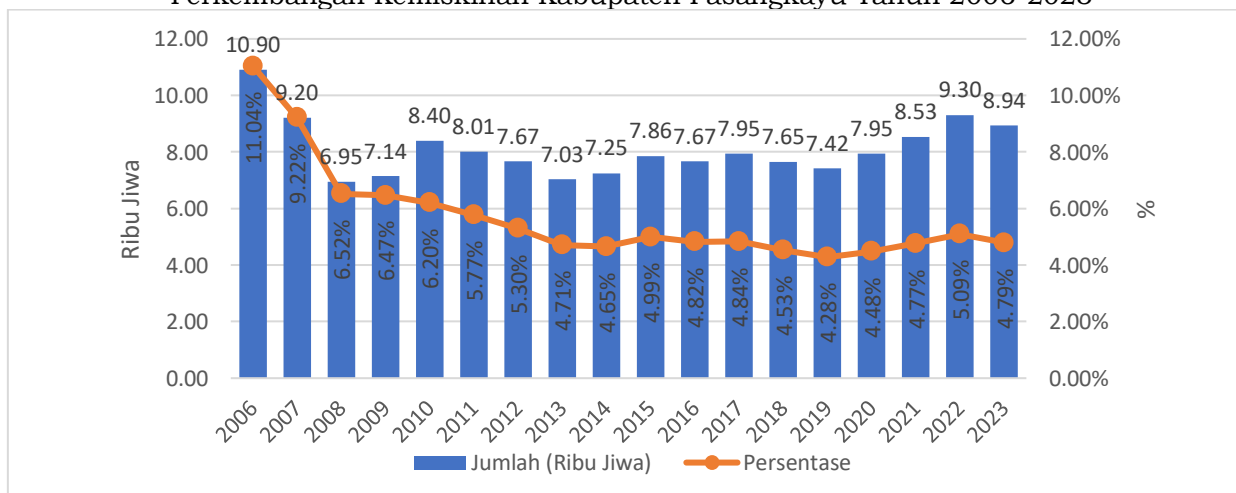
### 2.2.1.3. Angka Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah Pembangunan daerah yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Selain karena amanat UUD 1945 Pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, kemiskinan juga masih menjadi masalah Pembangunan daerah di Kabupaten Pasangkayu. Secara nasional, kemiskinan masih dianggap sebagai salah satu masalah utama yang perlu diselesaikan jika Indonesia ingin mencapai visi

Indonesia Emas 2045. Itu sebabnya, tahun 2022, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai dasar hukum bagi semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Dalam 21 tahun terakhir, Kabupaten Pasangkayu telah mencatat kinerja positif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Data BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat, persentase Penduduk miskin (P0) Kabupaten Pasangkayu sudah satu digit sejak tahun 2007, begitupun dengan jumlah Penduduk miskinnya. Tahun 2006, nilai P0 Kabupaten Pasangkayu masih diangka 11,04 persen, sementara jumlah penduduk miskin mencapai 10,90 ribu jiwa. Dua tahun berselang, P0 dan jumlahnya turun tajam dari 9,22 persen ke 6,52 persen, kemudian dari 9,20 ribu jiwa menjadi 6,95 ribu jiwa. Penurunan P0 terus berlanjut hingga tahun 2022 tersisa 5,09 persen penduduk Kabupaten Pasangkayu yang miskin dengan jumlah 9,30 ribu jiwa dan turun lagi di tahun 2023 menjadi 4,79 persen. Persentase penduduk miskin yang menurun memposisikan Kabupaten Pasangkayu sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan paling rendah di Provinsi Sulawesi Barat. Tren penurunan P0 adalah catatan positif yang perlu dipertahankan pemerintah daerah. Namun pemerintah daerah juga mesti waspada karena parameter pertumbuhan jumlah penduduk miskin tidak sejalan dengan tren nilai P0, sehingga perlu ditangani secara serius dalam jangka panjang.

Gambar 2.30.  
Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2006-2023

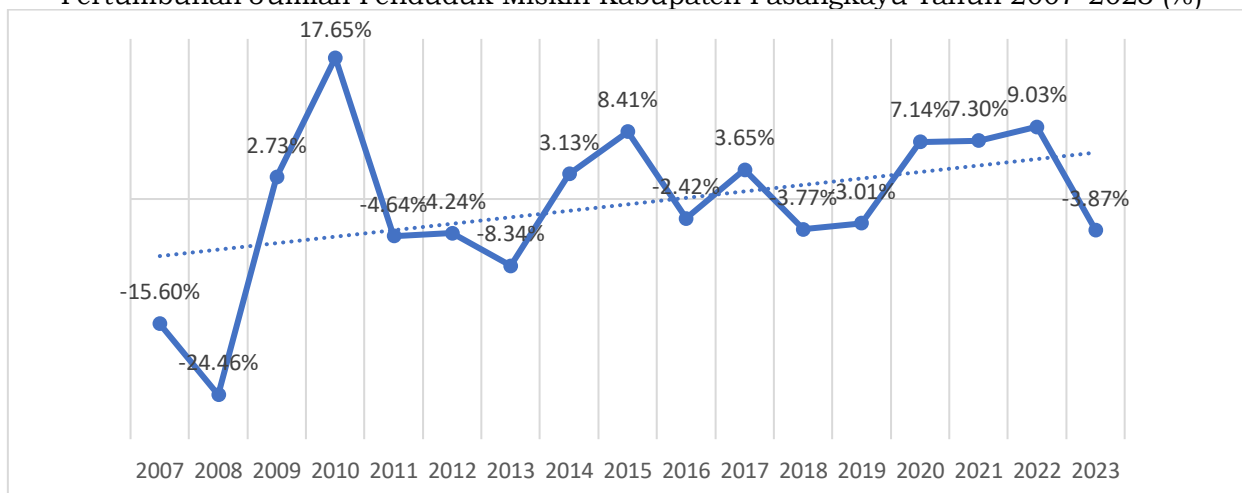


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat

Berbanding terbalik dengan tren P0, pertumbuhan jumlah penduduk miskin Kabupaten Pasangkayu menunjukkan kecenderungan naik dalam 16 tahun terakhir. Setelah turun 15,60 persen tahun 2007 dan 24,46 persen tahun 2008, kemudian di tahun 2009 dan 2010 jumlah penduduk miskin bertambah masing-masing 2,73 persen dan 17,65 persen, tertinggi selama kurun waktu 16 tahun terakhir. Beberapa tahun kemudian, pertumbuhan jumlah penduduk miskin menurun di beberapa tahun tertentu, tapi penurunannya tidak sebanding dengan kenaikannya, sehingga menyebabkan tren pertumbuhannya cenderung naik. Tiga tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kabupaten Pasangkayu bertambah 7,14 persen tahun 2020, kemudian 7,30 persen tahun 2021, dan tahun 2022 mencapai 9,03 persen.

Kecenderungan tren kenaikan pertumbuhan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasangkayu disebabkan oleh kenaikan garis kemiskinan yang tidak sejalan dengan kenaikan pendapatan rata-rata penduduk. Dari tahun 2006 hingga 2023, garis kemiskinan Kabupaten Pasangkayu naik 162,51 persen, yang di tahun 2006 hanya Rp 164.668 per bulan per kapita menjadi Rp 432.269 per bulan per kapita tahun 2023, sementara daya beli yang diukur dengan pengeluaran per kapita riil disesuaikan hanya tumbuh 33,59 persen dari Rp 8,48 juta ke Rp 11,33 juta. Hal itu disebabkan oleh upah yang diterima pekerja, terutama pekerja formal cenderung subsisten, sehingga jika terjadi guncangan seperti inflasi harga makanan, maka pengeluaran mereka dengan mudah terjerembab di bawah garis kemiskinan.

Gambar 2.31.  
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pasangkayu Tahun 2007-2023 (%)



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, diolah



Selain masalah upah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu yang melambat dalam satu dekade terakhir juga menjadi salah satu penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasangkayu. Berbagai hasil penelitian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan signifikansi negatif, dimana semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin rendah tingkat kemiskinan, begitupun sebaliknya.

Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu sangat lambat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu pernah mencapai 16,40 persen tahun 2014, merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah perekonomian Kabupaten Pasangkayu. Setelah mencapai angka tertinggi, tahun-tahun selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu mengalami kesulitan untuk konsisten, bahkan di tahun 2022, dua tahun setelah pandemi Covid-19 angkanya masih berkontraksi di level -0,08 persen dan tumbuh positif di tahun 2023 sebesar 6,78 persen.

Sektor pertanian menopang sebagian besar aktivitas ekonomi Kabupaten Pasangkayu, khususnya pada komoditas kelapa sawit. Sektor pertanian dalam studi Asep Suryahadi, Gracia Hadiwidjaja, dan Sudarno Sumarto (2012) masih menjadi andalan wilayah pedesaan untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, pelambatan pertumbuhan dalam satu dekade terakhir juga sekaligus menjadi sinyal bahwa ada masalah pada komoditas kelapa sawit Kabupaten Pasangkayu yang mayoritas di tanam di wilayah pedesaan. Ketergantungan ekonomi Kabupaten Pasangkayu terhadap kelapa sawit bisa menjadi masalah di masa depan, terutama jika dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan, sebab kelapa sawit sebagai komoditas ekspor sangat rentan terhadap *shock*, baik itu yang bersumber dari luar negeri atau dari negeri seperti kebijakan pemerintah yang pernah melarang ekspor kelapa sawit pada April 2022 yang berdampak pada anjloknya harga tandan buah segar (TBS), sehingga membuat petani kelapa sawit di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pasangkayu mengalami kerugian besar. Persoalannya, di tengah kerugian tersebut, mereka tidak bisa mendiversifikasi sumber pendapatan karena sebagian besar lahan sudah dialih fungsikan ke tanaman kelapa sawit. Itu sebabnya tantangan pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang adalah mendiversifikasi sumber



pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu, sehingga lebih tahan terhadap guncangan dan bisa berkelanjutan.

Diversifikasi sumber pertumbuhan dapat dimulai dengan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Hasil studi Nursini (2020) menemukan bahwa UMKM secara statistik mempengaruhi pengentasan kemiskinan di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, skala bisnis yang berbeda memberikan implikasi yang beragam terhadap pengurangan kemiskinan. Usaha kecil berperan lebih besar dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan usaha menengah, karena mereka mengurangi bukan hanya persentase penduduk miskin tetapi juga indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

Hasil pemetaan potensi UMKM di Provinsi Sulawesi Barat oleh BPS menemukan ada 16.469 UMKM di Kabupaten Pasangkayu atau setara dengan 12,17 persen dari total UMKM di Provinsi Sulawesi Barat dengan kinerja keuangan yang cukup positif diukur dengan rasio pengeluaran terhadap pendapatan yang hanya 0,55. Itu artinya jika UMKM di Kabupaten Pasangkayu menghasilkan Rp 100 pendapatan, Rp 55 adalah biaya yang harus dikeluarkan.

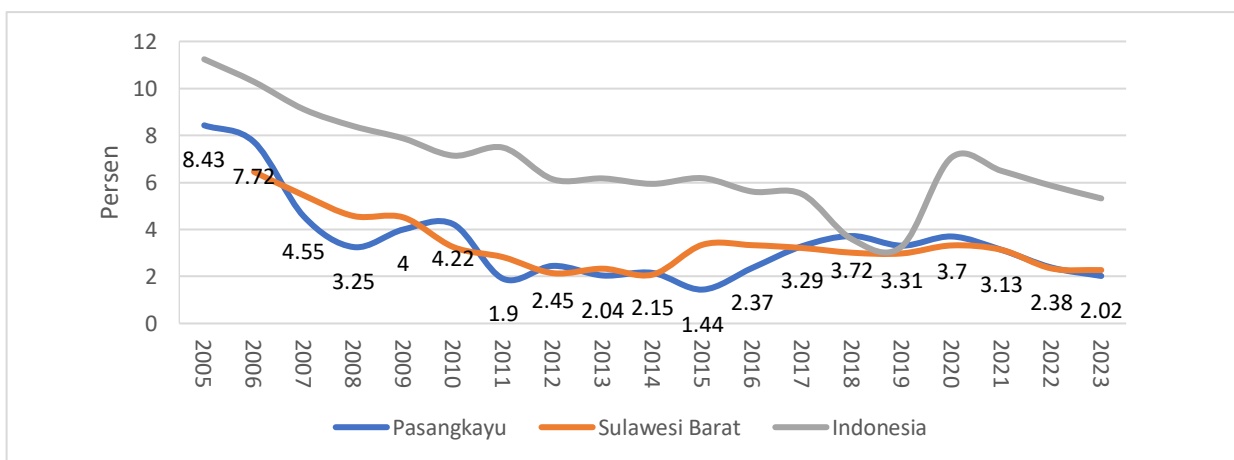
#### **2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Pengangguran mengukur banyaknya penduduk produktif yang bersedia bekerja, tetapi tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Semakin banyak orang menganggur menunjukkan semakin tidak seimbangnya antara jumlah penduduk yang bersedia bekerja dengan kesempatan kerja yang tersedia. Ketersediaan kesempatan kerja erat kaitannya dengan kondisi ekonomi makro di suatu wilayah, terutama pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur seberapa besar persentase penduduk yang menganggur terhadap total angkatan kerja, digunakan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Perekonomian Kabupaten Pasangkayu juga ditandai dengan penurunan TPT dalam beberapa tahun terakhir, terutama terjadi pada periode 2005 - 2015. Penurunan TPT ini sejalan dengan percepatan pertumbuhan ekonomi selama periode yang sama. Meskipun demikian, TPT kembali meningkat di tahun 2016 dan mencapai puncaknya di tahun 2017, yaitu sebesar 3,29 persen. Pada periode ini, pertumbuhan ekonomi memang mengalami perlambatan hingga mencapai 4,03 persen di tahun 2016, setelah sebelumnya tumbuh hingga

mencapai 16,4 persen di tahun 2014. Sementara itu, TPT kembali meningkat dari 3,31 persen di tahun 2019 menjadi 3,70 persen di tahun 2020 seiring dengan terjadinya pandemi. Kenaikan TPT ini tergolong rendah karena sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja dominan, tidak begitu terdampak oleh pandemi COVID-19. Namun sejak tahun 2021, TPT Kabupaten Pasangkayu terus menurun hingga menjadi 2,02 persen di tahun 2023.

Gambar 2.32.  
Perkembangan TPT Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, dan Indonesia 2005 – 2023



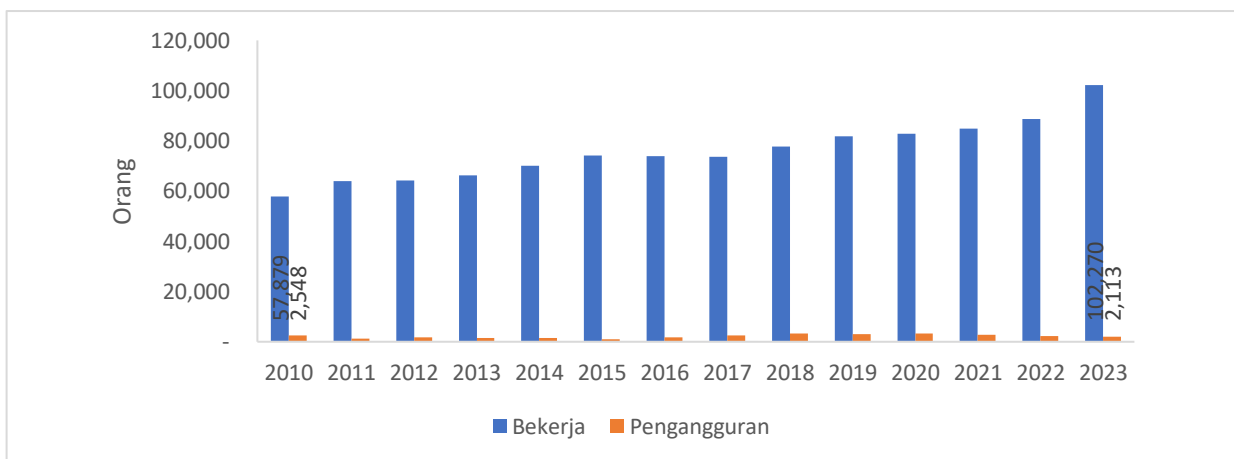
Sumber: BPS, diolah

Lebih lanjut, TPT di Kabupaten Pasangkayu tergolong lebih rendah dibanding TPT di tingkat nasional selama hampir 20 tahun terakhir, kecuali pada tahun 2018 dan 2019 yang cenderung sama. Namun sejak pandemi COVID-19 terjadi, TPT di tingkat nasional melonjak hingga menjadi 7,07 persen di tahun 2020, setelah sebelumnya hanya mencapai 3,28 persen di tahun 2019. Meskipun TPT Kabupaten Pasangkayu dan Sulawesi Barat meningkat sejak pandemi, tetapi besarnya masih lebih rendah dibanding nasional. Pasalnya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang merupakan sektor yang berkontribusi paling besar dalam penyerapan tenaga kerja, baik di kabupaten maupun provinsi, tidak terlalu terdampak oleh pandemi COVID-19. Berbeda dengan perekonomian di tingkat nasional, yang penyerapan tenaga kerja juga dominan di sektor industri pengolahan dan perdagangan, sementara kedua sektor ini sangat terdampak negatif oleh pandemi COVID-19.

Secara absolut, dari 60.427 orang angkatan kerja di tahun 2010, sebanyak 57.879 orang diantaranya atau 95,81 persen memiliki pekerjaan,

sedangkan 2.548 orang berstatus pengangguran. Angka ini meningkat dibanding tahun 2023, dimana jumlah penduduk bekerja sebanyak 102.270 orang dari 104.383 orang angkatan kerja, sedangkan yang menganggur mengalami penurunan menjadi 2.133 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah pengangguran di Kabupaten Pasangkayu sebagaimana penurunan yang juga terjadi pada indikator TPT.

Gambar 2.33.  
Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dan Tidak Bekerja Tahun 2010 – 2023



Sumber: BPS, diolah

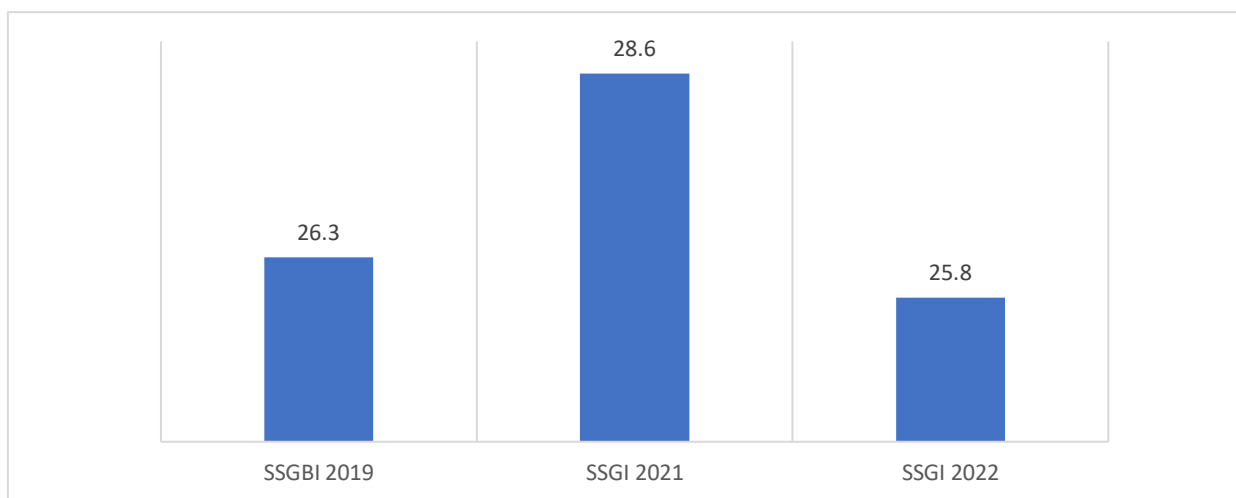
#### 2.2.1.5. Prevalensi Stunting

*Stunting* merupakan salah satu isu kesehatan yang menjadi prioritas pembangunan nasional dan dimasukkan dalam RPJPN 2025-2045. Percepatan penurunan *stunting* dimasukkan sebagai salah satu *game changer* yang bisa mempengaruhi transformasi sosial. Selain itu, *stunting* dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat menyebabkan gagalnya pemerintah dalam memanfaatkan bonus demografi karena akan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Dimasukkannya isu *stunting* secara tidak langsung mengharuskan semua pemerintah daerah juga perlu memberikan perhatian serius terhadap isu tersebut, termasuk pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

*Stunting* di Kabupaten Pasangkayu masih menjadi permasalahan pembangunan daerah hingga di penghujung RPJPD Tahun 2005-2025. Pemerintah daerah bahkan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam

penanganan *stunting*. Semua upaya pemerintah daerah perlahan menunjukkan kinerja positif. Menurut hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, tercatat prevalensi *stunting* di Kabupaten Pasangkayu mencapai 26,3 persen, yang berarti bahwa ada 26 orang dari 100 anak usia 0-59 bulan (Balita) yang mengalami *stunting*. Tahun 2021, saat pemerintah melakukan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi *stunting* di Kabupaten Pasangkayu naik signifikan hingga 28,6 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan angka Nasional yang mencapai 24,4 persen. Kinerja positif pemerintah daerah mulai terlihat di tahun 2022 yang ditunjukkan dengan penurunan prevalensi *stunting* hingga ke level 25,8 persen. Angka ini lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Barat yang mencapai 35 persen, namun masih relatif lebih tinggi dari angka Nasional yang menunjukkan tren penurunan signifikan hingga prevalensi *stunting* hanya 21,6 persen.

Gambar 2.34.  
Prevalensi Stunting di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2022 (%)



Sumber: Kementerian Kesehatan

Meski mengalami penurunan signifikan, tapi prevalensi *stunting* 25,8 persen secara absolut masih relatif tinggi dan dibandingkan Nasional juga masih cukup tinggi. Tantangannya ada di intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*, sementara intervensi sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*. Pemerintah daerah lebih menekankan pada intervensi spesifik dan cenderung mengabaikan intervensi sensitif.

## **2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya**

### **2.2.2.1. Indeks Keluarga Sehat**

Menurut World Health Organization (WHO), keluarga sehat merupakan keluarga dengan kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual yang optimal. Untuk mengukur capaian keluarga sehat, Kementerian Kesehatan menyusun Indeks Keluarga Sehat (IKS). Terdapat 12 indikator yang membentuk IKS, yang terbagi ke dalam beberapa aspek, yaitu kesehatan fisik, kesehatan mental, sosial, dan lingkungan. Adapun 12 indikator keluar sehat mencakup: 1). keluarga mengikuti program KB, 2). ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, 3). bayi mendapat imunisasi dasar yang lengkap, 4). bayi mendapat ASI eksklusif, 5). balita mendapat pemantauan pertumbuhan, 6). penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar, 7). penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan, 8). penderita gangguan jiwa tidak terlantar dan mendapat pengobatan, 9). anggota keluarga tidak ada yang merokok, 10). keluarga merupakan anggota Jaminan Kesehatan Nasional, 11). keluarga memiliki akses ke sarana air bersih, 12). keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih. Namun, data Indeks Keluarga Sehat belum tersedia di level kabupaten/kota.

### **2.2.2.2. Indeks Kualitas Keluarga**

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Unit keluarga menjadi unit pengukuran keluarga yang menjadi landasan kualitas ketahanan sosial masyarakat dan menjadi pilar penyangga pembangunan suatu bangsa. Sementara itu, keluarga yang berkualitas merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Indeks Kualitas Keluarga dibentuk untuk mengukur capaian kualitas keluarga. Terdapat lima dimensi dan 25 indikator yang membentuk IKK, yaitu:

- Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS), terdiri dari dua indikator, yaitu memiliki akta kelahiran dan keluarga tinggal bersama.

- Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF), terdiri dari enam indikator, yaitu makan makanan sehat dan bergizi untuk keluarga, keluhan kesehatan keluarga, prevalensi kurang gizi anggota keluarga, ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak, anak merokok, dan anggota keluarga sakit hingga terganggu.
- Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE) terdiri atas enam indikator, yaitu memiliki rumah, tidak miskin, memiliki rekening tabungan, memiliki asuransi kesehatan, anak tidak putus sekolah, dan perempuan bekerja.
- Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP) terdiri atas lima indikator, yaitu kekerasan terhadap anak, tidak menjadi korban kejahatan, bepergian, dan kegiatan bersama anak dan orangtua (indikator dobel untuk ayah dan ibu).
- Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSb) terdiri atas enam indikator, yaitu perkawinan usia anak, memiliki tempat cuci tangan, melakukan kegiatan sosial, ada lansia dalam rumah tangga, melakukan kegiatan keagamaan, dan mengakses internet bersama anak dan orang tua.

Saat ini, IKK baru tersedia di level provinsi, sehingga belum tersedia informasi mengenai capaian IKK Kabupaten Pasangkayu.

#### **2.2.2.3. Indeks Perlindungan Anak**

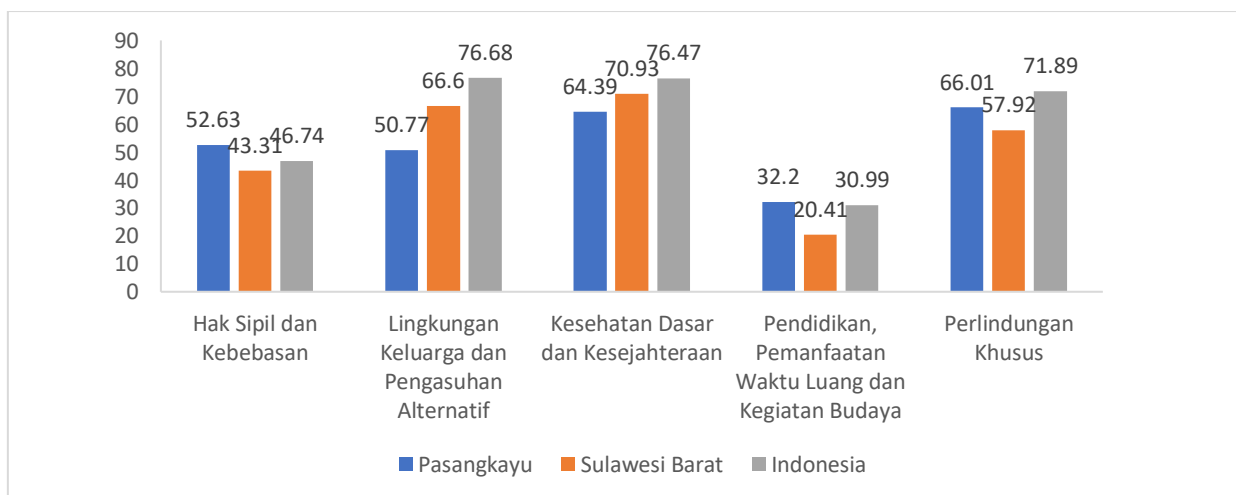
Anak merupakan aset bangsa, tetapi terkadang posisinya lemah sehingga mesti mendapatkan perlindungan dan memastikan hak-haknya terpenuhi. Pasalnya, seringkali anak menjadi korban, baik dari keluarga sendiri maupun dari pihak lain di luar keluarganya. Untuk mengukur capaian perlindungan dan pemenuhan hak anak, pemerintah menyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA). Terdapat lima klaster indikator yang membentuk IPA, yaitu 1). hak sipil dan kebebasan, 2). lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 3). kesehatan dasar dan kesejahteraan, 4). pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan 5). perlindungan sosial. Upaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan kewajiban pemerintah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini merupakan langkah konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Pasangkayu untuk memberikan perlindungan terhadap anak, serta mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

Data menunjukkan capaian IPA Kabupaten Pasangkayu untuk setiap klaster, yaitu hak sipil dan kebebasan sebesar 52,63, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebesar 50,77, kesehatan dasar dan kesejahteraan 64,39, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebesar 32,20, dan perlindungan khusus sebesar 66,01. Jika dibandingkan Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Pasangkayu lebih tinggi untuk klaster hak sipil dan kebebasan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan klaster perlindungan khusus. Sebaliknya, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan lebih rendah dibanding Provinsi Sulawesi Barat. Jika dibandingkan secara nasional, Kabupaten Pasangkayu lebih tinggi untuk klaster hak sipil dan kebebasan dan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Sebaliknya, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan klaster perlindungan khusus lebih rendah dibanding capaian nasional.

Gambar 2.35.

Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2021



Sumber: Kementerian PPPA, diolah

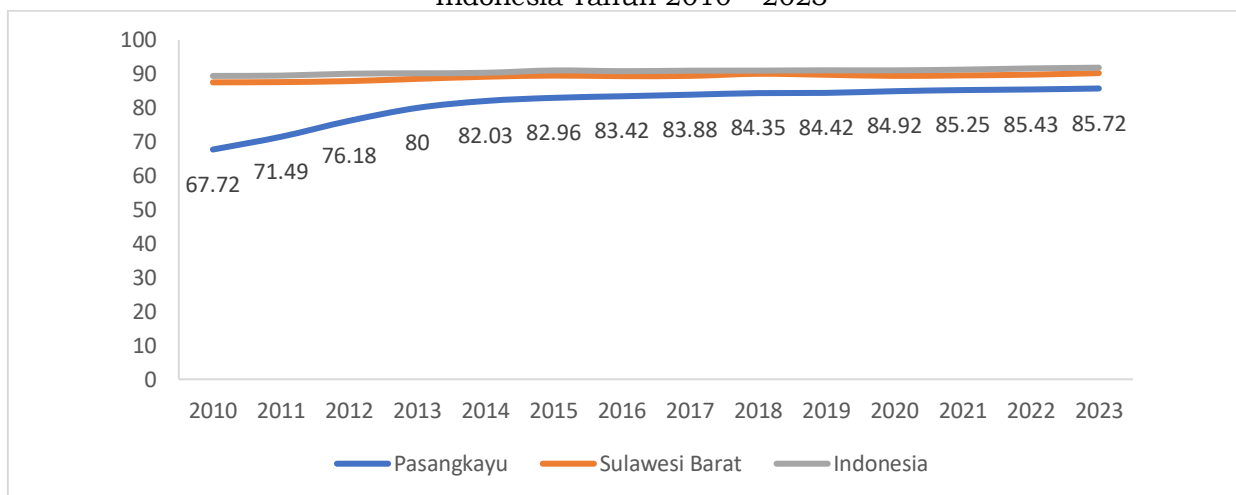
#### 2.2.2.4. Indeks Pembangunan Gender/Indeks Pemberdayaan Gender/Indeks Ketimpangan Gender

Pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh semua pihak secara adil dan merata. Namun terkadang, terdapat kesenjangan antara laki-laki dan

perempuan, terutama terkait dengan aspek pendidikan, kesehatan, pendapatan, serta partisipasi ekonomi dan politik. Untuk mengukur sejauh mana kesetaraan gender itu dicapai, disusun sejumlah indikator, seperti Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Indeks Ketimpangan Gender.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-Laki. Jika IPG semakin mendekati angka 100, berarti kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan semakin mengecil. Data menunjukkan IPG Kabupaten Pasangkayu mengalami peningkatan dari 67,72 di tahun 2010 menjadi 85,72 di tahun 2023. Meskipun meningkat, capaian ini masih lebih rendah dibanding Provinsi Sulawesi Barat yang meningkat dari 87,53 di tahun 2010 menjadi 90,25 di tahun 2023 dan capaian Indonesia yang meningkat dari 89,42 menjadi 91,85 pada periode yang sama. Lebih lanjut, IPG Kabupaten Pasangkayu tercatat yang paling rendah dibanding kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2022.

Gambar 2.36.  
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2010 – 2023



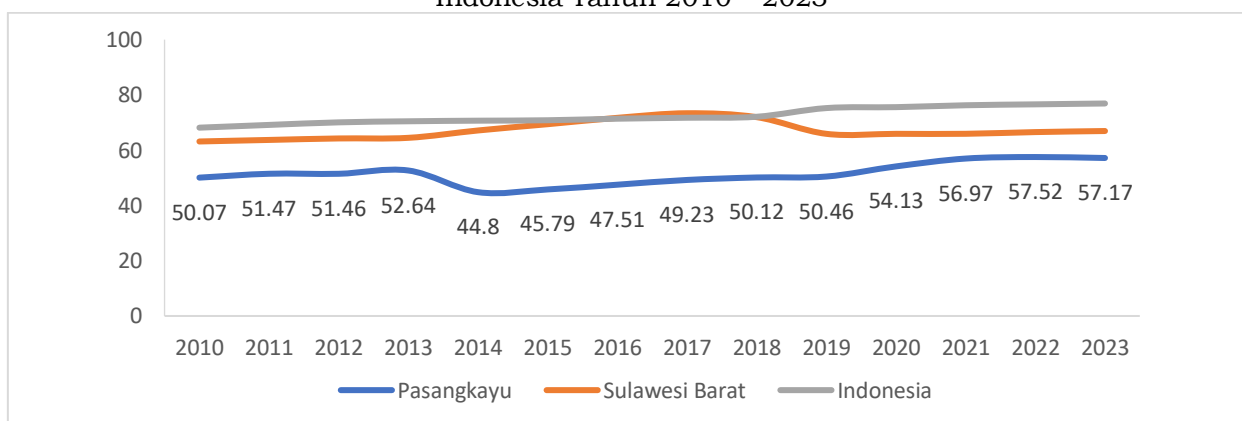
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. Terdapat sejumlah indikator untuk mengukur IDG, yaitu persentase keterlibatan perempuan di parlemen, persentase perempuan sebagai tenaga profesional, dan persentase sumbangan pendapatan



perempuan. Nilai IDG diperoleh dari rata-rata aritmatik dari ketiga indikator tersebut. Semakin tinggi nilai IDG menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesetaraan gender di suatu wilayah. IDG Kabupaten Pasangkayu meningkat dari 50,07 di tahun 2010 menjadi 57,17 di tahun 2023. Meskipun meningkat, capaian ini masih lebih rendah dibanding Provinsi Sulawesi Barat yang meningkat dari 63,15 di tahun 2010 menjadi 66,93 di tahun 2023. Lebih lanjut, capaian IDG Kabupaten Pasangkayu tercatat yang paling rendah dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Barat.

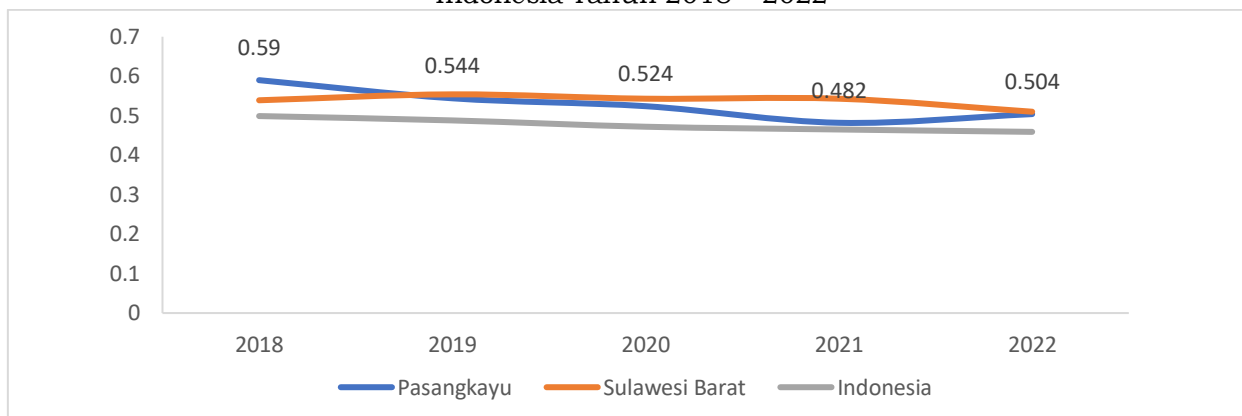
Gambar 2.37.  
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2010 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengukur kesenjangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Semakin rendah nilai IKG, berarti semakin rendah ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Data menunjukkan terjadi penurunan nilai IKG dari 0,590 di tahun 2018 menjadi 0,504 di tahun 2022. Capaian ini membuat posisi Kabupaten Pasangkayu sedikit lebih rendah dibanding Provinsi Sulawesi Barat yang mencapai 0,510 di tahun 2022.

Gambar 2.38.  
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, dan Indonesia Tahun 2018 – 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

#### 2.2.2.5. Indeks Pembangunan Pemuda

Pemuda adalah warga negara berusia 16 hingga 30 tahun yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Rentang usia pemuda tersebut terkait erat dengan masa pendidikan menengah hingga tinggi, masa berada pada angkatan kerja produktif, masa usia subur pada perempuan, dan masa transisi dari remaja ke dewasa. Agar setiap periode tersebut menunjukkan fase yang dapat mempertinggi kualitas hidup pemuda, maka diperlukan ukuran yang meliputi capaian di berbagai dimensi pembangunan. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran mengenai status pembangunan pemuda berdasarkan 3 aspek, yaitu: 1). pembangunan individu, 2). pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, dan (3) partisipasi dan diskriminasi. Saat ini, data IPP masih disajikan di level nasional dan provinsi, sehingga belum tersedia untuk Kabupaten Pasangkayu.

#### 2.2.2.6. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kebudayaan merupakan investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Untuk mendukung pemajuan kebudayaan, diperlukan data dan informasi yang memadai agar intervensi dapat dirumuskan dengan baik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan suatu instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan pada tingkat nasional dan provinsi. IPK dibentuk dari 31 indikator yang tersebar ke dalam tujuh dimensi. Saat ini, IPK baru tersedia di level nasional dan provinsi, sehingga belum tersedia untuk Kabupaten Pasangkayu.

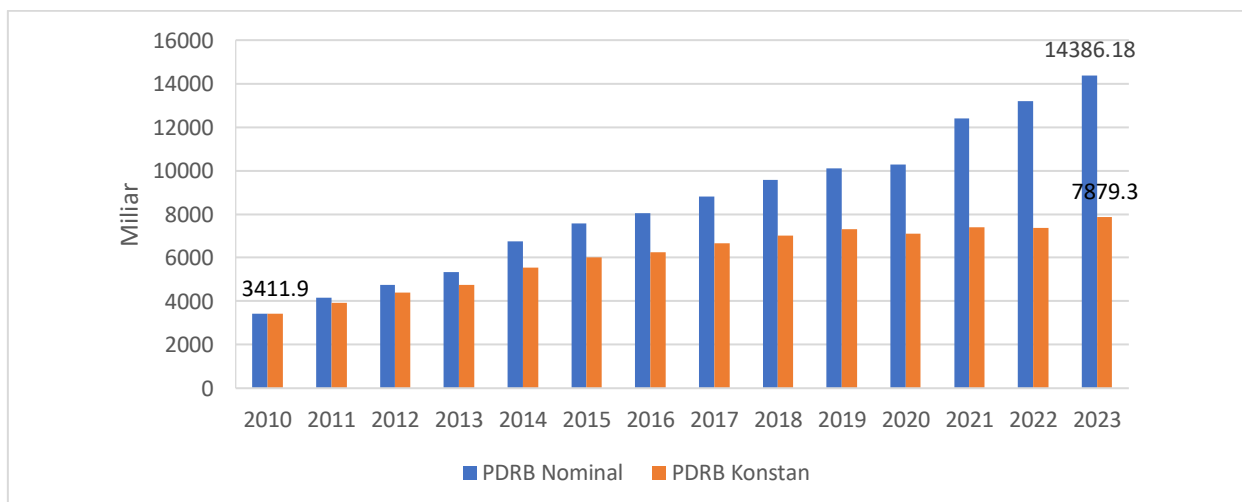
## 2.3. Aspek Daya Saing

### 2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

#### 2.3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator utama untuk menilai perkembangan perekonomian suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai akhir dari barang/jasa yang diproduksi di suatu wilayah, baik diukur dengan harga berlaku maupun harga konstan. Nilai PDRB harga berlaku (nominal) Kabupaten Pasangkayu meningkat dari Rp574,58 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp14.386,18 miliar pada tahun 2023 atau meningkat sekitar 25 kali lipat selama 19 tahun terakhir. Sementara itu, pada tahun 2005, nilai PDRB harga konstan (riil) sebesar Rp392,18 miliar, lalu meningkat menjadi Rp7.879,30 miliar pada tahun 2023, atau meningkat sekitar 20 kali lipat. Namun perlu menjadi catatan bahwa nilai PDRB harga konstan dari tahun 2005 hingga 2009 menggunakan patokan harga tahun 2000, sedangkan PDRB harga konstan tahun 2010 hingga 2023 menggunakan patokan harga tahun 2010. Jika hanya melihat perkembangan PDRB riil dari tahun 2010 hingga 2023, maka terdapat kenaikan dari Rp3.411,9 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp7.879,30 miliar pada tahun 2022 atau naik dua kali lipat selama 13 tahun terakhir.

Gambar 2.39.  
Perkembangan PDRB Harga Konstan dan PDRB Harga Nominal Kabupaten Pasangkayu Tahun 2010 – 2023



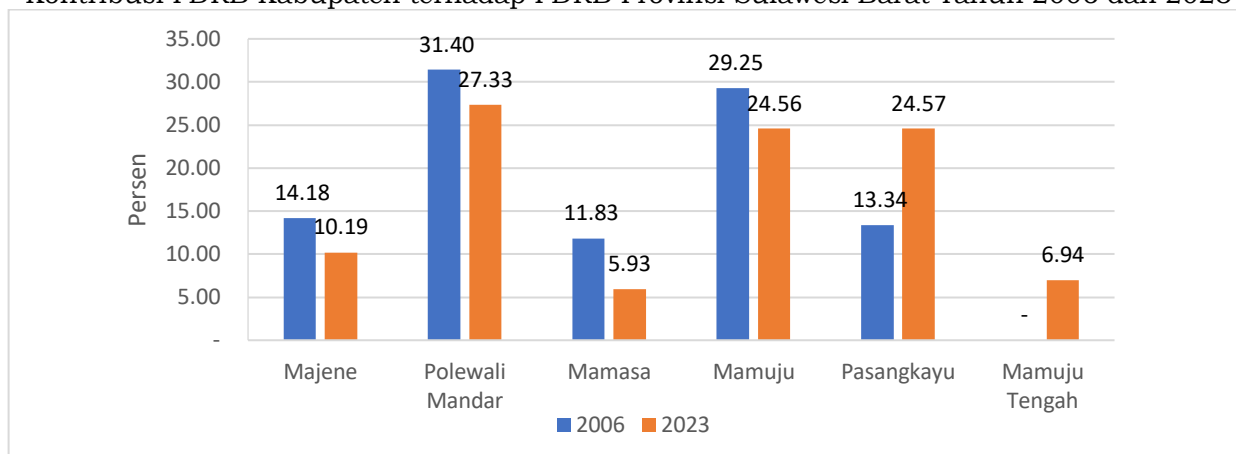
Sumber: BPS, diolah

Peranan Kabupaten Pasangkayu terhadap Provinsi Sulawesi Barat juga tercermin pada kontribusi PDRB harga berlaku yang mencapai 24,57 persen pada tahun 2023. Capaian berada di urutan kedua setelah Kabupaten Polewali Mandar yang berada di urutan pertama, yaitu sebesar 27,33 persen. Namun, kontribusi Kabupaten Pasangkayu satu-satunya yang mengalami kenaikan sebesar 11,23 persen poin dari posisi 13,34 persen di tahun 2006. Adapun kabupaten lainnya justru mengalami penurunan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa peranan Kabupaten Pasangkayu terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Barat semakin dominan dari waktu ke waktu.

Bila dicermati struktur perekonomian di Kabupaten Pasangkayu selama 13 tahun terakhir, maka terlihat tidak terjadi perubahan kontribusi sektoral yang signifikan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap mendominasi perekonomian, meskipun turun kontribusinya dari 52 persen di tahun 2010 menjadi 48 persen di tahun 2023. Sementara itu, sektor industri pengolahan mengalami kenaikan dari 21 persen menjadi 29 persen. Kondisi ini menunjukkan perekonomian Pasangkayu yang secara konsisten melakukan transformasi dari sektor pertanian menuju sektor industri pengolahan. Tentunya transformasi ini bernilai positif mengingat sektor industri pengolahan dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar dibanding sektor pertanian. Jika selama ini, sumber daya alam yang dihasilkan di Kabupaten Pasangkayu masih dominan diekspor ke luar negeri atau ke daerah lain, maka pengembangan industri pengolahan dapat meningkatkan nilai ekonomi dari produk tersebut sebelum diekspor, serta yang tidak kalah pentingnya adalah penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dari aktivitas industri.

Gambar 2.40.

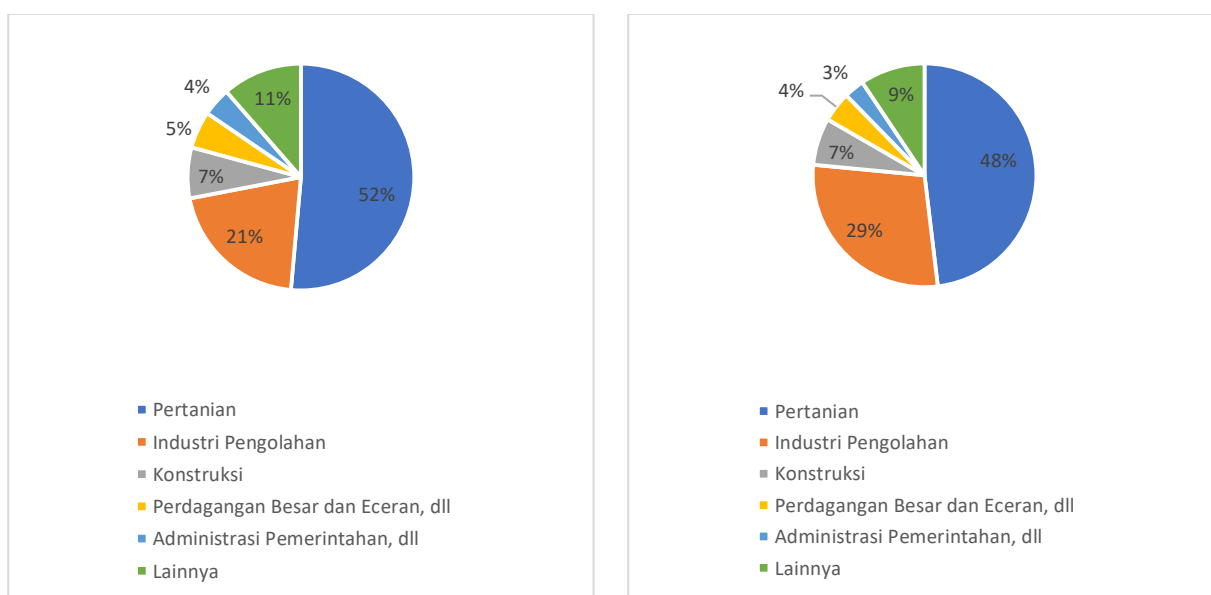
Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006 dan 2023



Sumber: BPS, diolah

Gambar 2.41.

Kontribusi Lima Sektor Utama Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2010 dan 2023



Sumber: BPS, diolah

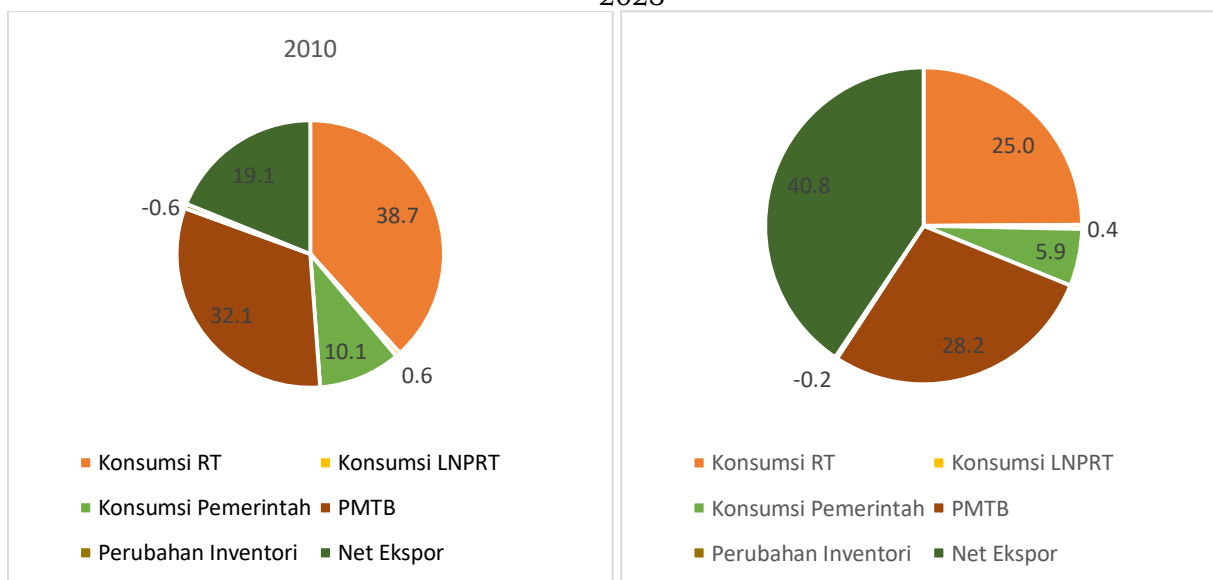
Penurunan kontribusi sektor pertanian erat kaitannya dengan penurunan luas lahan perkebunan, terutama komoditas sawit, yang merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Pasangkayu. Pada tahun 2016, luas lahan perkebunan sawit yang menghasilkan sebesar 54.761 ha, tetapi menurun hampir 50 persen, hingga menjadi 36.671 ha pada tahun 2021. Dari segi produksi, jumlah produksi sawit sebesar 185.729 ton pada tahun 2016, lalu menurun sekitar 34 persen, hingga menjadi 138.564 ton pada tahun 2021. Penurunan produksi sawit ini turut berkontribusi terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasangkayu, terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan

perikanan. Namun di sisi lain, perlambatan pertumbuhan ditahan oleh peningkatan aktivitas industri pengolahan yang semakin meningkat, terutama pada komoditas turunan kelapa sawit.

Jika dilihat dari sisi pengeluaran, PDRB Kabupaten Pasangkayu berkontribusi secara dominan oleh konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 38,7 persen di tahun 2010. Namun pada tahun 2022, peranan konsumsi rumah tangga menurun menjadi 25,0 persen, dan digantikan oleh komponen *net ekspor* barang dan jasa yang mengalami kenaikan dari 19,1 persen di tahun 2010 menjadi 40,8 persen di tahun 2023. Peranan ekspor semakin meningkat seiring dengan hilirisasi dari komoditas pertanian. Umumnya produk yang diekspor merupakan hasil olahan kelapa sawit yang berbentuk *Crude Palm Oil* (CPO), serta komoditas perkebunan dan perikanan lainnya. Tingginya permintaan terhadap produk CPO di pasar internasional mendorong peningkatan ekspor dari Kabupaten Pasangkayu. Meskipun Pemerintah Pusat pernah melarang ekspor CPO sejak Januari 2022 sebagai respon terhadap kenaikan harga minyak goreng, tetapi kebijakan ini hanya berlaku sementara dan kran ekspor dibuka kembali sejak Mei 2022 hingga saat ini.

Gambar 2.42.

Kontribusi Komponen Pengeluaran Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2010 dan 2023



Sumber: BPS, diolah

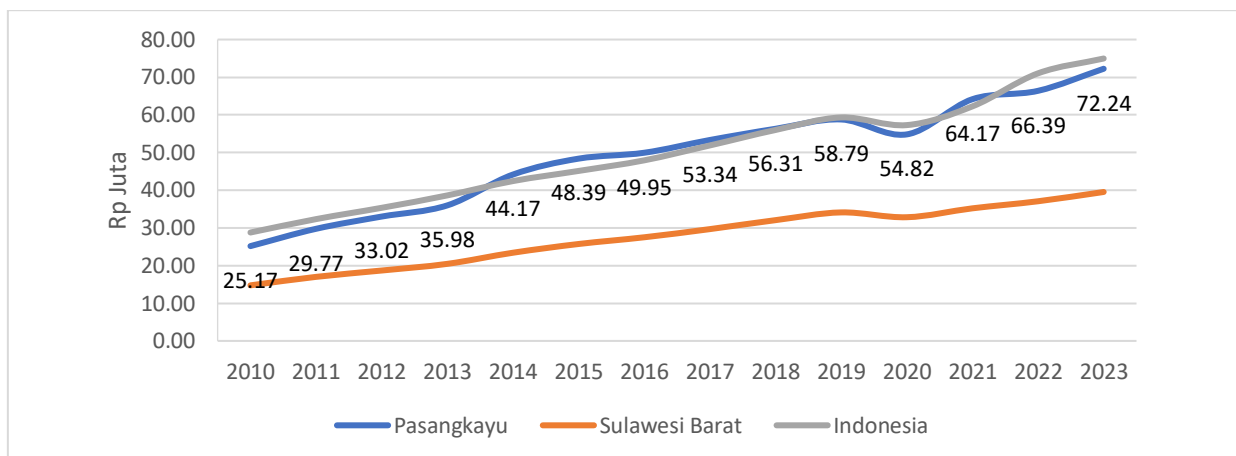
### 2.3.1.2. Pendapatan Per Kapita

Tingkat kesejahteraan penduduk yang diukur dengan nilai PDRB per kapita menunjukkan tren peningkatan. Hal ini sejalan dengan peningkatan

PDRB harga berlaku, yang mengukur nilai akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di wilayah dengan harga berlaku. Di sisi lain, berdasarkan data kependudukan, pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Pasangkayu cenderung melambat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini membuat pendapatan per kapita, yang diukur dari hasil bagi PDRB harga berlaku dengan jumlah penduduk menunjukkan tren peningkatan dari 25,17 juta di tahun 2010 menjadi Rp72,24 juta di tahun 2023. PDRB per kapita di tahun 2023 jauh lebih tinggi dibanding Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp39,53 juta, tetapi masih lebih rendah dibanding capaian nasional yang mencapai Rp74,96 juta. Posisi ini tidak jauh berbeda dengan tahun 2010, dimana Kabupaten Pasangkayu memiliki PDRB per kapita juga lebih tinggi dibanding Provinsi Sulawesi Barat, tetapi hanya sedikit lebih rendah dibanding capaian nasional. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pasangkayu secara rata-rata memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibanding penduduk di kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Barat.

Dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Pasangkayu memang memiliki PDRB per kapita yang paling tinggi, baik pada tahun 2010 maupun tahun 2023. Di tahun 2023, PDRB per kapita Kabupaten Pasangkayu 2,5 kali lebih tinggi dibanding Kabupaten Mamasa yang tergolong terendah di Provinsi Sulawesi Barat, dengan PDRB per kapita sebesar Rp20,39 juta. Capaian ini juga lebih tinggi dibanding ibukota Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Mamuju, dengan PDRB per kapita sebesar Rp49,17 juta di tahun 2023. Potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Pasangkayu, terutama dari komoditas sawit, tampaknya berkontribusi besar pada tingginya PDRB per kapita di kabupaten ini. Hanya saja, PDRB per kapita belum secara jelas menggambarkan potret distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.

Gambar 2.43.  
Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Pasangkayu Tahun 2010 – 2023

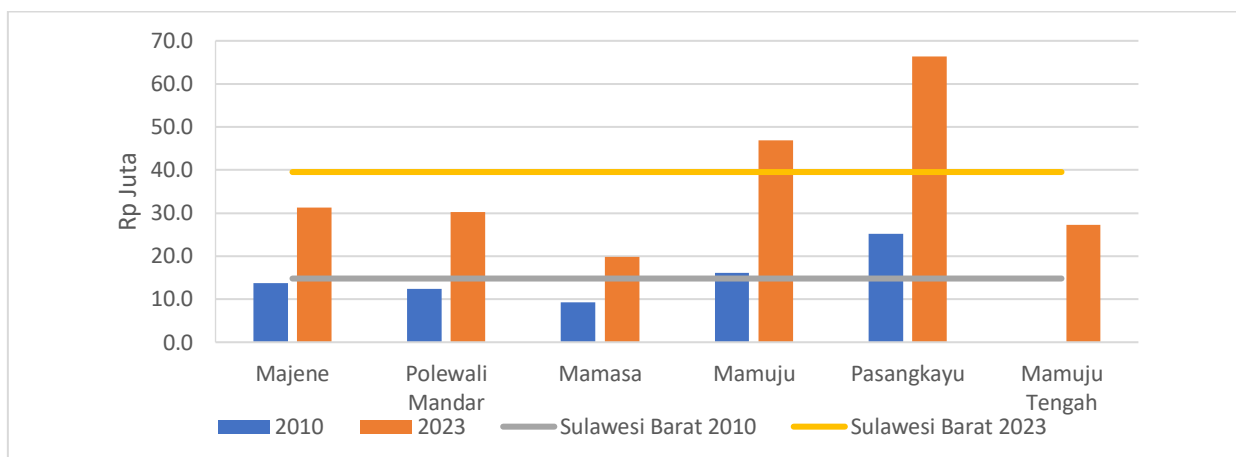


Sumber: BPS, diolah

Peningkatan PDRB per kapita menunjukkan perbaikan daya beli masyarakat. Namun perlu pula memotret perkembangan inflasi, sebab indikator ini menunjukkan besarnya biaya hidup masyarakat. Inflasi perlu dijaga pada tingkat yang rendah dan stabil. Kabupaten Pasangkayu memiliki tren inflasi tahunan (*year on year*) yang fluktuatif. Inflasi tertinggi pernah dicapai tahun 2014, yaitu sebesar 7,88 persen. Dalam tiga tahun terakhir, terjadi peningkatan inflasi dari 1,78 di tahun 2020, lalu naik signifikan menjadi 4,39 persen di tahun 2021 dan 4,85 persen di tahun 2022, tetapi menurun kembali menjadi 1,82 persen di tahun 2023. Meskipun sudah tergolong rendah di tahun 2023, stabilitas harga perlu menjadi perhatian bersama oleh segenap *stakeholder*. Meskipun demikian, perhitungan inflasi ini mengacu pada perhitungan IHK di Kabupaten Mamuju, sehingga kurang mencerminkan perkembangan harga barang dan jasa yang dialami oleh masyarakat di Kabupaten Pasangkayu.

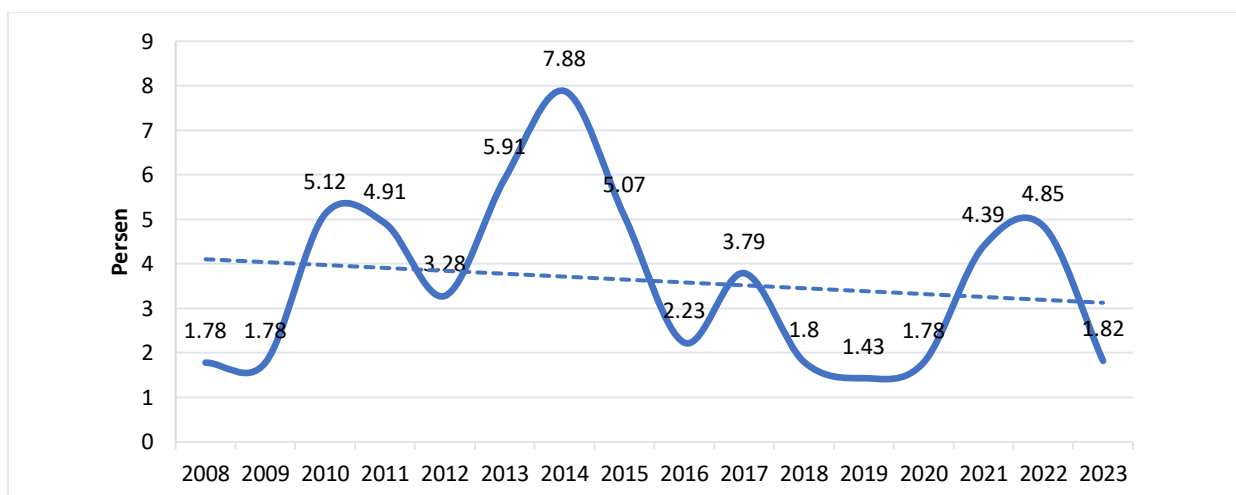


Gambar 2.44.  
PDRB per Kapita Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat, 2010 dan 2023



Sumber: BPS, diolah

Gambar 2.45.  
Perkembangan Inflasi di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2008 – 2023



Sumber: BPS, diolah

### 2.3.1.3. Indeks Ekonomi Inklusif

### 2.3.1.4. Indeks Ekonomi Hijau

### 2.3.1.5. Rasio Kewirausahaan

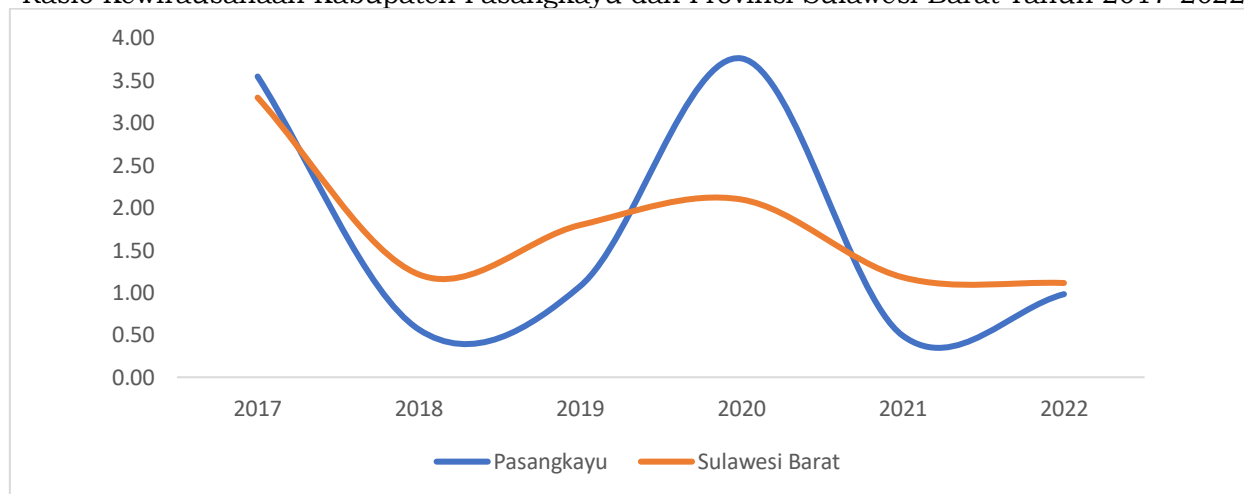
Transformasi ekonomi menjadi prasyarat untuk mewujudkan Indonesia yang berpendapatan tinggi. Keberhasilan transformasi ekonomi salah satunya ditandai dengan peningkatan rasio kewirausahaan nasional. Peningkatan rasio kewirausahaan dapat membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan pengangguran terutama kaum pemuda saat ini. Indonesia menargetkan rasio kewirausahaan dapat mencapai hingga 12 persen sebagai prasyarat utama

menjadi negara maju. Saat ini rasio kewirausahaan nasional baru mencapai 3,47 persen menjelang akhir tahun 2023.

Di Kabupaten Pasangkayu, rasio kewirausahaan pada tahun 2022 mencatatkan angka 0,98 persen. Angka ini masih lebih rendah dari capaian Provinsi Sulawesi Barat dengan sebesar 1,11 persen. Selain itu, terjadi penurunan rasio kewirausahaan yang cukup berarti selama periode 2017 hingga 2022 yakni sebesar 2,57 persen poin. Penurunan ini mengindikasikan semakin rendahnya penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. Padahal Kabupaten Pasangkayu memiliki potensi penumbuhan kewirausahaan yang besar karena besarnya jumlah penduduk dan tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Barat, rasio kewirausahaan Kabupaten Pasangkayu masih tertinggal dari Kabupaten Mamuju yang mencatatkan angka 2,61 persen di tahun 2023.

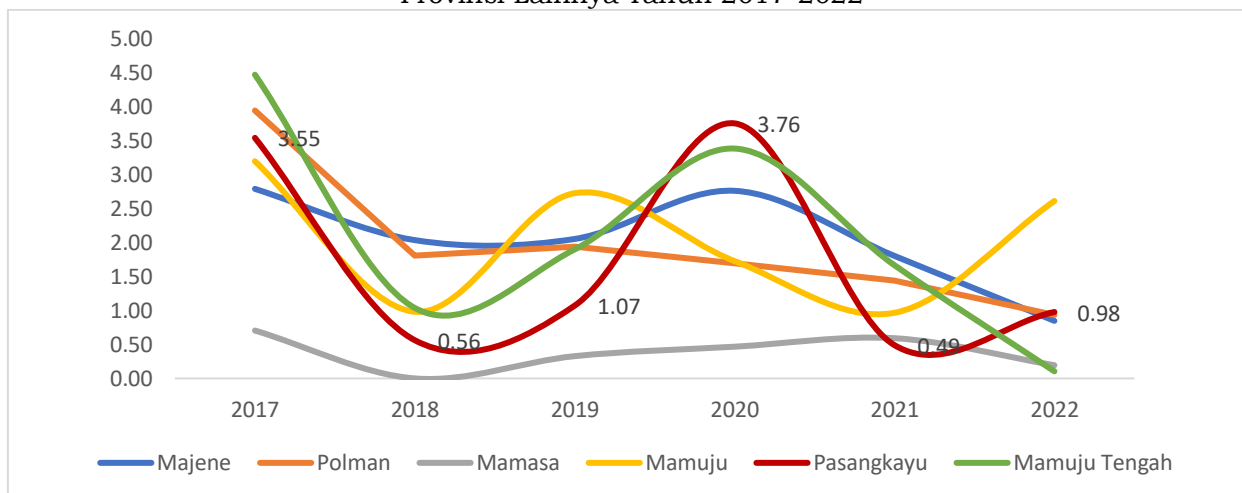
Gambar 2.46.

Rasio Kewirausahaan Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022



Sumber: BPS Sulawesi Barat, diolah

Gambar 2.47.  
Perbandingan Rasio Kewirausahaan Kabupaten Pasangkayu dengan Kabupaten Lainnya di Provinsi Lainnya Tahun 2017-2022



Sumber: BPS Sulawesi Barat, diolah

## 2.3.2. Daya Saing Sumberdaya Manusia

### 2.3.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Modal manusia merupakan salah satu faktor internal yang menjadi modal dasar untuk sampai pada visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, Dan Berkelanjutan. Sebagai salah satu modal dasar, keberhasilan pencapaian Indonesia Emas sangat tergantung dari modal manusia, baik itu secara kuantitas maupun kualitas. Dari sisi kuantitas, Indonesia dan hampir semua daerah (termasuk Kabupaten Pasangkayu) masih menikmati bonus demografi, sehingga proporsi jumlah penduduk berusia produktif masih mendominasi struktur kependudukan. Istilah yang juga berkaitan dengan bonus demografi adalah '*demographic window*'. Jendela demografi terbuka ketika jumlah anak-anak berusia terlalu muda (belum produktif) berkurang dan ditutup ketika proporsi orang tua mulai mengalami pertumbuhan cepat. Jendela demografi hanya terbuka sekali dalam satu generasi. Saat jendela demografi terbuka, ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan dengan syarat negara-negara tersebut telah melakukan investasi yang tepat, tidak hanya dalam perencanaan keluarga, tetapi juga dalam kesehatan, pendidikan, dan peluang kerja bagi angkatan kerja baru.

Bonus demografi merupakan peluang besar bagi Indonesia, termasuk Kabupaten Pasangkayu untuk menggerakkan pembangunan daerah yang ditopang oleh penduduk usia produktif. Agar bonus demografi bisa memberikan

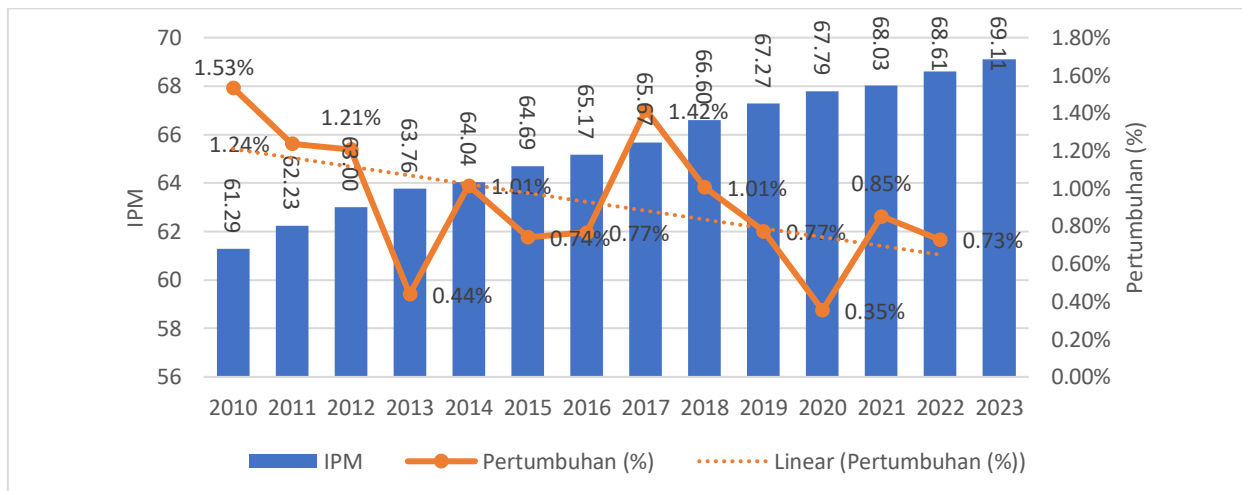
dampak positif bagi pembangunan ada beberapa prasyarat yang mesti dipenuhi. Salah satunya yang paling penting adalah situasi lapangan kerja yang menguntungkan dan strategi investasi yang menguntungkan. Dengan kata lain, jika tenaga kerja yang melimpah tidak dipekerjakan sepenuhnya dan tidak didukung oleh kebijakan sosial, ekonomi, dan modal manusia, bonus demografi yang tepat, potensi ini bisa dengan mudah berubah menjadi beban besar pengangguran yang akan menghasilkan tantangan besar daripada peluang (Xizhe Peng & Yuan Cheng, 2007; Paulo Drummond, Vimal Thakoor, and Shu Yu, 2014; Fred M. Ssewamala, 2015).

Pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu perlu belajar dari negara-negara seperti Afrika Sub-Sahara, Timur Tengah, dan Afrika Utara yang berisiko kehilangan dividen demografi. Wilayah-wilayah ini menghadapi pengangguran pemuda yang tinggi, tingkat penyelesaian sekolah dasar yang rendah, dan partisipasi sekolah menengah yang rendah. Hal ini mengakibatkan segmen populasi yang kurang terdidik dan tidak terampil semakin membesar jumlahnya. Hal itu disebabkan oleh biaya pendidikan yang mahal mencegah orang muda menyelesaikan sekolah, sehingga memasuki pasar tenaga kerja tanpa persiapan yang memadai (Fred M. Ssewamala, 2015).

Meski setiap tahun mengalami kenaikan, tapi capaian IPM Kabupaten Pasangkayu saat ini belum cukup dijadikan modal untuk memanfaatkan bonus demografi karena jika menggunakan angka IPM yang biasa digunakan, IPM Kabupaten Pasangkayu masih di angka 69,11 tahun 2023 atau masih termasuk dalam kategori IPM sedang atau hanya satu tingkat diatas IPM kategori rendah. Namun angkanya berbeda jika IPM yang digunakan adalah hasil sensus long form, dimana IPM Kabupaten Pasangkayu sudah mencapai 70,42 tahun 2023. Hal lain adalah, meski setiap tahun naik, tapi tren kenaikan IPM Kabupaten Pasangkayu cenderung turun dalam 14 tahun terakhir. Tahun 2011, IPM Kabupaten Pasangkayu pernah naik 1,53 persen, kenaikan tertinggi dalam 14 tahun terakhir karena setelah itu Kabupaten Pasangkayu tak pernah lagi melampaui atau mencapai angka yang sama. Bahkan selama periode ini, ada beberapa tahun IPM Kabupaten Pasangkayu tumbuh dibawah 1 persen yaitu di tahun 2014, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Agar dapat memanfaatkan bonus demografi, IPM Kabupaten Pasangkayu mesti masuk

dalam kategori IPM tinggi atau sangat tinggi dengan *range* antara 70 sampai lebih dari 80.

Gambar 2.48.  
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasangkayu Tahun 2010-2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat

Dalam berbagai studi, IPM tinggi berpengaruh terhadap beberapa variabel pembangunan, satu diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi. Modal manusia berpengaruh positif terhadap output dan pertumbuhan produktivitas dalam studi lintas provinsi. Lebih lanjut, ditemukan efek langsung dan tidak langsung dari modal manusia terhadap pertumbuhan TFP (*total factor productivity*). Mendorong investasi pada modal manusia pada daerah kurang berkembang dibenarkan bisa berkontribusi pada pengurangan ketimpangan regional (Belton Fleisher, Haizheng Li, and Min Qiang Zhao, 2009). Daerah dengan modal manusia berkualitas cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan daerah yang modal manusianya lebih rendah (Chen and Fleisher, 1996; Fleisher and Chen, 1997; Démurger, 2001; Yi Zhang etc, 2023; Abdul Shaban, 2023).

Selain berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, sumberdaya manusia berkualitas juga merupakan perangkat utama dalam melawan kemiskinan (*poverty eradication*). Studi Rachid Laajaj etc (2022) menemukan bahwa pemberian beasiswa untuk siswa miskin agar bisa bersekolah di perguruan tinggi bergengsi berpengaruh terhadap kemiskinan. Temuan serupa juga terjadi pada imigran, dimana penentu utama mereka miskin di daerah tujuan mereka adalah kualitas sumber daya manusianya (parameternya kemampuan berbahasa inggris) (Jose M. Soltero, 2019). Di Indonesia, kualitas manusia yang

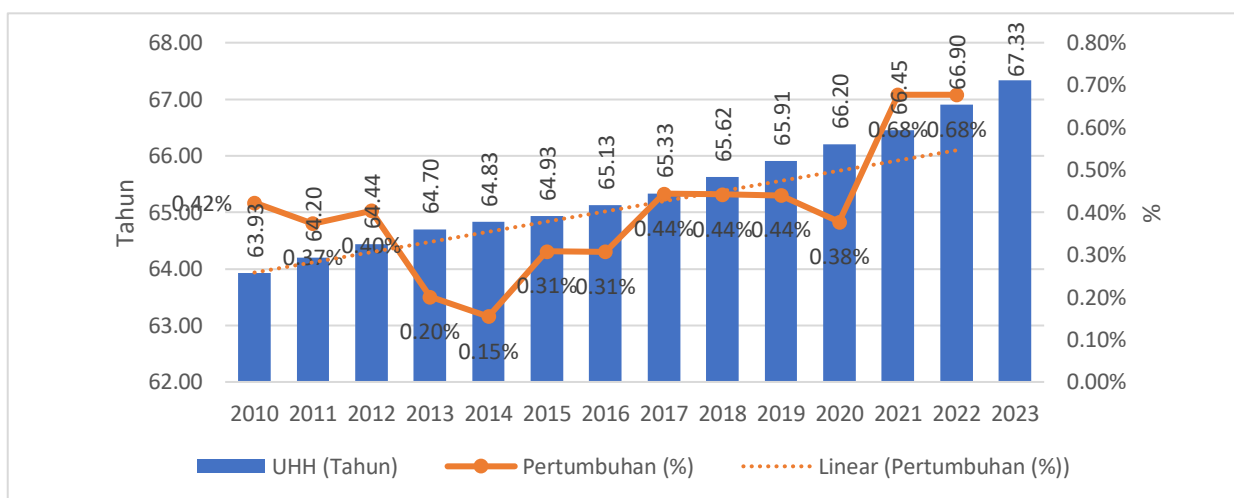
ditunjukkan pada keahlian (*skill*) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, semakin berkualitas modal manusianya, maka semakin sempit ketimpangan pendapatan antar penduduk (Goh Lim Thye etc, 2022). Temuan yang menyatakan modal manusia bisa menjadi *instrument* melawan kemiskinan juga ada dalam hasil penelitian Arsenio M. Balisacan etc (2010); Teguh Dartanto dan Nurkholis (2013). Itu sebabnya investasi pada modal manusia menjadi sangat penting, terutama jika sebuah negara ingin melakukan transisi dari negara berkembang ke negara berpendapatan tinggi (Michael R.M. Abrigo, 2018).

Tantangan modal manusia Kabupaten Pasangkayu ada di semua aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Data dari BPS Provinsi Sulawesi Barat memang menunjukkan tren kenaikan usia harapan hidup (UHH) yang merupakan parameter kesehatan. Tapi, meski cenderung naik, dalam 13 tahun terakhir pertumbuhan UHH Kabupaten Pasangkayu tidak pernah mencapai angka 1 persen dan tidak konsisten. Dari tahun 2011 hingga 2015, pertumbuhan UHH cenderung turun, dari 0,42 persen tahun 2011 hingga di level paling rendah 0,15 persen tahun 2015. Saat itu, rata-rata penduduk Kabupaten Pasangkayu berusia 64,93 tahun. Empat tahun setelah itu terjadi tren pembalikan, dimana pertumbuhan UHH menanjak dari 0,31 persen di tahun 2016 ke 0,44 persen tahun 2018. Kenaikan itu berhasil membuat UHH Kabupaten Pasangkayu sampai 65,62 tahun. Setelah itu, kurvanya menurun lagi, hingga hanya mampu tumbuh 0,38 persen tahun 2021. Penurunan tersebut tidak lepas dari situasi pandemi Covid-19, sebelum akhirnya naik 0,68 persen setahun kemudian sekaligus menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Nampaknya masih sulit bagi pemerintah daerah menaikkan UHH di atas 1 persen. Akibatnya butuh waktu lima tahun untuk menaikkan UHH dari 64 ke 65 tahun, butuh waktu tiga tahun untuk naik dari 65 ke 66 tahun, dan kemungkinan untuk naik dari 66 ke 67 tahun juga butuh waktu tiga tahun.

Lambatnya pertumbuhan UHH Kabupaten Pasangkayu menyebabkan posisi relatifnya lebih rendah dari daerah lain di Provinsi Sulawesi Barat. Meski, IPM Kabupaten Pasangkayu peringkat kedua di Provinsi Sulawesi Barat, tapi UHH-nya menempati urutan ke empat tahun 2023, berada di bawah Kabupaten

Mamasa yang menempati urutan pertama dengan UHH 71,45 tahun, kemudian Kabupaten Mamuju Tengah 69,37 tahun berada di urutan kedua, dan Kabupaten Mamuju 68,66 tahun di urutan ketiga. UHH Kabupaten Pasangkayu hanya lebih tinggi dari Kabupaten Polewali Mandar dan Majene. Itu artinya, bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2023 di Kabupaten Pasangkayu umurnya relatif lebih pendek dibandingkan bayi-bayi yang lahir di Kabupaten Mamasa, Mamuju Tengah, dan Majene.

Gambar 2.49.  
Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Pasangkayu Tahun 2010-2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat

Ada beberapa variabel yang berpengaruh terhadap tinggi-rendahnya UHH sebuah daerah yang diuraikan BPS dalam Laporan Profil Pembangunan Manusia Nasional dan Provinsi. Jika penapaian kinerja pada variable-variabel ini baik, maka UHH Kabupaten Pasangkayu akan meningkat, begitupun sebaliknya. Variabel tersebut adalah:

1. Rumah tangga dengan sumber air minum bersih
2. Rumah tangga yang memiliki akses air minum layak
3. Rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar
4. Morbiditas
5. Perempuan yang pernah kawin berumur 10 tahun ke atas dengan umur perkawinan pertama  $\leq 16$  tahun
6. Perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
7. Perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih



Variabel pertama sampai ketiga merupakan variabel yang berkaitan dengan seberapa sehat kondisi tempat tinggal sebuah keluarga dilihat dari aksesnya terhadap air minum bersih, aksesnya terhadap air minum layak, dan fasilitas buang air besar yang tersedia. Ketiga variabel ini sangat berpengaruh terhadap Kesehatan Penduduk, terutama anak. Jika ada anak mengonsumsi air yang tidak bersih maka mereka berpotensi untuk terserang penyakit seperti diare, muntaber, dsb. Menurut Kementerian Kesehatan penyebab utama kematian pada balita (usia 12-59 bulan) di Indonesia adalah diare. Begitupun jika rumah tangga tak punya akses pada air minum layak dan fasilitas buang air besar.

Berdasarkan Susenas, tercatat ada 75,67 persen rumah tangga di Kabupaten Pasangkayu yang memiliki akses terhadap sumber air minum bersih tahun 2022 dan meningkat menjadi 82,86 persen tahun 2023, sementara 86,81 persen punya akses terhadap sumber air minum layak tahun 2022 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 89,19 persen. Air minum layak adalah air yang memenuhi persyaratan fisika, kimia, dan mikrobiologis yang ditetapkan oleh pemerintah. Air minum layak dapat langsung diminum tanpa dimasak terlebih dahulu. Air minum bersih adalah air yang tidak mengandung bakteri, virus, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit. Air minum bersih dapat diperoleh dari sumber air yang terlindungi, seperti air ledeng yang telah diolah oleh PDAM, air kemasan, atau air sumur yang telah diolah. Air minum layak tidak selalu berarti air minum bersih. Air minum yang memenuhi persyaratan fisika, kimia, dan mikrobiologis, tetapi masih mengandung bakteri, virus, dan parasit, dapat dikatakan air minum layak, tetapi tidak air minum bersih. Air minum bersih selalu berarti air minum layak. Air minum yang tidak mengandung bakteri, virus, dan parasit, pasti memenuhi persyaratan fisika, kimia, dan mikrobiologis yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika merujuk pada data Susenas, berarti masih ada 17,14 persen rumah tangga di Kabupaten Pasangkayu yang belum punya akses terhadap air minum bersih dan rumah tangga yang belum mengakses air minum layak mencapai 10,81 persen.

Meski tak ada standar angka tertentu terkait dengan berapa persentase RT yang punya akses air minum bersih dan air minum layak yang bisa memengaruhi UHH, analisis data pada tiga provinsi dengan UHH tertinggi

setidaknya dapat memberikan gambaran bahwa ada keterkaitan antara air minum bersih dan air minum layak terhadap UHH. Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kalimantan Timur merupakan tiga daerah dengan IPM tertinggi dan UHH tertinggi di Indonesia. DKI Jakarta memiliki rumah tangga dengan sumber air minum bersih 90,67 persen dan rumah tangga yang memiliki akses air minum layak 97,93 persen. Begitupun dengan Yogyakarta dan Kalimantan Timur, keduanya memiliki rumah tangga dengan sumber air minum bersih masing-masing 76,79 persen dan 94,42 persen. Ini memberikan gambaran, bahwa UHH sangat terkait dengan akses rumah tangga terhadap air minum bersih dan air minum layak. Kepemilikan fasilitas air besar juga masih jadi persoalan di Kabupaten Pasangkayu. Dari seluruh rumah tangga di Pasangkayu, 13,39 persen tidak memiliki fasilitas buang air besar tahun 2022, kemudian turun menjadi 12,39 persen tahun 2023.

Variabel selanjutnya yang mempengaruhi UHH Kabupaten Pasangkayu adalah angka Morbiditas. Morbiditas adalah ukuran kejadian penyakit dalam suatu populasi. Morbiditas dapat diukur dengan berbagai cara, seperti insiden, prevalensi, dan tingkat keparahan. Morbiditas dapat berdampak negatif pada karena berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas kerja, meningkatnya biaya kesehatan, dan kematian. Morbiditas bisa diukur salah satunya menggunakan variabel angka kesakitan. Angka kesakitan adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan persentase orang dalam suatu populasi yang memiliki penyakit tertentu pada suatu waktu tertentu.

Di Kabupaten Pasangkayu, angka kesakitan mencapai 10,69 persen tahun 2022, tapi mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 8,01 persen, menunjukkan bahwa dari 100 orang Kabupaten Pasangkayu, 8 orang mengalami sakit. Karena penurunan tersebut, Kabupaten Pasangkayu menjadi daerah dengan angka morbiditas paling rendah di Sulawesi Barat, tapi masih perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Angka kesakitan bisa dipengaruhi oleh ragam faktor seperti kualitas lingkungan, gaya hidup yang tidak sehat, dan akses ke pelayanan kesehatan yang buruk.

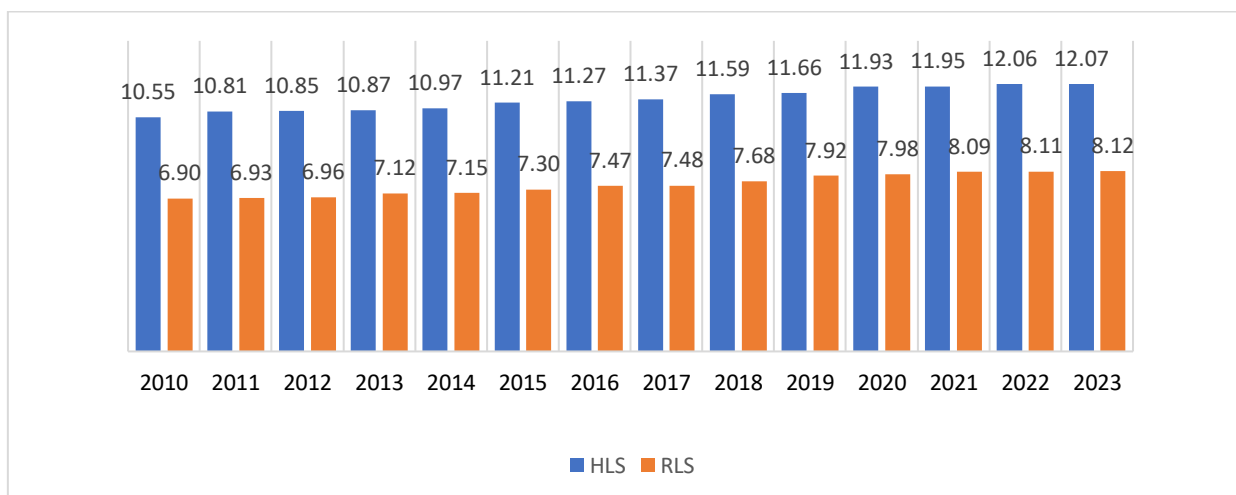
Tiga variabel terakhir, berkaitan dengan kerentanan Perempuan yang menikah dan melahirkan yang berada dibawah standar tertentu. DI Kabupaten Pasangkayu, pernikahan dini masih cukup tinggi. Hal itu ditunjukkan dari

persentase perempuan yang pernah kawin berumur 10 tahun ke atas sebesar 16,70 persen, menunjukkan bahwa ada 16-17 orang Perempuan berusia diatas 10 tahun yang menikah pertama kali saat usia mereka masih dibawah atau sama dengan 16 tahun di tahun 2022. Tahun 2023, angkanya meningkat ke 18,96 persen. Angka tersebut menempatkan Kabupaten Pasangkayu menjadi daerah dengan angka pernikahan dini tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat.

Saat melahirkan, Perempuan rentan mengalami komplikasi, terutama jika mereka melahirkan bukan di fasilitas Kesehatan dan tidak ditolong oleh tenaga Kesehatan profesional. Di Kabupaten Pasangkayu, kedua persoalan ini masih terjadi, 6,11 persen perempuan berumur 15-49 tahun pernah kawin yang pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir masih dibantu dukun beranak, bukan oleh tenaga kesehatan profesional. Bahkan 9,98 persen perempuan berumur 15-49 tahun pernah kawin yang pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir melahirkan di rumah, bukan fasilitas kesehatan memadai.

Aspek kedua yang perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pasangkayu jika ingin meningkatkan kualitas SDM adalah aspek pendidikan, terutama pada parameter rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Dalam perhitungan IPM, dimensi pendidikan memuat dua parameter pembentuk indeks pendidikan yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah. Standar maksimum angka HLS dalam perhitungan IPM adalah 18 tahun dan RLS 15 tahun. Sepanjang kurun waktu tahun 2010 hingga 2023, HLS dan RLS Kabupaten Pasangkayu memang mengalami kenaikan konsisten. Tahun 2010, HLS dan RLS Kabupaten Pasangkayu masing-masing 10,55 tahun dan 6,90 tahun. Itu artinya, jika ada Penduduk usia tujuh tahun bersekolah di tahun 2010, mereka diperkirakan hanya akan melanjutkan pendidikannya hingga jenjang SMA kelas 1, sementara saat itu rata-rata Penduduk usia 25 tahun ke atas hanya berpendidikan SD. Setelah 13 tahun kemudian, HLS dan RLS Kabupaten Pasangkayu masing-masing mencapai 12,07 tahun dan 8,12 tahun.

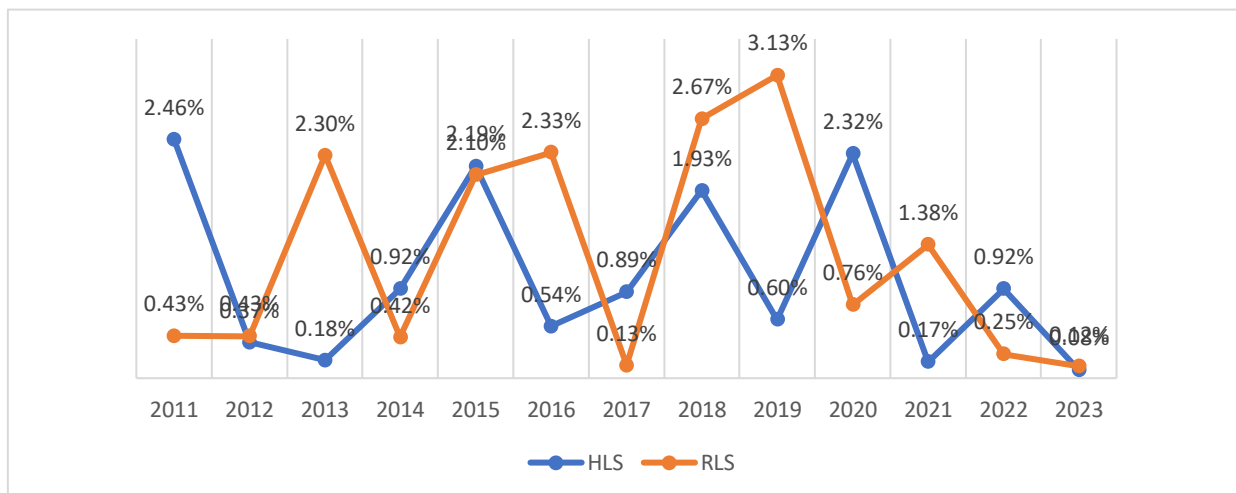
Gambar 2.50.  
Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2010-2023 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat

Walau mengalami kenaikan secara konsisten, HLS Kabupaten Pasangkayu paling rendah di Provinsi Sulawesi Barat, sementara RLS-nya masih tertinggal dari banyak daerah di Indonesia dilihat dari angkanya yang masih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 8,77 tahun. Masih relatif rendahnya HLS dan RLS Kabupaten Pasangkayu disebabkan oleh perkembangan kedua parameter ini cenderung fluktuatif. HLS Kabupaten Pasangkayu pernah mencapai pertumbuhan tertinggi tahun 2011 mencapai 2,46 persen, setelah itu anjlok ke 0,43 persen dan 0,18 persen masing-masing di tahun 2012 dan 2013. Untuk RLS, pertumbuhan tertinggi yang pernah dicapai dalam kurun waktu 2011-2022 adalah 3,13 persen tahun 2019, dimana tahun sebelumnya beberapa kali mencatat pertumbuhan dibawah 1 persen. Setelah mencapai angka tertinggi, tahun selanjutnya merosot lagi hingga hanya mampu tumbuh 0,25 persen tahun 2022 dan 0,12 persen tahun 2023.

Gambar 2.51.  
Pertumbuhan HLS dan RLS Kabupaten Pasangkayu Tahun 2011-2023 (%)



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat

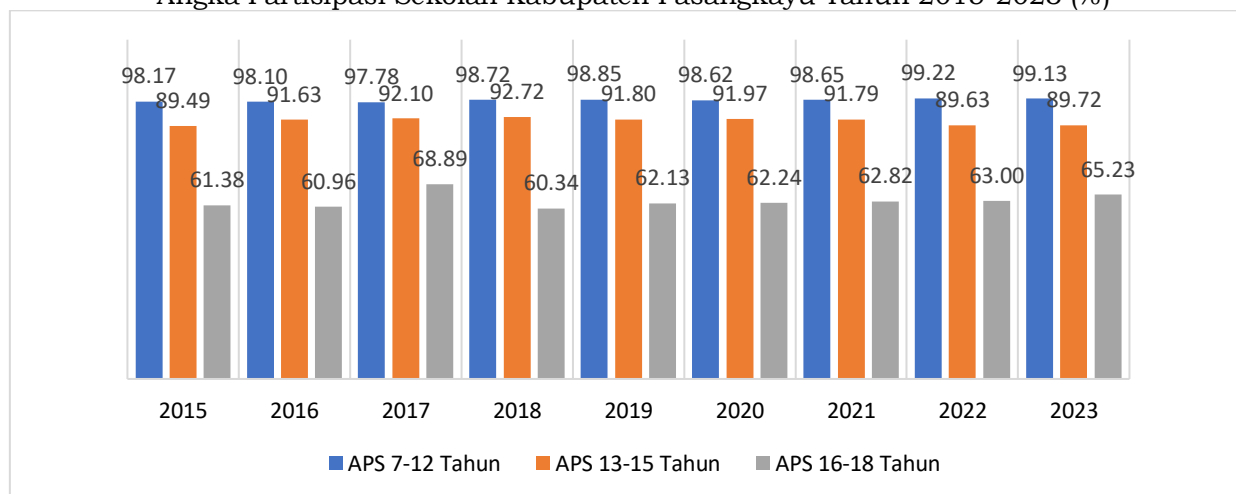
Untuk melakukan akselerasi pertumbuhan HLS dan RLS, tantangan pemerintah Kabupaten Pasangkayu adalah mendorong kinerja beberapa variabel yaitu:

1. Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun
2. Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun
3. Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun
4. Angka Partisipasi Sekolah 19-24 Tahun
5. Angka Tidak Bersekolah 7-12 Tahun
6. Angka Tidak Bersekolah 13-15 Tahun
7. Angka Tidak Bersekolah 16-18 Tahun
8. Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat
9. Angka Melanjutkan/Transisi ke SMA/Sederajat

Angka partisipasi sekolah Kabupaten Pasangkayu perlu diakselerasi pada APS 13-15 tahun dan 16-18 tahun karena keduanya masih rendah dan secara relatif dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sulawesi Barat juga masih tertinggal. Tahun 2021 dan 2022, APS 13-15 tahun mengalami penurunan dari 91,97 persen tahun 2020 ke 91,79 persen dan kemudian 89,63 persen. Tahun 2023, angkanya naik menjadi 89,72 persen, namun hanya tumbuh 0,10 persen. Penurunan paling tajam terjadi di APS 16-18 tahun. Tahun 2016, APS 16-18 tahun Kabupaten Pasangkayu turun 0,68 persen dari 61,38 tahun ke 60,96 tahun, kemudian turun lagi di tahun 2018 sebesar 12,41 persen menjadi 60,34 tahun. Tiga tahun terakhir, pertumbuhan APS 16-18 tak mampu lagi mencapai

1 persen, hanya mampu tumbuh masing-masing 0,18 persen, 0,93 persen, dan 0,29 persen. Tahun 2023, APS 16-18 tahun naik 3,54 persen menjadi 65,23 persen. Karena pertumbuhannya yang relatif lambat, tahun 2023, masih ada 10,28 persen penduduk usia 13-15 tahun dan 34,77 persen penduduk usia 16-18 tahun yang belum bersekolah di Kabupaten Pasangkayu.

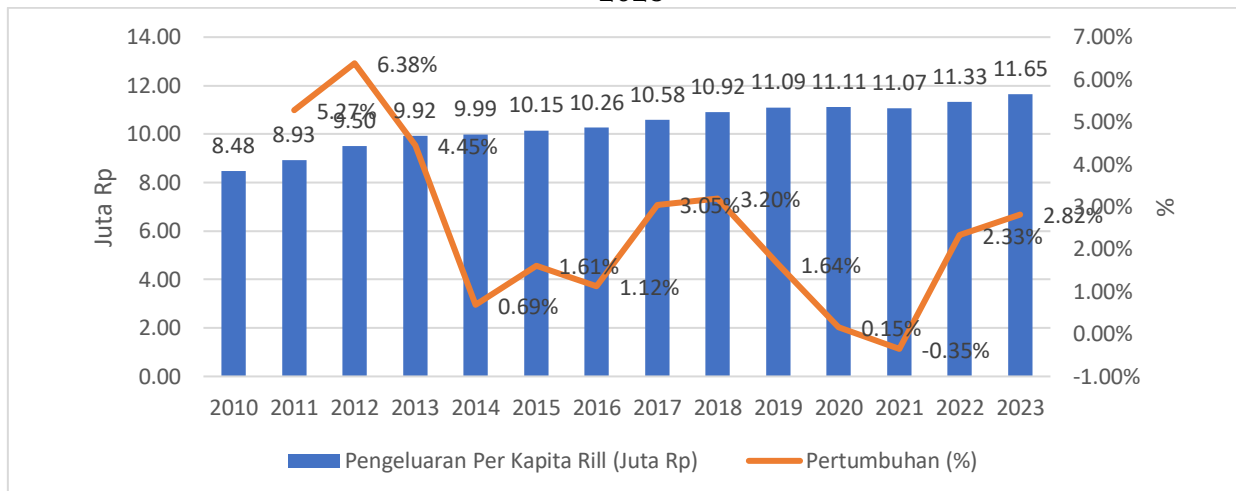
Gambar 2.52.  
Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2023 (%)



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat

Dimensi standar hidup layak juga masih perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan IPM Kabupaten Pasangkayu. Secara relatif, dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sulawesi Barat, pengeluaran per kapita riil disesuaikan sebagai parameter utama dimensi standar hidup layak Kabupaten Pasangkayu merupakan yang tertinggi di tahun 2023. Rerata dalam 14 tahun terakhir pengeluaran per kapita riil rumah tangga di Kabupaten Pasangkayu mencapai Rp. 10,36 juta per tahun dan tahun 2023 mencapai Rp. 11,65 juta. Meski begitu, dilihat dari tren pertumbuhannya sepanjang tahun 2010 hingga 2023 cenderung melambat. Pertumbuhan tertinggi pernah dicapai di tahun 2021 sebesar 6,38 persen, setelah itu anjlok dan hanya mampu tumbuh paling tinggi diangka 4 persen. Tahun 2021, bahkan mengalami kontraksi ke -0,35 persen, sebelum akhirnya tumbuh positif 2,33 persen tahun 2022 dan di tahun 2023 tumbuh 2,82 persen.

Gambar 2.53.  
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2010-2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat

Lambatnya pertumbuhan pengeluaran per kapita riil disesuaikan dipicu oleh beberapa variable yang berpengaruh yaitu:

1. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
2. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010
3. Jumlah Penduduk Bekerja
4. Persentase Pekerja Informal
5. Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan
6. Tingkat Pengangguran Terbuka
7. Jumlah Penduduk Miskin
8. Persentase Penduduk Miskin
9. Gini Rasio

Diantara sembilan variabel tersebut, pemerintah daerah perlu fokus pada rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai per bulan. Kinerja delapan variabel lainnya cukup bagus, sehingga pemerintah daerah perlu mempertahankan. Pendapatan perkapita Kabupaten Pasangkayu tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat mencapai Rp. 72,24 (ADHB) per kapita per tahun, tingkat pengangguran terbukanya juga cukup rendah, hanya 2,02 persen tahun 2023, jumlah dan persentase Penduduk miskinnya juga relatif rendah masing-masing hanya 8,94 ribu jiwa dan 4,79 persen. Tingkat ketimpangan Kabupaten Pasangkayu yang diukur dengan gini rasio juga paling rendah di Provinsi Sulawesi Barat yaitu 0,314. Fokus perlu diarahkan pada peningkatkan upah, terutama upah pekerja informal.



Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dirilis oleh BPS tahun 2021, menunjukkan upah rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal di Kabupaten Pasangkayu hanya Rp. 1.576.371, tertinggi berasal dari sektor industri sebesar Rp. 1.693.748, kemudian pertanian Rp. 1.624.354, dan paling rendah adalah sektor upah sektor jasa hanya Rp. 1.333.885. Upah pekerja informal yang rerata hanya mencapai Rp. 1.576.371 per bulan jauh dibawah upah minimum Kabupaten Pasangkayu yang ditetapkan tahun 2022 sebesar Rp. 3.031.645 per bulan.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan upaya strategis yang bisa ditempuh pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk memanfaatkan bonus demografi yang dalam waktu tak lama lagi akan berakhir. Jika sumberdaya manusia punya keterampilan dan pengetahuan mumpuni, mereka dapat bekerja secara produktif dan menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, mereka dapat berinovasi dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga bisa menurunkan tingkat pengangguran usia produktif. Oleh karena itu, dalam jangka panjang ke depan (20 tahun) pemerintah daerah masih perlu memasukkan pembangunan manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

#### **2.3.2.2. Angka Literasi/Numerasi**

#### **2.3.2.3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**

#### **2.3.2.4. Indeks Literasi Digital**

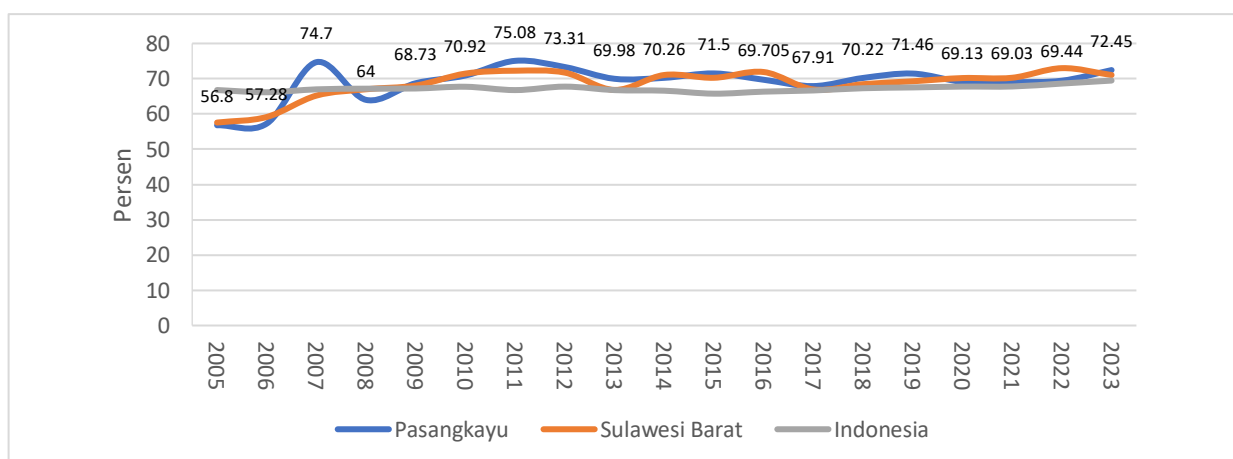
#### **2.3.2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Indikator untuk mengukur seberapa besar partisipasi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) dalam kegiatan produktif adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Semakin tinggi TPAK, maka semakin tinggi pula partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan produktif, sehingga semakin besar potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Data menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) cenderung konstan selama 11 tahun terakhir (2012 – 2023). Akan tetapi, TPAK cenderung meningkat pada periode 2005 – 2011, yaitu dari 56,8 persen di tahun 2005 menjadi 75,08 di tahun 2011 atau level tertinggi selama 18 tahun terakhir, lalu setelah itu mengalami penurunan. Pada tahun 2022, TPAK hanya mencapai 69,44 persen, yang berarti

jika terdapat 100 orang penduduk usia 15 tahun ke atas, maka sebanyak 69 orang merupakan angkatan kerja. Adapun 31 orang sisanya tergolong bukan angkatan kerja, yaitu penduduk yang melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga, bersekolah, dan berkegiatan lainnya. Namun terjadi peningkatan TPAK yang cukup signifikan di tahun 2023, yaitu menjadi 72,45 persen. Capaian ini bahkan lebih tinggi dibanding kondisi pada tahun 2019, atau sebelum terjadinya pandemi COVID-19 yang mencapai 71,46. Peningkatan TPAK ini menunjukkan terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas, terutama didorong oleh peningkatan nilai tambah di sektor industri pengolahan.

Gambar 2.54.

Perkembangan TPAK Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dan Indonesia 2005 – 2023



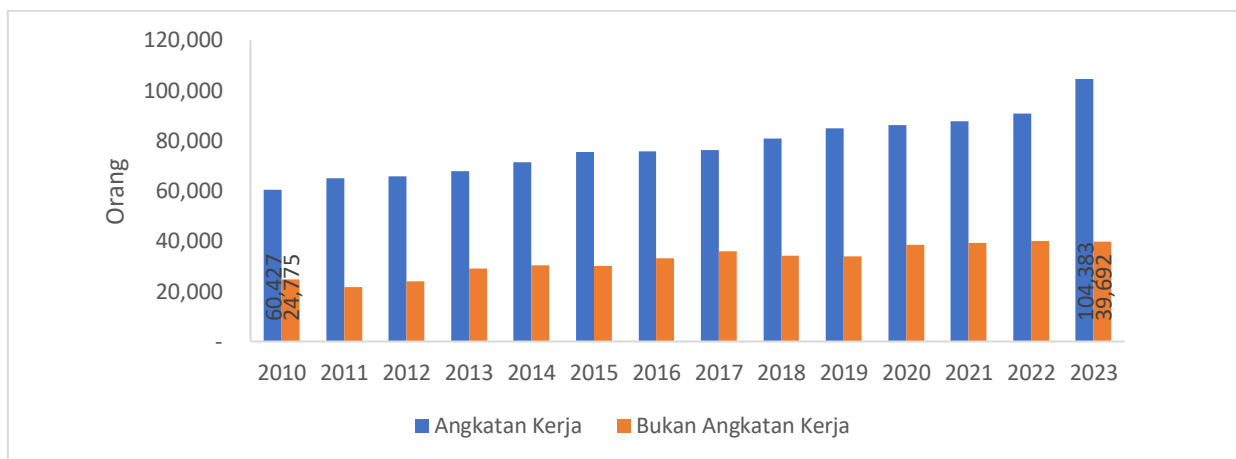
Sumber: BPS, diolah

Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Barat dan Indonesia, tren TPAK Kabupaten Pasangkayu cenderung sama, dimana pada periode tertentu lebih tinggi (misal di tahun 2007, 2011, 2019) dan pada periode lainnya lebih rendah (misal di tahun 2008, 2013, 2018). Tentunya terdapat sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap fluktuasi TPAK, seperti jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan penduduk, dan komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia. Pertumbuhan ekonomi misalnya, cenderung berpengaruh positif terhadap TPAK karena tingginya pertumbuhan bisa membuka lapangan kerja yang luas sehingga mendorong penduduk usia kerja untuk berpartisipasi dalam kegiatan produktif.

Secara absolut, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pasangkayu mengalami peningkatan dari 60.427 orang di tahun 2010 menjadi 104.383 di tahun 2023 atau meningkat sebanyak 43.956 orang (72,74%) dalam 13 tahun

terakhir. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini juga terjadi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Pasangkayu. Sementara itu, jumlah bukan angkatan kerja juga meningkat dari 24.775 orang di tahun 2010 menjadi 39.692 orang di tahun 2023 atau naik sebanyak 14.917 orang (60,20%). Data ini menunjukkan bahwa secara absolut dan persentase, peningkatan jumlah angkatan kerja jauh lebih tinggi dibanding peningkatan jumlah bukan angkatan kerja. Hal ini yang menjelaskan terjadinya peningkatan TPAK dari tahun 2010 ke tahun 2023.

Gambar 2.55.  
Perkembangan Jumlah Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2010 – 2023



Sumber: BPS, diolah

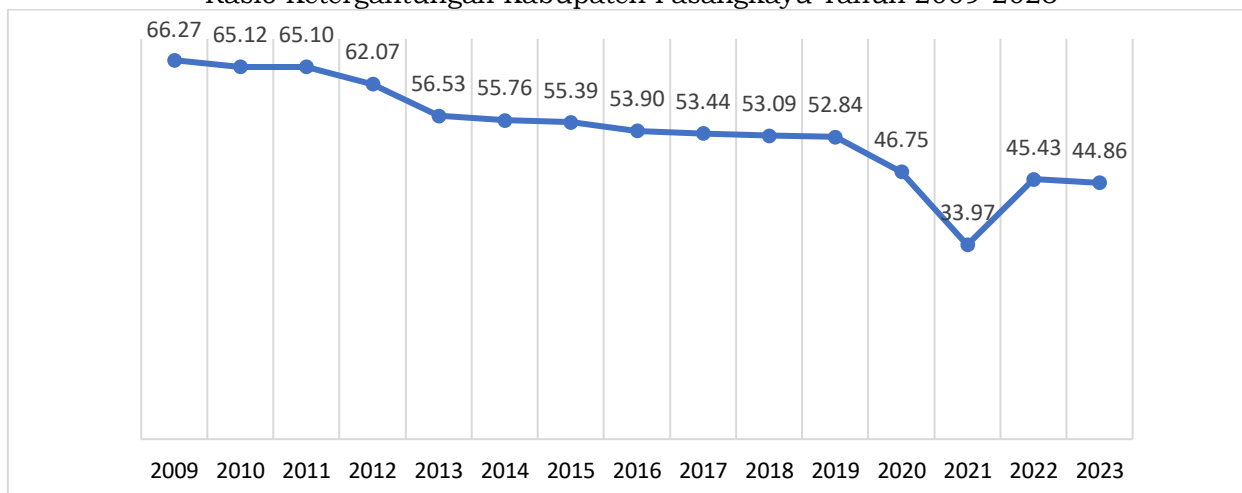
#### 2.3.2.6. Angka Ketergantungan

Kabupaten Pasangkayu termasuk daerah yang sedang memasuki fase bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktifnya lebih dominan dibandingkan penduduk usia belum dan tidak produktif. Bonus demografi adalah fase dimana jumlah penduduk yang aktif secara produktif di Kabupaten Pasangkayu melebihi jumlah individu yang tidak produktif seperti anak-anak dan lansia. Dalam konteks ini, bonus demografi bisa membawa dampak positif berupa potensi pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Kondisi ini memberikan peluang untuk peningkatan dalam sektor ekonomi karena adanya lebih banyak tenaga kerja yang dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi. Sebagai hasilnya, potensi kenaikan pendapatan per kapita dan perbaikan standar hidup bagi masyarakat secara keseluruhan dapat terwujud. Peluang ini seringkali disebut dengan “jendela peluang (*window opportunity*)”.

Salah satu “jendela peluang” yang terbuka dari bonus demografi Kabupaten Pasangkayu adalah menurunnya rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan merupakan istilah yang merujuk pada perbandingan antara jumlah individu yang tidak aktif secara ekonomi (seperti anak-anak dan pensiunan) dengan jumlah individu yang aktif secara ekonomi (yang biasanya bekerja dan membayar pajak). Dalam konteks kependudukan, angka ketergantungan memberikan gambaran tentang beban ekonomi yang ditanggung oleh populasi yang tidak bekerja terhadap populasi yang bekerja. Semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula beban ekonomi yang ditanggung penduduk usia kerja, begitupun sebaliknya. Jika angka ketergantungan rendah, penduduk usia produktif di Kabupaten Pasangkayu bisa mengalokasikan sebagian pendapatan mereka untuk investasi demi kepentingan masa tua mereka karena beban tanggungan mereka rendah. Tapi jika beban tanggungan tinggi, populasi yang bekerja harus menanggung biaya layanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan pensiun bagi populasi yang tidak bekerja, yang pada gilirannya dapat mengurangi sumber daya yang tersedia untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Saat masa bonus demografi, tingkat ketergantungan di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada tahun 2009, setiap 100 penduduk usia produktif harus memberikan dukungan kepada 66 penduduk yang tidak produktif. Angka ini kemudian mengalami penurunan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif, mencapai rasio ketergantungan sebesar 56,53 pada tahun 2013. Penurunan ini berlanjut hingga tahun 2020 dan 2021, di mana rasio ketergantungannya turun lagi menjadi 46,75 dan 33,97. Namun, terjadi kenaikan pada tahun 2022 menjadi 45,43, sebelum kembali turun ke 44,86 di tahun 2023.

Gambar 2.56.  
Rasio Ketergantungan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2009-2023



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

Perubahan rasio ketergantungan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor yang juga menentukan perkembangan jumlah penduduk, yaitu angka fertilitas, mortalitas, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Hasil sensus penduduk *long form* (SP LF) tahun 2020 menunjukkan ketiga parameter ini mengalami pergeseran. Angka *total fertility rate* (TFR) Kabupaten Pasangkayu menurun dari 3,53 pada sensus penduduk 2010 menjadi 2,54 pada periode SP LF 2020. Angka tersebut semakin mendekati *replacement rate* yaitu 2,10. Penurunan TFR pada dasarnya baik bagi rasio ketergantungan dalam jangka waktu tertentu, tapi negatif dampaknya bagi kondisi demografi secara keseluruhan. Itu sebabnya pemerintah daerah perlu menjaga agar TFR berada di level *replacement rate*. Angka kematian yang diukur dari angka kematian bayi juga mengalami penurunan. Selama sepuluh tahun terakhir, Kabupaten Pasangkayu telah mengalami bonus demografi yang menyebabkan penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dari 51 per 1.000 kelahiran hidup pada SP 2010 menjadi 32,69 per 1.000 kelahiran hidup pada SP LF 2020. Perbaikan infrastruktur kesehatan dan peningkatan kualitas hidup perempuan di Kabupaten Pasangkayu telah meningkatkan kemampuan bertahan hidup bagi bayi yang baru lahir. Pemerintah daerah perlu mewaspadai migrasi keluar, karena pengaruhnya besar terhadap angka beban tanggungan. Meski belum tersedia data tentang jumlah migrasi keluar dan masuk, tapi hasil diskusi bersama perangkat daerah mengindikasikan bahwa ada arus migrasi keluar yang besar dari penduduk Kabupaten Pasangkayu ke daerah lain, salah satunya Kabupaten Morowali.

### **2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah**

#### **2.3.3.1. Indeks Infrastruktur**

#### **2.3.3.2. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur**

### **2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi**

#### **2.3.4.1. Indeks Demokrasi**

#### **2.3.4.2. Indeks Rasa Aman**

#### **2.3.4.3. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban**

#### **2.3.4.4. Indeks Kerukunan Umat Beragama**

#### **2.3.4.5. Indeks Daya Saing Daerah**

Kemampuan daerah untuk bersaing dalam menarik investasi merupakan salah satu parameter penting dalam menilai iklim investasi. Dari sekian banyak kabupaten/kota di Indonesia, investor akan melihat kemampuan daya saing daerah sebelum memutuskan berinvestasi. Daya saing daerah adalah kemampuan produktivitas daerah dalam menghasilkan barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Daya saing daerah di Indonesia diukur menggunakan indeks daya saing daerah (IDSD) yang merupakan angka indeks yang terdiri dari empat komponen pembentuk dan diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing.

Perhitungan IDSD dilakukan sejak tahun 2017 oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang kemudian dilakukan oleh BRIN. Tahun 2022, BRIN mulai menghitung IDSD hingga level kabupaten/kota, sehingga dapat dilihat komparasi IDSD per kabupaten/kota. Meski begitu, beberapa daerah yang belum bisa dihitung IDSD-nya karena keterbatasan data, salah satunya Kabupaten Pasangkayu. Tahun 2022 dan 2023, BRIN hanya menghitung nilai dari beberapa pilar dalam IDSD untuk Kabupaten Pasangkayu, sehingga yang dapat dianalisis angka indeks dari sebagian pilar IDSD.

Tahun 2022, daya saing Kabupaten Pasangkayu kuat pada pilar 11 yaitu dinamisme bisnis dilihat dari nilai indeks pilar 11 yang mencapai angka maksimum yaitu 5 poin. Dinamisme bisnis merupakan bagian dari aspek ekosistem bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja. Nilai indeks 5 poin menjelaskan bahwa Kabupaten Pasangkayu termasuk daerah yang mudah

dalam memulai bisnis. Selain itu, Kabupaten Pasangkayu juga cukup tinggi pada pilar 7 yaitu pasar produk dengan nilai indeks 4,20.

Kelemahan Kabupaten Pasangkayu ada pada Pilar 3, Pilar 4, Pilar 5, Pilar 6, pilar 8, pilar 10, dan pilar 12. Pilar 3 menggambarkan kemampuan daerah dalam mengadopsi TIK, dimana Kabupaten Pasangkayu hanya mampu memperoleh nilai indeks 2,55. Angka tersebut menggambarkan Kabupaten Pasangkayu masih lambat dalam mengadopsi TIK untuk meningkatkan produktivitas daerah. Pilar 4, 5, dan 6 masing-masing menjelaskan tentang stabilitas ekonomi makro, kesehatan, dan keterampilan. Untuk ketiga pilar ini, Kabupaten Pasangkayu hanya mendapat nilai indeks 2,48, 3,69, dan 2,76, masih relatif lebih rendah dari angka nasional dan Sulawesi Barat. Sementara untuk pilar 8, 10, dan 12, yang menggambarkan tentang pasar tenaga kerja, ukuran pasar, dan kapabilitas inovasi juga masih relatif rendah. Pilar 8, Kabupaten Pasangkayu hanya mendapat nilai 2,08, pilar 10 dan 12 lebih rendah lagi yaitu 0,15, dan 0,11.

Tabel 2.6.  
Nilai IDSD Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

Kabupaten/kota	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	IDSD
Nasional	4,14	2,91	3,57	3,05	3,76	3,73	2,68	3,73	2,66	1,31	5,00	2,62	3,26
Sulawesi Barat	4,18	2,57	3,45	2,41	3,33	3,47	3,98	4,14	3,23	0,10	5,00	1,40	3,10
Majene	4,17	2,62	2,40	2,14	3,23	3,34	3,14	4,05	2,48	0,24	5,00	1,60	2,87
Polewali mandar	4,54	1,91	2,46	2,40	3,23	2,91	2,94	3,90	3,09	0,62	5,00	1,51	2,88
Mamasa	3,79	-	1,74	2,03	3,92	2,87	3,22	3,68	1,98	0,15	5,00	0,64	-
Mamuju	4,03	2,81	3,43	2,56	3,69	2,83	3,14	3,57	3,14	0,55	5,00	1,32	3,01
Mamuju tengah	-	2,04	2,52	2,66	3,54	2,75	3,55	2,56	1,13	0,48	5,00	0,07	-
Pasangkayu	-	-	2,55	2,48	3,69	2,76	4,20	2,08	-	0,15	5,00	0,11	-

Sumber: BRIN

Tahun 2023, nilai IDSD Kabupaten Pasangkayu masih belum bisa dihitung karena data pilar 9 pada aspek pasar belum memenuhi, tapi jumlah nilai indeks berdasarkan pilar lebih banyak terisi dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan mendasar yang terlihat adalah penurunan tajam pada nilai indeks pilar 7 dan pilar 11 menjadi 0,78 dan 2,23, menunjukkan pasar produk dan dinamisme bisnis memburuk. Beberapa pilar yang sebelumnya rendah, mengalami kenaikan seperti pilar 3 dan 4 mencatat nilai indeks masing-masing 3,62 dan 3,66, pilar 6 sebesar 3,14, sementara pilar 8 naik ke angka 3,77. Walaupun mengalami kenaikan, nilai semua pilar Kabupaten Pasangkayu

secara relatif masih lebih rendah dari angka Nasional dan Provinsi Sulawesi Barat.

Penyebab masih rendahnya nilai indeks berdasarkan pilar Kabupaten Pasangkayu dapat dilihat dari parameter masing-masing pilar. Pada pilar 1 atau institusi misalnya, Kabupaten Pasangkayu masih perlu memperbaiki kinerja beberapa indikator seperti modal sosial, transparansi anggaran, sistem pemerintahan berbasis elektronik, upaya pencegahan korupsi, kinerja pemerintah daerah, dan beberapa indikator lainnya. Pilar bernilai paling rendah di tahun 2023 yaitu pilar 7 atau pasar produk, perlu dilakukan perbaikan pada dua indikator utama yaitu tingkat dominasi pasar dan persaingan sektor jasa, sementara pada pilar 12 yaitu kapabilitas inovasi, Kabupaten Pasangkayu perlu meningkatkan lagi capaian pada beberapa indikator yaitu pengembangan kluster industri, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset, dan beberapa parameter lainnya.

Tabel 2.7.

Nilai IDSD Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Provinsi	Lingkungan Pendukung				SDM				Pasar		Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Nasional	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44
Prov. Sulawesi Barat	4,40	2,22	3,63	3,85	3,39	3,54	3,87	3,96	2,32	3,81	3,16	2,21	3,36
Rata-Rata Kab/Kota	4,07	1,77	3,47	3,15	3,59	3,22	1,91	3,62	1,28	3,78	3,13	1,63	3,02
Majene	4,36	1,61	3,55	3,07	3,24	3,38	2,41	3,94	1,13	3,66	4,41	3,01	3,15
Polewali Mandar	4,43	1,57	3,56	3,13	3,29	3,07	2,86	3,59	1,47	4,09	3,51	2,20	3,06
Mamasa	3,78	1,56	3,13	3,16	3,94	3,25	2,51	2,77	0,74	3,45	2,03	1,33	2,64
Mamuju	3,95	1,96	3,39	3,37	3,70	3,27	2,28	4,34	1,77	4,04	4,44	2,40	3,24
Mamuju Tengah	3,92	1,38	3,55	2,54	3,60	3,24	0,59	3,29	-	3,97	2,19	0,40	-
Pasangkayu	3,96	2,53	3,62	3,66	3,76	3,14	0,78	3,77	-	3,46	2,23	0,43	-

Sumber: BRIN

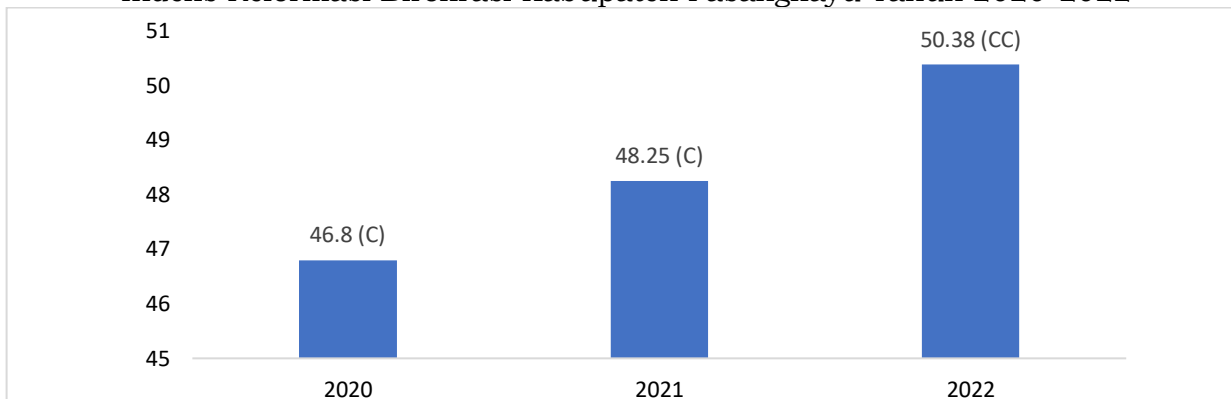


## 2.4. Aspek Pelayanan Umum

### 2.4.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Gambar 2.57.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022



Sumber: Biro Organisasi dan Tata Laksana Kabupaten Pasangkayu

Dalam menciptakan lingkungan kelembagaan dan pemerintahan yang mampu menghasilkan regulasi yang adaptif, taat asas, berintegritas, tangkas dan kolaboratif, maka diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik. Saat ini Kabupaten Pasangkayu masih diperhadapkan dengan inefisiensi regulasi dan birokrasi serta pelayanan publik yang belum prima. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) pada tahun 2022 mencatatkan angka 50,38 atau termasuk kategori masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar (CC, cukup/memadai). Capaian ini juga masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Barat dengan kategori baik (B, baik) dan Kabupaten Polewali Mandar (B, baik). Meskipun demikian terdapat perbaikan yang berarti dari tahun-tahun sebelumnya yang mengategorikan IRB Kabupaten Pasangkayu masih kurang (C) atau berada diangka 46-48 poin.

### 2.4.2. Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang berkualitas, mudah, cepat, dan terjamin belum sepenuhnya diterapkan dengan baik di Kabupaten Pasangkayu. Tercermin dari Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2021 yang termasuk kategori C- atau cukup (dengan catatan), dan capaian ini lebih rendah dibandingkan Provinsi (B, baik dengan catatan) serta kabupaten lainnya. Kategori ini menunjukkan bahwa aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi masih perlu perbaikan berarti.

Dalam aspek akuntabilitas kinerja instansi, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2022 yang masuk kategori CC (cukup/memadai). Capaian ini juga lebih rendah dibandingkan Provinsi (B) dan Kabupaten lainnya seperti Polewali Mandar (BB), Mamuju (B), dan Majene (B).

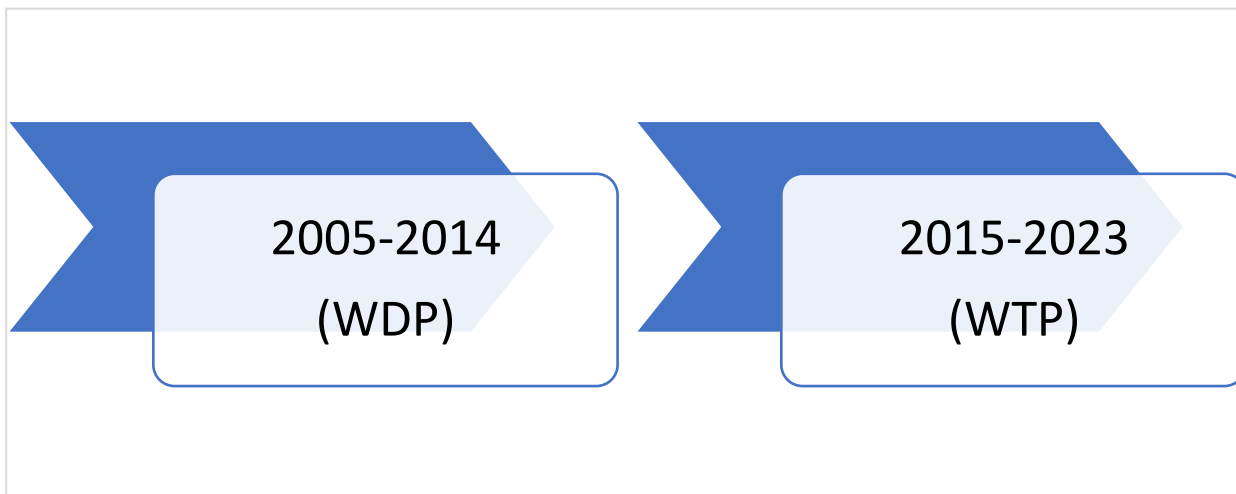
Dalam aspek perwujudan akuntabilitas dan transparansi terhadap seluruh aktivitas keuangan pemerintah Kabupaten Pasangkayu menunjukkan perbaikan yang berarti selama periode 2005-2022. Hal ini tercermin oleh opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama tahun 2005-2014 yang tercatat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), lalu mengalami perbaikan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2015 dan bertahan hingga tahun 2023. Pemberian opini oleh BPK juga ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan di Kabupaten Pasangkayu terhadap pertanggungjawaban keuangan yang dikelola pemerintah.

Tabel 2.8.  
Indeks SAKIP dan IPP Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat

Provinsi/Kabupaten	Indeks SAKIP (2022)	Indeks PP (2021)
<b>Sulawesi Barat</b>	B	B-
<b>Mamuju</b>	B	B-
<b>Mamasa</b>	CC	C
<b>Mamuju Tengah</b>	CC	B-
<b>Majene</b>	B	C
<b>Kabupaten Pasangkayu</b>	CC	C-
<b>Polewali Mandar</b>	BB	B

Sumber: Kementerian PAN RB

Gambar 2.58.  
Opini BPK atas LKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2005-2023

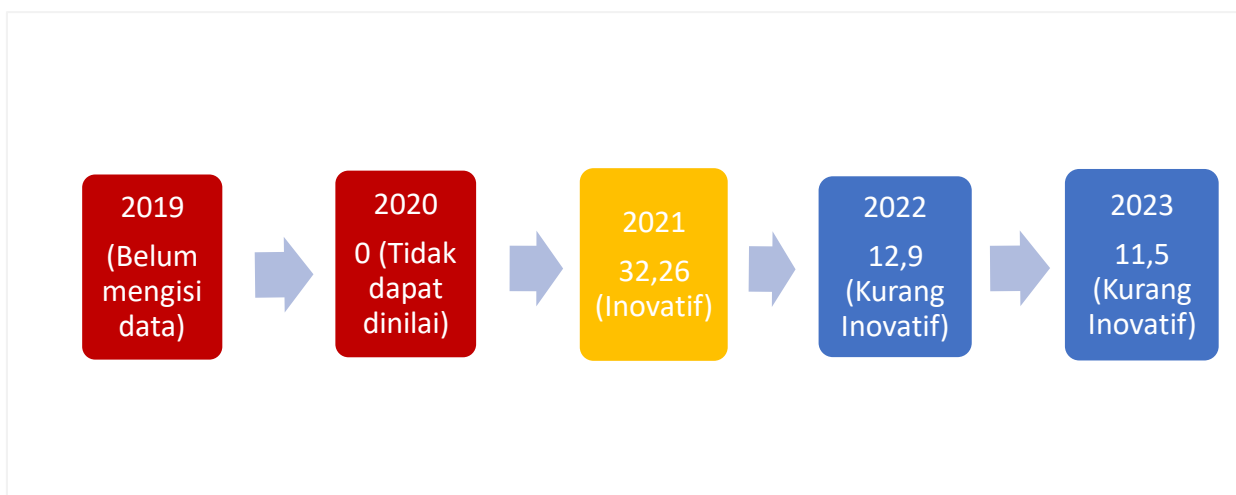


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu

### 2.4.3. Indeks Inovasi Daerah

Praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pasangkayu masih termasuk kategori kurang dengan mencatatkan angka Indeks Inovasi Daerah (IID) pada tahun 2023 sebesar 11,5 poin, menurun dibandingkan tahun sebelumnya (12,9). Jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya, IID Kabupaten Pasangkayu tertinggal jauh dari Majene (39,44), Polewali Mandar (41,64), Mamasa (37,17), Mamuju Tengah (54,5) dan Mamuju (20,7).

Gambar 2.59.  
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2023

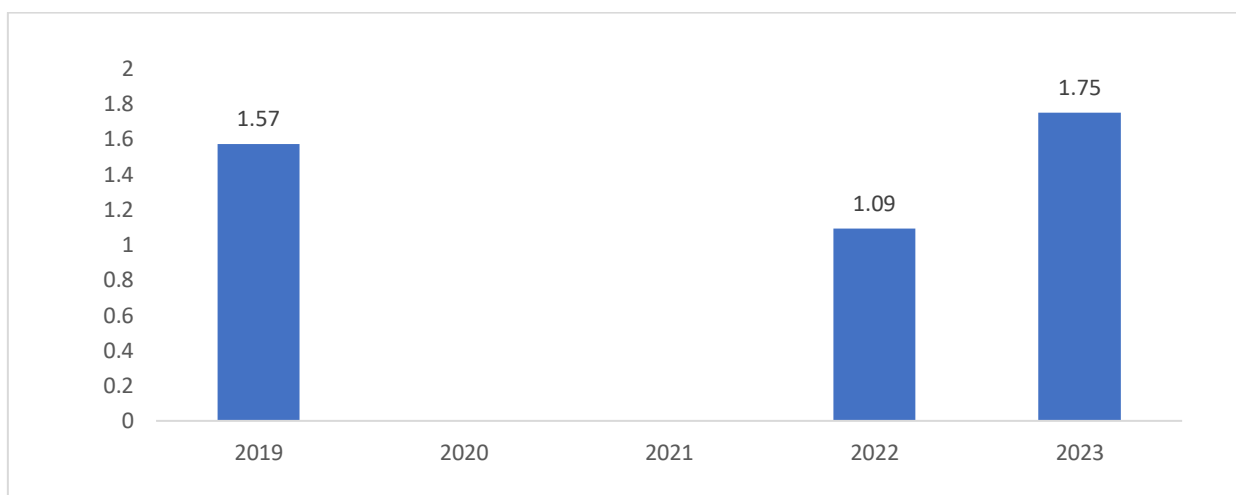


Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri, diolah

#### 2.4.4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Penerapan SPBE dalam aspek pemerintahan sebagai *key driver* transformasi digital bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik. Ujungnya adalah kepuasan masyarakat pengguna SPBE yang merupakan cerminan dari pemerintahan yang akuntabel dan layanan publik yang berkualitas. Paradigma SPBE ini bukan hanya semangat membangun aplikasi, melainkan moratorium pembangunan aplikasi dan mengutamakan peningkatan efektivitas pemanfaatan aplikasi yang telah beroperasi, mengonsolidasikan aplikasi menjadi platform digital terpadu baik di internal maupun antar-instansi, serta interoperabilitas data dan aplikasi melalui pemanfaatan Arsitektur SPBE.

Gambar 2.60.  
Indeks SPBE Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2022



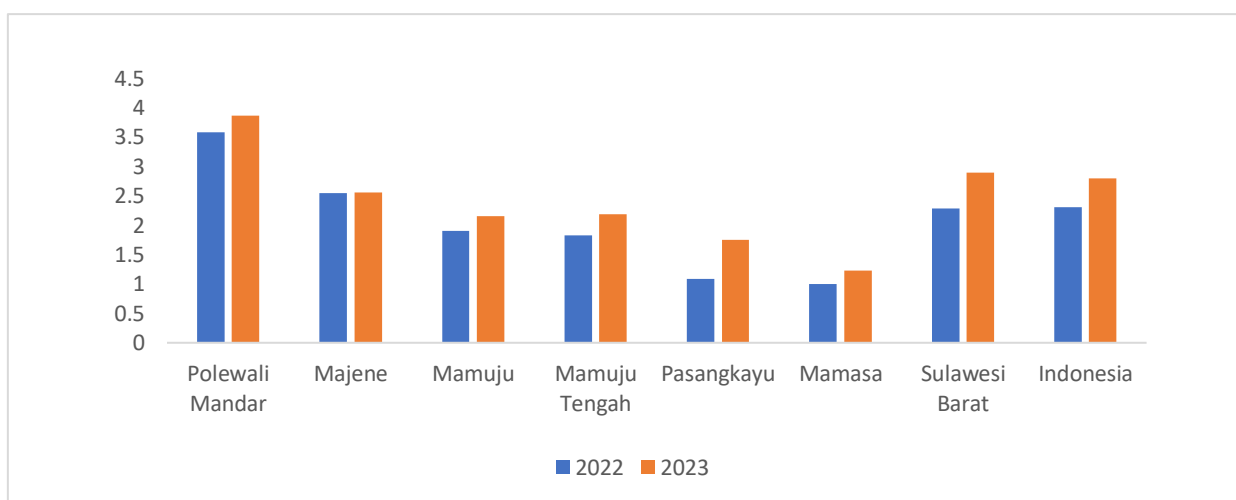
Sumber: Portal Satu Data Kementerian PAN RB, diolah

Pada tahun 2023, indeks SPBE Kabupaten Pasangkayu mencatatkan angka 1,75 poin, naik 0,66 poin dari tahun sebelumnya dan merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meskipun demikian, angka tersebut masih termasuk katageori “kurang”. Artinya tata kelola pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik di Kabupaten Pasangkayu masih termasuk kategori kurang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE di Kabupaten Pasangkayu masih perlu menjadi perhatian. Nilai indeks SPBE Kabupaten Pasangkayu masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional yang masing-masing mencatatkan angka 2,28 poin (Cukup) dan 2,30 poin (Cukup).

Pada level Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, indeks SPBE Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2023 menempati urutan kedua terendah, setelah Kabupaten Mamasa (1,23; Kurang). Tiga daerah dengan nilai indeks SPBE tertinggi adalah Kabupaten Polewali Mandar (3,86; Sangat Baik), Kabupaten Majene (2,56; Cukup), dan Kabupaten Mamuju (2,15; Cukup). Hanya satu daerah di Provinsi Sulawesi Barat yang memperoleh capaian SPBE dalam kategori sangat baik. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan SPBE belum optimal di banyak daerah di Provinsi Sulawesi Barat termasuk Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.61.

Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Pasangkayu dengan Kabupaten Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022



Sumber: Portal Satu Data Kementerian PAN RB, diolah

## 2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005 – 2025

### 2.5.1. Hasil Evaluasi Capaian RPJPD Periode 2005-2025

Penting dikemukakan bahwa RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2005-2025 disusun pada tahun 2013 dan kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Penyusunan RPJPD Kabupaten Pasangkayu mengalami keterlambatan dari yang seharusnya. Itu sebabnya, pentahapan pembangunan lima tahunan di dalam dokumen RPJPD hanya terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahapan pembangunan tahun 2011-2015, tahapan pembangunan tahun 2016-2021 dan tahapan pembangunan tahun 2021-2026.

Pada periode perencanaan 2011-2015, berbagai capaian pembangunan telah dihasilkan oleh Kabupaten Pasangkayu dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sarana dan prasarana wilayah, hingga pengembangan komoditas unggulan. Kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan selama periode perencanaan 2011-2015 mengalami peningkatan. APS pada kelompok usia SD meningkat dari 96,01 persen pada tahun 2011 menjadi 98,17 persen pada tahun 2015. Begitu juga untuk APS kategori usia SMP meningkat dari 83,06 persen pada tahun 2011 menjadi 89,49 persen pada tahun 2015, dan 16-18 tahun mewakili usia SMA juga meningkat dari 50,62 persen tahun 2011 menjadi 53,91 persen pada tahun 2014. Fasilitas pendidikan mengalami perbaikan berarti yang ditunjukkan oleh jumlah sekolah yang semakin bertambah. Pada tahun 2010, jumlah Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidayah (MI) tercatat 128 unit, meningkat menjadi 146 unit pada tahun 2015. Kemudian untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) jumlah sekolah meningkat sekitar 34,09 persen dari 44 unit pada tahun 2010 menjadi 59 unit pada tahun 2015. Kualitas pembelajaran juga mengalami perbaikan yang ditunjukkan oleh rasio guru terhadap murid yang semakin kecil. Rasio guru terhadap murid pada jenjang SD/MI dari 14,08 di tahun 2011 menjadi 13,90 tahun 2015, dan untuk jenjang SMP/MTs dari 14,75 tahun 2011 menjadi 12,63 pada tahun 2015.

Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan juga mengalami perbaikan. Pada tahun 2015 sudah tersedia 1 Rumah Sakit Umum, 15 Puskesmas, 40 Puskesmas Pembantu, 14 Polindes, 33 Poskesdes, 266 Posyandu, dan 14 Puskesmas Keliling. Kemudian tenaga kesehatan yang tersedia hingga tahun 2015 adalah 28 dokter dan 308 tenaga medis (perawat, bidan, apoteker dan farmasi, ahli gizi, teknisi, sanitasi, dan kesehatan masyarakat). Selanjutnya Angka Kematian Ibu (AKI) menurun dari 13 orang per 2.598 kelahiran hidup pada tahun 2012 menjadi 11 orang per 2.913 jumlah kelahiran hidup pada tahun 2014.

Pendapatan per kapita Kabupaten Pasangkayu selama periode 2011-2015 naik dari Rp 29,77 juta menjadi Rp 48,61 juta. Peningkatan pendapatan per kapita ini diikuti oleh penurunan angka kemiskinan dari 6 persen pada tahun 2010 menjadi 5 persen pada tahun 2015. Selanjutnya, sarana dan prasarana

wilayah terutama jalan mengalami kenaikan selama periode 2011-2015. Hingga tahun 2015, Kabupaten Pasangkayu telah membangun jalan kabupaten sepanjang 1.646,62 km<sup>2</sup>, meningkat 27,33 persen dibandingkan tahun 2011 (1.293,20 km<sup>2</sup>). Pada tahun 2015 terdapat tiga pelabuhan yang melayani kegiatan angkutan laut khusus yaitu Pelabuhan Tanjung Bakau, Pelabuhan Bone Manjeng dan Pelabuhan Cinoki.

Selanjutnya, dalam aspek pengembangan komoditas unggulan, Kabupaten Pasangkayu juga mencatatkan pencapaian berarti selama periode perencanaan 2011-2015. Produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya naik dari 5.557,3 ton pada tahun 2011 menjadi 10.143,8 ton pada tahun 2015. Produksi tanaman padi meningkat dari 16.112 ton pada tahun 2010 menjadi 28.799,00 ton pada tahun 2015. Sementara untuk produksi buah-buahan utama yang sekaligus menjadi unggulan Kabupaten Pasangkayu adalah jeruk manis telah memproduksi sebanyak 30.199 ton dengan luas areal tanam sebesar 794 Ha pada tahun 2015. Tanaman perkebunan yang banyak dikembangkan di Kabupaten Pasangkayu adalah kelapa sawit, kelapa dalam, dan kakao. Kemudian untuk ternak besar, yang paling banyak dipelihara masyarakat adalah sapi, yang mengalami kenaikan populasi dari 7.125 ekor pada tahun 2011 menjadi 8.628 ekor pada tahun 2015. Sedangkan ternak kecil paling banyak dipelihara adalah kambing, yang juga mengalami peningkatan populasi dari 4.959 ekor dari tahun 2011 menjadi 6.509 ekor di tahun 2015. Kemudian untuk jenis unggas yang dipelihara, didominasi oleh ayam yang juga mengalami peningkatan populasi dari 247.954 ekor pada tahun 2011 menjadi 260.670 ekor di tahun 2015.

Pada periode perencanaan tahun 2016–2021, untuk aspek pendidikan, sepanjang tahun 2016 hingga 2021, HLS (Harapan Lama Sekolah) Kabupaten Pasangkayu memang terlihat meningkat konsisten setiap tahun. Namun jika dicermati, butuh waktu lama bagi pemerintah daerah menaikkan angka HLS sebesar 1 tahun. Angka HLS sebesar 11,93 tahun 2020 menjelaskan bahwa penduduk yang masuk SD tahun 2020 kemungkinan hanya mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas II SMA atau tidak tamat SMA. Satu diantara banyak variabel yang menyebabkan lambatnya pembangunan pendidikan di Kabupaten Pasangkayu adalah tingginya angka putus sekolah.

Pada aspek kesehatan, dalam lima tahun terakhir, rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 100.000 penduduk di Kabupaten Pasangkayu secara umum menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2015, rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 100.000 penduduk tercatat sebesar 45, kemudian menurun menjadi 36 di tahun 2019. Artinya 36 Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu dapat melayani 100.000 penduduk. Jadi secara rata-rata, 1 Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu dapat melayani 2.814 penduduk. Penurunan rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 100.000 penduduk dipengaruhi oleh jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu yang menurun, sementara jumlah penduduk cenderung meningkat. Di Kabupaten Pasangkayu hanya terdapat 1 unit rumah sakit sepanjang tahun 2015-2019. Sementara permintaan untuk pelayanan kesehatan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pada tahun 2015, 1 unit rumah sakit harus melayani 156.464 penduduk, sementara di tahun 2019, naik menjadi 174.471 penduduk. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya fasilitas pelayanan kesehatan.

Pada aspek keamanan juga masih menjadi perhatian di Kabupaten Pasangkayu. Cakupan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dari tahun 2017-2019, persisten mencatatkan angka 0,005 persen. Hal ini menunjukkan masih rendahnya jumlah petugas linmas di Kabupaten Pasangkayu. Dalam aspek bantuan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), secara rata-rata, hanya sekitar 11,68 persen PMKS yang menerima bantuan selama lima tahun terakhir. Masih ada 89 persen PMKS yang tidak memperoleh bantuan sosial, padahal menjadi hak mereka.

Kemudian dalam mendukung pembiayaan pembangunan, kinerja investasi masih fluktuatif di Kabupaten Pasangkayu. Dalam lima tahun terakhir, jumlah investor berskala nasional (PMAD/PMA) menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2015, jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Pasangkayu mencapai 9 investor, naik menjadi 13 investor di tahun 2018, lalu menurun menjadi 11 investor di tahun 2019. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan daya tarik investasi di Kabupaten Pasangkayu.

Ketersediaan layanan infrastruktur dasar juga masih menjadi tantangan di Kabupaten Pasangkayu. Selama periode perencanaan 2016-2021, cakupan layanan telekomunikasi mencatatkan angka 0,13 persen pada tahun 2019.



Capaian ini masih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2019, yakni sebesar 0,25 persen. Sementara itu, persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2015, persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon di Kabupaten Pasangkayu mencatat angka 51,97 persen, meningkat menjadi 53,46 persen di tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan masyarakat dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi semakin meningkat. Meskipun demikian capaian pada tahun 2019 masih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 53,48 persen.

Dari tahun 2017-2019, cakupan ketersediaan rumah layak huni menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2017, cakupan ketersediaan rumah layak huni mencatatkan angka 61,36 persen, meningkat menjadi 63,9 persen di tahun 2019. Angka ini menunjukkan bahwa ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Pasangkayu belum memenuhi SPM. Faktor utama yang menyebabkan belum tercapainya cakupan ketersediaan rumah layak dengan SPM yakni, ketersediaan lahan. Selama lima tahun terakhir, rasio jaringan irigasi di Kabupaten Pasangkayu mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, rasio irigasi di Kabupaten Pasangkayu hanya sebesar 2,78 persen. Kemudian, mengalami peningkatan berarti di tahun berikutnya yaitu sebesar 19,54 persen. Angka tersebut terus mengalami peningkatan pada tahun 2017, 2018, dan 2019, menjadi berturut-turut sebesar 20,50 persen, 20,84 persen, dan 21,49 persen. Peningkatan ini didorong oleh pemerintah dalam program perluasan jaringan irigasi. Selama lima tahun terakhir, persentase penduduk berakses air minum mengalami tren peningkatan yang cukup berarti.

Pada tahun 2015, hanya seperempat penduduk yang memiliki akses air minum, kemudian meningkat menjadi 30 persen pada tahun 2016. Peningkatan terus berlanjut pada tahun 2017 dan 2018, berturut-turut sebesar 32 persen dan 35 persen. Kemudian, terjadi peningkatan yang cukup berarti pada tahun 2019 menjadi 49,75 persen. Peningkatan ini menunjukkan semakin luasnya akses penduduk untuk memperoleh air minum. Lalu, sebagian besar rumah tangga, berdasarkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pasangkayu, belum tergolong sebagai pengguna listrik. Tahun 2018, hanya

49,79 persen rumah tangga di daerah ini yang menggunakan listrik, sementara 50,21 persen lainnya belum menggunakan listrik. Mereka yang belum mendapat akses terhadap listrik umumnya menggunakan pelita atau obor untuk kehidupan sehari-hari.

Terakhir pada periode RPJPD 2021-2026, berbagai indikator kinerja pembangunan menunjukkan capaian yang membaik. IPM meningkat dari 68,03 poin pada tahun 2021, naik menjadi 68,61 pada tahun 2022. Pendapatan per kapita meningkat dari Rp 64,18 juta pada tahun 2021 menjadi Rp 66,38 juta pada tahun 2022. Lalu angka pengangguran turun dari 3,13 persen menjadi 2,38 persen. Selain itu, juga tata kelola pemerintahan mengalami perbaikan dari IRB dengan kategori C pada tahun 2021 menjadi kategori CC pada tahun 2022. Indeks kualitas lingkungan hidup naik dari 75,92 poin pada tahun 2021 menjadi 76,77 poin pada tahun 2022. Beberapa indikator kinerja pembangunan sebaliknya justru mengalami penurunan seperti laju pertumbuhan ekonomi dan indeks inovasi daerah.

### **2.5.2. Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Periode 2005-2025**

Apabila dicermati capaian kinerja indikator makro per periode RPJMD, maka terlihat adanya peningkatan kinerja dari waktu ke waktu untuk beberapa indikator, sedangkan beberapa indikator lainnya cenderung berfluktuasi. Angka kemiskinan dan pendapatan per kapita merupakan indikator yang secara konsisten mengalami perbaikan. Adapun indikator lainnya seperti IPM, TPT, laju pertumbuhan ekonomi, dan indeks gini cenderung berfluktuasi selama periode RPJPD 2005-2025.

Tabel 2.9.  
Capaian Kinerja Indikator Makro Kabupaten Pasangkayu Periode 2005-2025

No	Indikator	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	2011	2015	2021	Capaian Pada Tahun Berjalan (2022)	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD 2021-2026
1	IPM	64,48	69,55	64,69	68,03	68,61	71,53
2	Angka Kemiskinan	11,04%	6%	5%	5%	5,09%	3,50%
3	TPT	4,79%	4,22%	1,44%	3,11%	2,38%	1,61%

4	Pertumbuhan Ekonomi	5,90%	13,56%	8,61%	3,84%	-0,12%	9,84%
5	Pendapatan Per Kapita (Juta)	Rp5,92	Rp25,17	Rp48,39	Rp64,17	Rp66,39	Rp76,40
6	Indeks Gini			0,33	0,3	0,32	0,300

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Pasangkayu Periode 2005-2025

### 2.5.3. Rekomendasi Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, setidaknya terdapat 6 (enam) rekomendasi yang perlu ditindak lanjuti dalam penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Pasangkayu periode berikutnya (2025-2045) yakni:

1. Mengingat RPJPD merupakan dokumen yang bersifat visioner, maka dokumen RPJPD Kabupaten Pasangkayu periode berikutnya seharusnya hanya memuat hal-hal yang bersifat mendasar (kinerja dampak/*impact based*). Ini diperlukan untuk memberi keleluasaan dan fleksibilitas rencana sehingga dapat memberi ruang yang cukup bagi penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.
2. Dari segi substansi, dokumen RPJPD Kabupaten Pasangkayu periode berikutnya harus menekankan dan berfokus pada upaya mendorong perekonomian daerah, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, mengurangi ketimpangan pendapatan, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.
3. Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, sejumlah upaya yang direkomendasikan untuk dilaksanakan di masa depan, antara lain meningkatkan akses penduduk pada layanan pendidikan dan kesehatan, menekan angka putus sekolah, meningkatkan angka melanjutkan pendidikan, dan memperbaiki kualitas gizi anak.
4. Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, sejumlah upaya yang direkomendasikan untuk dilaksanakan di masa depan, antara lain pemenuhan wirausaha baru yang mandiri, peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi rumah tangga kategori pendapatan menengah bawah, meningkatkan peluang kesempatan kerja, memperbanyak penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja, pengawasan dan hubungan industrial, dan pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat.

5. Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, berbagai upaya yang direkomendasikan untuk dilaksanakan di masa depan, antara lain, meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur, memperluas pemanfaatan *e-government*, dan memfasilitas pengembangan inovasi daerah.
6. Untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup, berbagai upaya yang direkomendasikan untuk dilaksanakan di masa depan, antara lain, meningkatkan kualitas air dan tanah, serta mendorong aktivitas ekonomi yang rendah emisi karbon.

## **2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik**

### **2.6.1. Tren Demografi**

Penduduk memiliki peran penting dalam pembangunan. Sebagai aktor pembangunan, penduduk berperan sebagai sumber daya yang bisa melakukan kegiatan ekonomi, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, sehingga diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, penduduk juga menjadi objek pembangunan, dimana keberadaannya perlu memperoleh perhatian, terutama dalam hal pemenuhan layanan dasar. Bahkan, salah satu indikator untuk mengukur capaian pembangunan tercermin pada kualitas penduduknya.

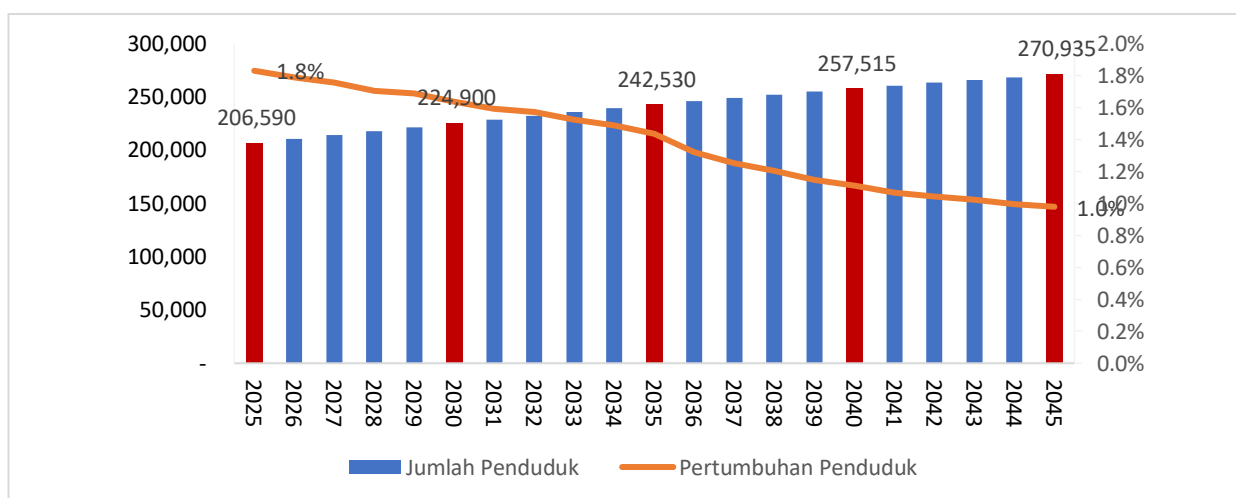
Dengan peran dan posisi tersebut, kependudukan merupakan salah satu bagian sentral dalam perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Menurut UU 25/2004, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber manusia yang tersedia. Sementara itu, pembangunan dimaknai sebagai segala upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernegara, salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, salah satu tujuan dari perencanaan pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan penduduk tanpa terkecuali. Mengingat peran sentral kependudukan dalam perencanaan pembangunan, maka perlu dipahami kondisi kependudukan di masa mendatang. Untuk itu, dibutuhkan potret demografi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, agar

kebijakan yang direncanakan di masa mendatang bisa merespon kondisi kependudukan di masa tersebut.

Salah satu indikator penting kependudukan adalah jumlah dan pertumbuhan penduduk. Secara umum, khususnya di negara berkembang, jumlah penduduk akan mengalami peningkatan, terutama karena masih adanya kelahiran dan semakin panjangnya rata-rata usia penduduk. Migrasi juga bisa menjadi faktor penentu jumlah penduduk, tetapi sifatnya sangat dinamis, sebab penduduk bisa keluar masuk dari dan ke suatu wilayah tergantung pada berbagai faktor, seperti ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Secara alamiah, jumlah penduduk akan terus meningkat karena dua faktor, yaitu tingginya kelahiran dan rendahnya kematian. Namun, pertumbuhan penduduk setiap tahun bisa menurun. Artinya, tambahan jumlah penduduk di setiap tahun akan mengalami pengurangan dari waktu ke waktu.

Gambar 2.62.

Proyeksi Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 – 2045



Sumber: Data 2025-2035 dari BPS, data 2036-2045 dari Proyeksi Tim

Tabel 2.10.

Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 – 2045

Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
	2025	2030	2035	2040	2045
199.150	206.590	224.900	242.530	257.515	270.935

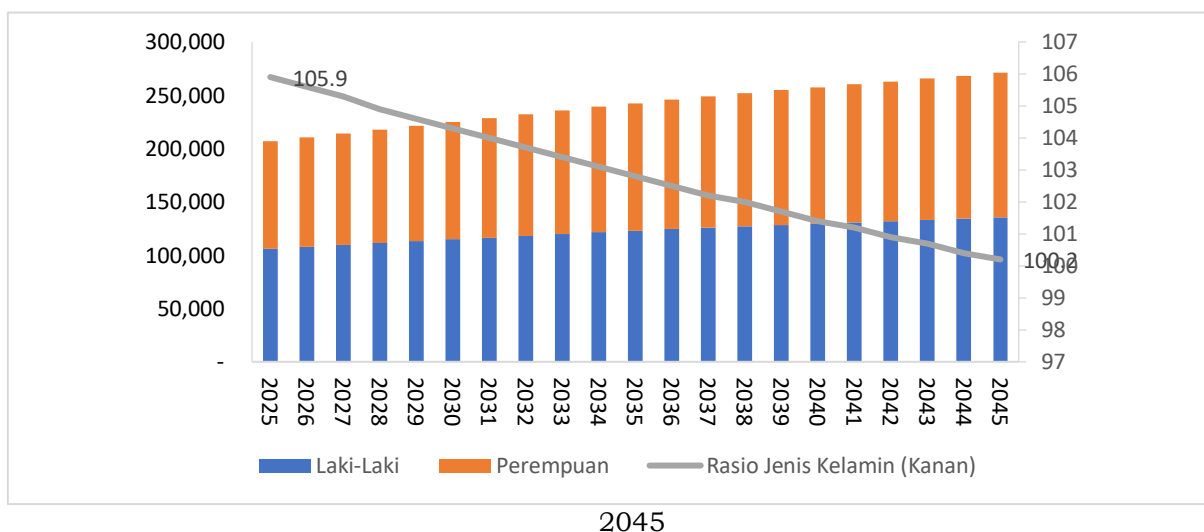
Sumber: Data 2025 – 2035 dari BPS, data 2036 – 2045 dari hasil proyeksi Tim Penyusun

Hal ini bisa dilihat pada hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Pasangkayu yang mengalami kenaikan dari 206.590 jiwa di tahun 2025 menjadi 270.935 jiwa di tahun 2045. Dalam 20 tahun, jumlah penduduk Kabupaten Pasangkayu akan meningkat sebanyak 64.345 jiwa atau sebanyak 3.217 orang

per tahun. Sebagai perbandingan, kenaikan jumlah penduduk antar sensus penduduk tahun 2010 dengan 2020 sebesar 54.492 jiwa atau sebesar 5.449 jiwa per tahun. Lebih lanjut, laju pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Pasangkayu mengalami penurunan dari 1,8 persen di tahun 2025 menjadi 1,0 persen di tahun 2045. Penurunan laju pertumbuhan menunjukkan tambahan jumlah penduduk per tahun mengalami penurunan. Hal ini merupakan fenomena yang lumrah seiring dengan semakin berkurangnya tingkat kelahiran.

Gambar 2.63.

Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 –



Sumber: Data 2025-2035 dari BPS, data 2036-2045 dari Proyeksi Tim

Jika dilihat sebaran per jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki cenderung lebih tinggi dibanding perempuan pada awal periode proyeksi, yaitu sebesar 105,9 (dibulatkan 106) di tahun 2025. Ini berarti, terdapat 106 penduduk laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Namun, rasio jenis kelamin mengalami penurunan dari waktu ke waktu hingga diperkirakan mencapai 100,2 di tahun 2045. Ini berarti, jumlah perempuan dan laki-laki hampir sama di periode akhir proyeksi. Tren rasio jenis kelamin yang semakin mendekati 100 ini mengindikasikan bahwa kedudukan anak laki-laki dan perempuan setara dalam rumah tangga. Di masa lalu, orang tua cenderung memiliki anak laki-laki lebih banyak dibanding perempuan karena anak laki-laki biasanya lebih bisa diandalkan untuk membantu kegiatan pertanian/perkebunan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, jumlah anak yang dimiliki dalam rumah tangga cenderung berkurang dan biasanya hanya sebanyak 2 orang anak dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Tabel 2.11.

Proyeksi Jumlah Penduduk per Jenis Kelamin di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 – 2045

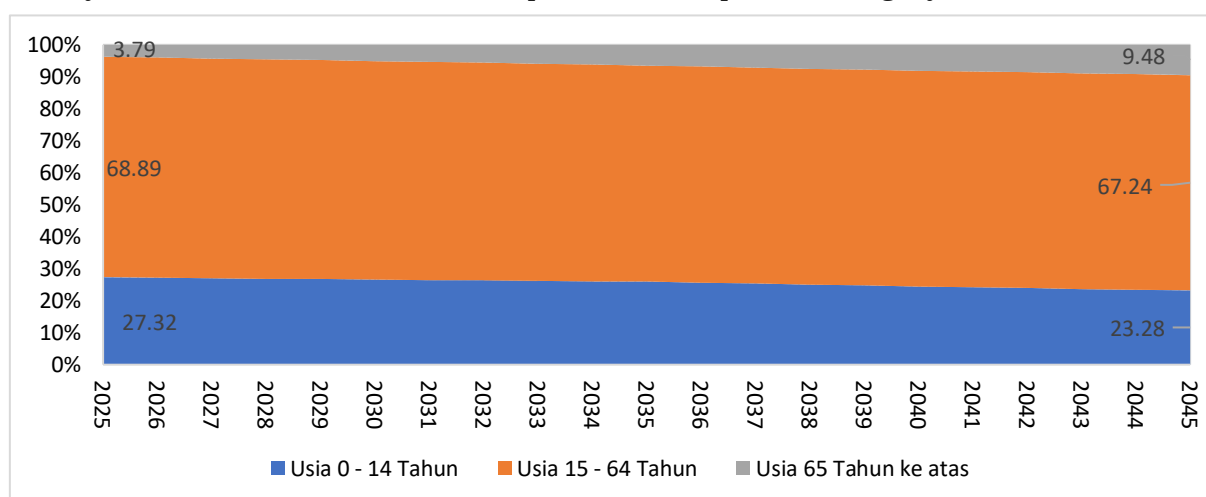
Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	102.790	106.270	114.830	122.950	129.684	135.587
Perempuan	96.360	100.320	110.070	119.580	127.832	135.347
Rasio	106,7	105,9	104,3	102,8	101,4	100,2

Sumber: Data 2025–2035 dari BPS, data 2036–2045 dari hasil proyeksi Tim Penyusun

Sementara itu, struktur usia penduduk dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu usia 0–14 tahun, usia 15–64 tahun, dan usia 65 tahun ke atas. Tren struktur usia penduduk di Kabupaten Pasangkayu selama 20 tahun ke depan ditandai dengan semakin tingginya proporsi penduduk yang berusia lanjut usia (lansia) atau berusia 65 tahun ke atas, naik dari 3,79 persen di tahun 2025 menjadi 9,48 persen di tahun 2045. Adapun dua kelompok lainnya, yaitu kelompok penduduk usia 0–14 tahun dan usias 15–64 tahun justru memiliki proporsi yang cenderung menurun. Fenomena peningkatan proporsi penduduk lansia terjadi karena rata-rata penduduk hidup lebih lama seiring dengan peningkatan standar hidup dan perbaikan layanan kesehatan. Sementara itu, proporsi penduduk usia anak semakin berkurang karena sejumlah faktor, diantaranya seperti tingginya biaya pengasuhan anak dan orientasi karier dari pasangan usia muda.

Gambar 2.64.

Proyeksi Jumlah Berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 – 2045



Sumber: Data 2025-2035 dari BPS, data 2036-2045 dari Proyeksi Tim



Tabel 2.12.  
Proyeksi Jumlah Penduduk per Kelompok Usia di Kabupaten Pasangkayu 2025 – 2045

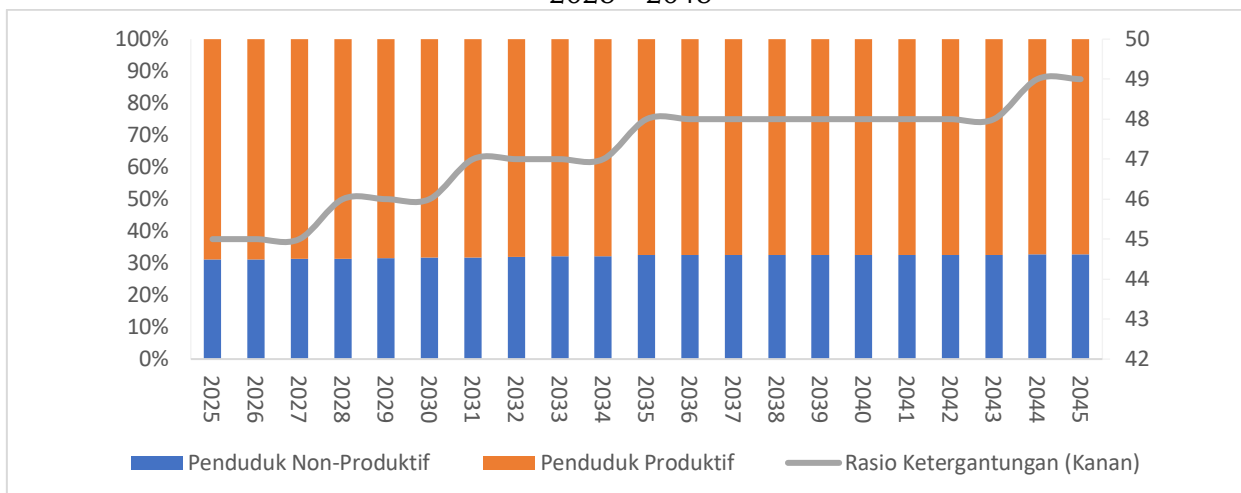
Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	55.530	56.450	59.870	62.960	62.936	63.073
15-64 Tahun	136.860	142.320	153.630	163.810	173.857	182.166
> 65 Tahun	6.760	7.820	11.400	15.760	20.722	25.695
Angka Ketergantungan	46	45	46	48	48	49

Sumber: Data 2025 – 2035 dari BPS, data 2036 – 2045 dari hasil proyeksi Tim Penyusun

Peningkatan proporsi penduduk lansia, yang dibarengi dengan penurunan proporsi penduduk usia anak dan dewasa berimplikasi pada semakin tingginya angka ketergantungan. Rasio ini diperoleh dari hasil bagi antara jumlah penduduk non-produktif dengan jumlah penduduk produktif. Penduduk non-produktif merupakan kelompok penduduk yang berusia 0 – 14 tahun dan 65 tahun ke atas, sedangkan penduduk produktif merupakan kelompok penduduk yang berusia 15 – 64 tahun. Penduduk produktif lebih tinggi kontribusinya terhadap perekonomian sebab mereka masih aktif melakukan kegiatan produksi, sehingga dapat berpengaruh terhadap penciptaan nilai tambah. Adapun penduduk non-produktif biasanya hanya melakukan kegiatan konsumsi, bahkan biasanya membutuhkan pelayanan khusus, seperti penduduk lansia yang membutuhkan pengobatan tertentu atau penduduk usia anak yang membutuhkan layanan pendidikan spesifik. Proyeksi menunjukkan peningkatan jumlah penduduk non-produktif lebih tinggi dibanding peningkatan penduduk non-produktif, sehingga rasio ketergantungan meningkat. Pada tahun 2025, rasio ketergantungan mencapai 45, artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung 45 penduduk non-produktif. Rasio ini meningkat menjadi 49 di tahun 2045, dimana 100 penduduk produktif menanggung 49 penduduk non-produktif. Semakin tingginya rasio ketergantungan ini dikontribusikan oleh peningkatan proporsi penduduk yang lansia.

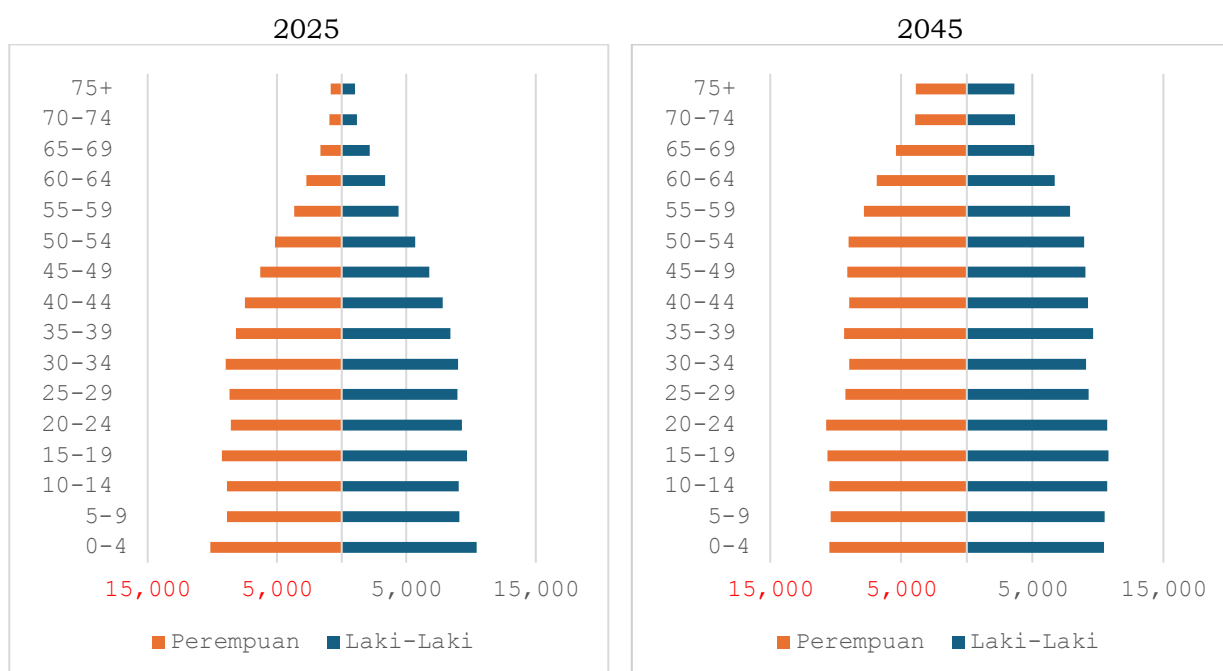


Gambar 2.65.  
Proyeksi Jumlah Berdasarkan Kelompok Produktif dan Non-Produktif Kabupaten Pasangkayu, 2025 – 2045



Sumber: Data 2025-2035 dari BPS, data 2036-2045 dari Proyeksi Tim

Gambar 2.66.  
Piramida Penduduk Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 dan 2045



Sumber: Data 2025-2035 dari BPS, data 2036-2045 dari Proyeksi Tim

Meskipun demikian, Kabupaten Pasangkayu masih dalam fase bonus demografi, yaitu fase dimana proporsi penduduk produktif masih lebih tinggi dibanding penduduk non-produktif. Pada tahun 2025, proporsi penduduk produktif sebesar 68,89 persen. Angka ini menunjukkan jumlah penduduk produktif lebih besar daripada penduduk non-produktif. Namun, angka ini terus menurun hingga menjadi 67,22 persen di tahun 2045.

Seperti diuraikan sebelumnya bahwa komposisi penduduk usia lansia semakin meningkat seiring waktu. Hal ini terlihat pada piramida penduduk, dimana kelompok penduduk usia tua semakin banyak jumlahnya di tahun 2045. Pada tahun 2025, kelompok usia lansia (65 tahun ke atas) berkontribusi paling rendah di antara kelompok usia lainnya. Meskipun masih tetap paling rendah di tahun 2024, namun selisih antara kelompok lansia dengan usia muda semakin kecil. Hal ini mengindikasikan terjadinya penuaan penduduk di Kabupaten Pasangkayu dalam periode proyeksi. Sementara itu, jumlah penduduk usia anak hingga dewasa (kurang dari 65 tahun) cenderung mirip distribusinya untuk seluruh kelompok usia dan jenis kelamin.

#### **2.6.2. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik**

Seiring pertambahan jumlah penduduk, kebutuhan terhadap sarana dan prasarana layanan dasar juga akan semakin meningkat. Tentu, pemerintah, baik pusat maupun daerah, bertugas untuk menyediakan layanan tersebut. Agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi secara layak, pemerintah perlu merencanakan penyediaan layanan dasar, seperti perumahan, air bersih, persampahan, kesehatan, dan pendidikan. Meskipun layanan tersebut tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi perannya sangat vital dan menjadi penentu sejauh mana kuantitas dan kualitas layanan publik yang tersedia.

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Tempat tinggal yang layak bisa menentukan banyak hal, terutama kualitas kesehatan dan pendidikan. Namun seiring waktu, akses terhadap kepemilikan rumah semakin sulit, terutama di wilayah perkotaan. Hal ini karena keterbatasan lahan yang membuat harga properti semakin tinggi, sehingga masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah sulit mengakses rumah layak. Terkadang, mereka justru tinggal di permukiman kumuh atau bahkan terlantar di jalanan karena tidak punya tempat tinggal. Untuk itu, pemerintah harus mengambil peran untuk memastikan ketersediaan rumah tinggal yang layak bagi warga-nya, terutama untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah. Penyediaan rumah ini tidak hanya penting saat ini, tapi juga perlu diantisipasi kebutuhan di masa mendatang seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.

Proyeksi kebutuhan rumah di Kabupaten Pasangkayu selama 20 tahun ke depan bisa diperoleh dari perkiraan jumlah penduduk. Data Susenas Maret 2023 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Kabupaten Pasangkayu sebanyak 4 orang per rumah tangga. Sementara itu, statistik juga menunjukkan bahwa sebanyak 84,22 persen rumah tangga di Kabupaten Pasangkayu yang memiliki rumah sendiri. Dengan asumsi bahwa satu rumah tangga sama dengan satu unit rumah, maka bisa diproyeksikan kebutuhan rumah di Kabupaten Pasangkayu berdasarkan proyeksi jumlah penduduk hingga tahun 2045. Jumlah rumah yang dibutuhkan diperkirakan sebanyak 51.658 unit di tahun 2025, 56.225 unit di tahun 2030, 60.633 unit di tahun 2035, 64.379 unit di tahun 2040, dan 67.734 unit di tahun 2045.

Tabel 2.13.  
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal di Kabupaten Pasangkayu

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (orang)	199.150	206.590	224.900	242.530	257.515	270.935
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	49.788	51.648	56.225	60.633	64.379	67.734

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun

Salah satu kebutuhan penting dalam rumah tangga adalah ketersediaan air minum. Tentunya air minum ini dipasok dari air bersih. Data Susenas 2023 menunjukkan bahwa sekitar 52 persen sumber air minum di Kabupaten Pasangkayu berasal dari air isi ulang, 24 persen dari sumur terlindungi, dan 11,5 persen dari sumur bor/pompa. Lebih lanjut, kebutuhan air minum untuk penduduk dapat diproyeksikan dengan menggunakan standar kebutuhan air minum per kapita yang layak dan dianjurkan, yaitu sebesar 2 liter per hari untuk penduduk dewasa (15 tahun ke atas) dan 1,5 liter per hari untuk penduduk anak-anak (0-14 tahun). Dengan asumsi tersebut, maka diperkirakan kebutuhan air minum untuk penduduk di Kabupaten Pasangkayu sebesar 384.955 liter/hari di tahun 2025, 419.865 liter/hari di tahun 2030, 453.580 liter/hari di tahun 2035, 483.562 liter/hari di tahun 2040, dan 510.332 liter/hari di tahun 2045.

Tabel 2.14.  
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Penduduk di Kabupaten Pasangkayu

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (orang)	199.150	206.590	224.900	242.530	257.515	270.935
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari)	370.535	384.955	419.865	453.580	483.562	510.332

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun

Selain air minum, setiap hari rumah tangga juga membutuhkan energi listrik. Berbagai aktivitas penduduk membutuhkan listrik sebagai sumber energi. Jika energi tidak tersedia secara memadai, maka hal ini akan menjadi hambatan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas, terutama yang terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan kata lain, listrik sangat penting perannya dalam mendukung kegiatan ekonomi rumah tangga, yang pada akhirnya berujung pada peningkatan kesejahteraan. Data Susenas 2023 di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan sebanyak 95,84 persen rumah tangga telah mengakses listrik dari PLN, sedangkan sisanya 3,74 persen mengakses listrik dari non-PLN dan 0,43 persen tidak mengakses listrik sama sekali. Lebih lanjut, dengan menggunakan standar dari SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, rata-rata kebutuhan listrik per jiwa sebesar 450 VA, sehingga dapat diproyeksikan jumlah daya listrik yang dibutuhkan oleh rumah tangga. Dengan asumsi tersebut, maka diperkirakan kebutuhan sambungan listrik di Kabupaten Pasangkayu sebesar 92.966 kVA di tahun 2025, 101.205 kVA di tahun 2030, 109.139 kVA di tahun 2035, 92.966 kVA di tahun 2040, dan 121.921 kVA di tahun 2045.

Tabel 2.15.  
Proyeksi Kebutuhan Sambungan Listrik Rumah Tangga di Kabupaten Pasangkayu

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	199.150	206.590	224.900	242.530	206.590	270.935
Jumlah Rumah	49.788	51.648	56.225	60.633	64.379	67.734
Proyeksi Kebutuhan Listrik (kVA)	89.618	92.966	101.205	109.139	92.966	121.921

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, produksi sampah rumah tangga juga akan meningkat. Limbah sampah rumah tangga memang tidak semuanya dibuat di Tempat Pembuatan Sementara atau Tempat Pembuangan

Akhir, terutama di wilayah perdesaan. Namun untuk estimasi jumlah yang diproduksi dan kebutuhan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA), maka diasumsikan bahwa seluruh sampah rumah tangga dibuat di TPST/TPA. Asumsi ini juga mempertimbangkan bahwa sebaiknya sampah rumah tangga memang dibuat di tempat yang telah disediakan, bukan justru dibuang di sembarang tempat yang berpotensi mengakibatkan pencemaran lingkungan, seperti dibakar atau dibuang di sungai.

Tabel 2.16.  
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Pasangkayu

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	199.150	206.590	224.900	242.530	257.515	270.935
Jumlah Rumah	49.788	51.648	56.225	60.633	64.379	67.734
Proyeksi Timbunan Sampah (Ton/Hari)	124	129	141	152	161	169
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	7	7	8	8	9	9

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun

Jika diasumsikan bahwa setiap rumah tangga menghasilkan 2,5 kg sampah per hari, maka bisa diproyeksikan jumlah sampah dari hasil perkalian antara jumlah rumah tangga dengan jumlah produksi sampah per hari. Hasil proyeksi menunjukkan jumlah sampah yang diproduksi rumah tangga sebesar 129 ton per hari di tahun 2025, lalu meningkat menjadi 141 ton per hari di tahun 2030, 152 ton per hari di tahun 2035, 161 ton per hari di tahun 2040, dan 169 ton per hari di tahun 2045. Lebih lanjut, jika diasumsikan setiap rumah tangga membuat sampah di tempat pembuangan yang selanjutnya dibuang di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA), maka diperlukan ketersediaan TPST untuk menampung produksi sampah rumah tangga dengan kapasitas yang sesuai. Jika massa sampah dikonversi dalam bentuk kubik dengan paramater konversi 0,37 m<sup>3</sup> untuk setiap satu ton sampah, maka jumlah TPST yang berkapasitas 50 m<sup>3</sup> per hari di tahun 2025 sebanyak 7 lokasi, lalu meningkat menjadi 9 lokasi di tahun 2045.

Aspek penting lainnya yang perlu diantisipasi adalah penyediaan layanan kesehatan melalui ketersediaan berbagai fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit dan puskesmas. Rasio ideal ketersediaan rumah sakit adalah 1 per 100.000 penduduk. Dengan demikian, jumlah rumah sakit yang dibutuhkan di tahun 2025 hingga tahun 2035 sebanyak dua unit, sedangkan di tahun 2040 hingga 2045 dibutuhkan tiga unit rumah sakit. Adapun terkait ketersediaan puskesmas, idealnya setiap kecamatan terdapat satu unit puskesmas. Di Kabupaten Pasangkayu, seluruh kecamatan telah memiliki minimal satu puskesmas. Bahkan terdapat tiga kecamatan yang memiliki dua unit puskesmas, yaitu Kecamatan Sarudu, Kecamatan Baras, dan Kecamatan Pasangkayu. Oleh karena itu, jumlah Puskesmas diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan jumlah Puskesmas hingga tahun 2045. Bahkan jika menggunakan standar ideal ketersediaan puskesmas, yaitu satu unit per 30.000 penduduk, maka jumlah puskesmas yang dibutuhkan hingga tahun 2045 hanya sebanyak 9 unit atau masih lebih rendah dibanding jumlah puskesmas yang tersedia saat ini. Namun, karena pertimbangan aksesibilitas, maka memang sudah semestinya setiap kecamatan tersedia minimal satu puskesmas.

Tabel 2.17.  
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pasangkayu

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	199.150	206.590	224.900	242.530	257.515	270.935
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
- Rumah Sakit	1	2	2	2	3	3
- Puskesmas	15	15	15	15	15	15

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun

Terakhir, pelayanan publik yang juga sangat penting adalah ketersediaan fasilitas pendidikan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan layanan pendidikan akan semakin meningkat. Ketentuan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, menyebutkan bahwa untuk setiap satu fasilitas pendidikan, idealnya dapat melayani jumlah penduduk tertentu, seperti TK sebanyak 1.250 orang, SD sebanyak 1.600 orang, SMP sebanyak 4.800 orang, dan SMA sebanyak 4.800 orang. Dengan menggunakan standar ini, maka jumlah TK yang dibutuhkan

naik dari 165 di tahun 2025 menjadi 217 di tahun 2045. Sementara itu, jumlah SD/MI telah tercukupi hingga periode lima tahun pertama, tetapi perlu ditingkatkan di periode lima tahun kedua, yaitu menjadi 141 unit sekolah. Adapun jumlah SMP/MTS telah mencukupi hingga periode tahun pertama hingga ketiga, sedangkan pada periode berikutnya perlu ditingkatkan jumlahnya. Terakhir, jumlah SMA/SMK/MA perlu memperoleh perhatian, sebab di dibutuhkan hingga 43 jenjang SMA sederajat hingga tahun 2025, tapi sampai ini masih sebanyak 13 unit jenjang SMA di Kabupaten Pasangkayu.

Tabel 2.18.  
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Pasangkayu

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	199.150	206.590	224.900	242.530	257.515	270.935
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
TK	153	165	180	194	206	217
SD/MI	136	129	141	152	161	169
SMP/MTS	52	43	47	51	54	56
SMA/MA/SMK	13	43	47	51	54	56

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun

## 2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pusat wilayah atau dalam literatur ilmu ekonomi dikenal dengan istilah kutub pertumbuhan (*growth pole*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sebuah lokasi geografis yang dapat menarik industri, investasi, dan pekerja. Gagasan kutub pertumbuhan dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi serentak di semua tempat, tetapi berkumpul di titik atau pusat pertumbuhan dengan intensitas yang bervariasi. Perroux menyatakan bahwa industri penggerak, yang ditandai oleh pertumbuhan tinggi, teknologi canggih, dan inovasi, dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi melalui hubungannya dengan industri lain. Keterkaitan antar industri merupakan ide utama dalam teori kutub pertumbuhan.

Untuk konteks dokumen perencanaan, spesifik RPJPD Kabupaten Pasangkayu, kutub pertumbuhan telah didesain dalam dokumen RTRW melalui pemanfaatan ruang atau pola ruang. Pemerintah daerah telah membagi kawasan-kawasan tertentu, yang bisa menjadi kutub pertumbuhan yang



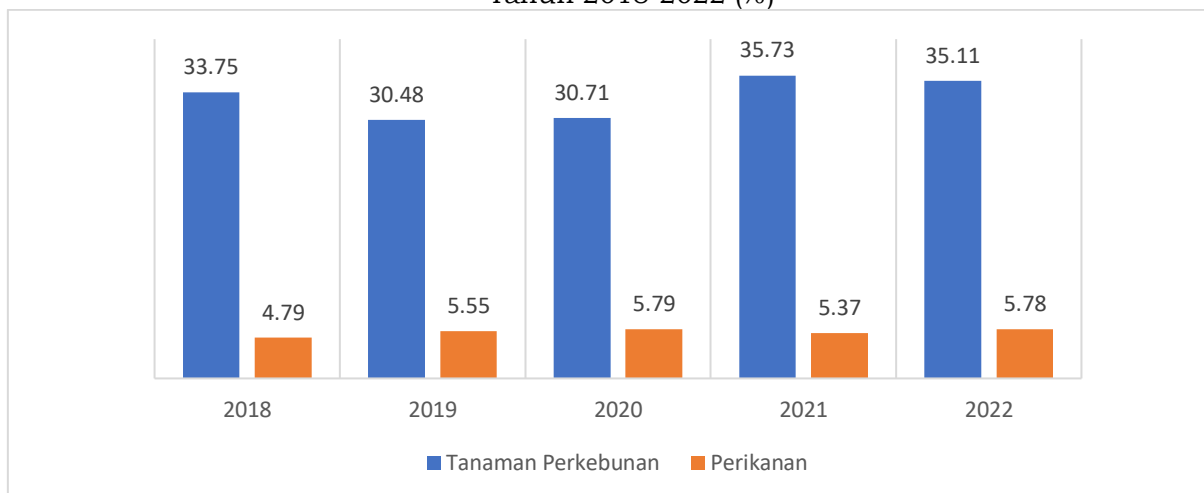
akhirnya dapat mendorong transformasi ekonomi Kabupaten Pasangkayu. Dalam kutub pertumbuhan, ada segelintir industri yang dapat menjadi stimulus bagi perkembangan industri atau sektor lain yang dikenal dengan istilah "industries motrice". Industri ini mampu berinovasi, merangsang kegiatan ekonomi lain, dan memiliki dominasi dalam struktur ekonomi regional. Di sisi lain, "industries motrice" mengacu pada industri-industri lain yang dipengaruhi oleh industri pendorong tersebut. Oleh karena itu, desain kutub pertumbuhan mengacu pada keterkaitan sektor-sektor ekonomi secara spasial berdasarkan kawasan-kawasan tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam dokumen RTRW.

Dalam dokumen RTRW Revisi Kabupaten Pasangkayu, dijelaskan bahwa penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan daerah yang produktif, maju dan mandiri utamanya berbasis perkebunan dan perikanan menuju masyarakat yang sejahtera. Dari tujuan penataan ruang Kabupaten Pasangkayu, ada dua sub sektor yang menjadi sektor inti untuk membangun kutub pertumbuhan yaitu sektor perkebunan dan perikanan. Dua sub sektor tersebut relevan dijadikan sebagai basis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu karena kontribusinya terhadap PDRB cukup dominan. Sepanjang tahun 2018 hingga 2022, kontribusi sub sektor tanaman perkebunan terhadap PDRB Pasangkayu rerata lebih dari 30 persen, sementara perikanan di atas 5 persen.

Berdasarkan data BPS, ada tiga komoditas perkebunan yang ditanam di atas lahan yang relatif lebih luas dibandingkan komoditas lain yaitu kelapa sawit, kakao, dan kelapa. Luas areal tanaman perkebunan di Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2022 terdiri dari kelapa sawit seluas 59.933 hektar dari perkebunan rakyat. Di samping Kelapa Sawit, luas area Perkebunan yang mempunyai kontribusi yang paling besar adalah Kakao/Coklat seluas 12.804 hektar dari perkebunan rakyat, serta Kelapa dengan seluas 4.753 hektar. Komoditas kelapa sawit ditanam merata di semua kecamatan, begitupun dengan komoditas kelapa. Tapi untuk kelapa, ada dua kecamatan yang memiliki area tanam lebih luas dibandingkan kecamatan lain yaitu Kecamatan Bambalamotu dan Bambaira. Pada komoditas kakao, ditanam dengan luasan relatif merata di semua kecamatan.



Gambar 2.67.  
Kontribusi Sub Sektor Perkebunan dan Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

Potensi perikanan Kabupaten Pasangkayu juga cukup besar, dilihat dari hasil produksi. Data BPS mencatat, Kabupaten Pasangkayu punya potensi di perikanan tangkap. Tahun 2022, Kabupaten Pasangkayu menghasilkan 8.406,31 ton ikan dari perikanan tangkap. Setidaknya ada 12 komoditas perikanan tangkap yang dihasilkan Kabupaten Pasangkayu dengan total nilai produksi mencapai Rp 179,85 miliar tahun 2022. Komoditas perikanan tangkap dengan kuantitas produksi terbanyak adalah Ikan Cakalang sebanyak 1.650,05 ton dan Ikan Tongkol Krai sebanyak 1.511,21 ton. Meski kuantitas produksinya lebih rendah dari Ikan Tongkol Krai, tapi Ikan Madidihang memiliki nilai produksi yang lebih tinggi. Ikan Cakalang mencatat nilai produksi sebesar Rp 33.001 juta, kemudian Ikan Madidihang Rp 30.009,60 juta, dan Ikan Tongkol Krai senilai Rp 27.201,78 juta.

Selain komoditas Perkebunan dan perikanan, pemerintah daerah juga memiliki potensi lain yang bisa menjadi “mesin pertumbuhan” yaitu komoditas tanaman pangan, komoditas hortikultura, pertambangan, dan sektor pariwisata. Semua potensi tersebut telah dipetakan oleh pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam pola ruang dan kawasan strategis. Kawasan strategis dalam suatu kabupaten adalah bagian yang mendapat prioritas dalam perencanaan tata ruang karena memiliki dampak signifikan pada aspek ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam, teknologi tinggi, dan lingkungan hidup di wilayah kabupaten tersebut. Untuk kepentingan penentuan pusat pertumbuhan,

kawasan strategis yang dipilih adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.19.  
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Ikan (Ton) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022

No	Jenis Ikan	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Juta Rupiah)
1	Cakalang	1.650,05	33.001,00
2	Madidihang	750,24	30.009,60
3	Tongkol Krai	1.511,21	27.201,78
4	Layang	715,10	17.162,40
5	Ikan Lainnya	1.403,67	15.440,37
6	Tongkol Kromo	456,19	8.211,42
7	Kerapu Sunu	132,23	5.950,35
8	Kembung	202,02	5.050,50
9	Kakap Merah	111,40	5.013,00
10	Kuwe	105,40	4.743,00
11	Tembang	229,29	3.897,93
12	Banyar	166,48	3.829,04
13	Teri	198,50	3.573,00
14	Tenggiri	67,95	2.718,00
15	Ikan Baronang	40,14	1.605,60
16	Selar	71,11	1.564,42
17	Belanak	101,50	1.522,50
18	Biji Nangka	36,67	1.466,80
19	Kakap Putih	31,90	1.339,80
20	Kerapu Karang	28,75	1.150,00
21	Kerapu Bebek	24,54	981,60
22	Peperek	72,72	872,64
23	Baronang Kuning	20,07	802,80
24	Bawal Putih	41,03	779,57
25	Ikan Terbang	48,10	769,60
26	Kerong-Kerong	21,70	347,20
27	Rejung	21,50	236,50
28	Cendro	16,80	235,20
29	Ikan Layaran	15,93	223,02
30	Julung-Julung	11,10	155,40

Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

Kawasan pertumbuhan ekonomi ditentukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

- a) Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b) Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- c) Memiliki potensi ekspor;
- d) Memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
- e) Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- f) Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
- g) Ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
- h) Memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
- i) Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- j) Memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- k) Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
- l) Memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
- m) Memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Penentuan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada gambar peta kawasan strategis Kabupaten Pasangkayu berdasarkan RTRW revisi.



- b) Kawasan pengembangan minapolitan di wilayah Kecamatan Bambaira, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Baras, Kecamatan Dapurang, Kecamatan Lariang, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Sarjo, Kecamatan Sarudu, dan Kecamatan Tikke Raya;
- c) Kawasan pengembangan perkebunan di wilayah Kecamatan Bambaira, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Baras, Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan Dapurang, Kecamatan Duripoku, Kecamatan Lariang, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Sarudu, dan Kecamatan Tikke Raya; dan
- d) Kawasan pengembangan transmigrasi di wilayah Kecamatan Baras dan Kecamatan Sarudu.
- e) Kawasan pengembangan perikanan berada di wilayah Kecamatan Tikke Raya, Lariang, Baras, Sarudu, Dapurang, Pasangkayu, Pedongga, Bambaira, dan Bambalamotu.

Sementara untuk kawasan pariwisata, ada 40 objek pariwisata yang dianggap oleh pemerintah Kabupaten Pasangkayu memiliki potensi untuk dikembangkan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.20.  
Kawasan Pariwisata Kabupaten Pasangkayu Berdasarkan RTRW Revisi

No	Nama Objek Wisata	Jenis Objek Wisata	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Pantai Barat	Wisata Bahari	Kec. Dapurang	Desa Dapurang
2	Pantai Kuma	Wisata Bahari	Kec. Sarudu	Desa Sarudu
3	Pantai Cinoki	Wisata Bahari	Kec. Sarudu	Desa Sarudu
4	Air Terjun Saptanajaya	Wisata Alam	Kec. Sarudu	Desa Bulu Mario
5	Wisata Bahari Bonemanjeng	Wisata Bahari	Kec. Sarudu	Desa Doda
6	Ai Merah	Wisata Alam	Kec. Duripoku	Desa Sipakainga
7	Pantai Batu Kapuna	Wisata Bahari	Kec. Baras	Desa Bulu Parigi
8	Pantai Salukaili	Wisata Bahari	Kec. Baras	Kelurahan Baras
9	Gunung Matan Tasi	Wisata Alam	Kec. Baras	Desa Motu
10	Goa Kapaha	Wisata Alam	Kec. Baras	Desa Motu
11	Goa Lambara	Wisata Alam	Kec. Baras	Desa Motu
12	Air Terjun Harapan	Wisata Alam	Kec. Bulu Taba	Desa Bukit Harapan
13	Telaga Bukit Harapan	Wisata Alam	Kec. Bulu Taba	Desa Bukit Harapan
14	Air Terjun Ho'	Wisata Alam	Kec. Bulu Taba	Desa Ompi

No	Nama Objek Wisata	Jenis Objek Wisata	Kecamatan	Desa/Kelurahan
15	Air Terjun Arjuna Kastabuana	Wisata Alam	Kec. Bulu Taba	Desa Kastabuana
16	Wisata Mangrove Tikke	Wisata Bahari	Kec. Tikke Raya	Desa Tikke
17	Pantai Batu Oge	Wisata Bahari	Kec. Pedongga	Desa Batu Oge
18	Batu Kapal Martasari	Wisata Alam	Kec. Pedongga	Desa Martasari
19	Goa Lawa	Wisata Alam	Kec. Pasangkayu	Desa Gunung Sari
20	Pantai Koa-Koa	Wisata Bahari	Kec. Bambalamotu	Desa Polewali
21	Komunitas Adat To' Bunggu (Pakawa)	Wisata Budaya	Kec. Pasangkayu	Desa Pakawa
22	Pantai Pasangkayu	Wisata Bahari	Kec. Pasangkayu	Kelurahan Pasangkayu
23	Pantai Anging Mamiri	Wisata Bahari	Kec. Pasangkayu	Kelurahan Pasangkayu
24	Tanjung Babia	Wisata Bahari	Kec. Pasangkayu	Kelurahan Pasangkayu
25	Tanjung Bakau	Wisata Bahari	Kec. Pasangkayu	Desa Ako
26	Wisata Mangrove	Wisata Bahari	Kec. Bambalamotu	Desa Pangiang
27	Air Terjun Salu Wu	Wisata Alam	Kec. Bambalamotu	Desa Kalola
28	Pantai Sikente	Wisata Bahari	Kec. Bambalamotu	Desa Pangiang
29	Goa Gumbasalu Sungai Tapalili	Wisata Alam	Kec. Bambalamotu	Desa Kalola
30	Wisata Religi	Wisata Budaya	Kec. Bambalamotu	Kelurahan Bambalamotu
31	Air Terjun Batu Bete	Wisata Alam	Kec. Bambalamotu	Desa Wulai
32	Pantai Randomayang	Wisata Bahari	Kec. Bambalamotu	Desa Randomayang
33	Komunitas Adat To' Bunggu (Wulai) Topo Da'a	Wisata Budaya	Kec. Bambalamotu	Desa Wulai
34	Air Terjun Nagaya Kalukunangka	Wisata Alam	Kec. Bambaira	Desa Kaluku Nangka
35	Telaga Ape	Wisata Alam	Kec. Bambaira	Desa Bambaira
36	Goa Ape	Wisata Alam	Kec. Bambaira	Desa Bambaira
37	Pantai Tumpaure	Wisata Bahari	Kec. Bambaira	Desa Tumpaure
38	Pantai Maleo	Wisata Bahari	Kec. Sarjo	Desa Letawa
39	Pantai Balabonda	Wisata Bahari	Kec. Sarjo	Desa Sarjo
40	Pantai Khayalan Baliri	Wisata Bahari	Kec. Sarjo	Desa Sarjo

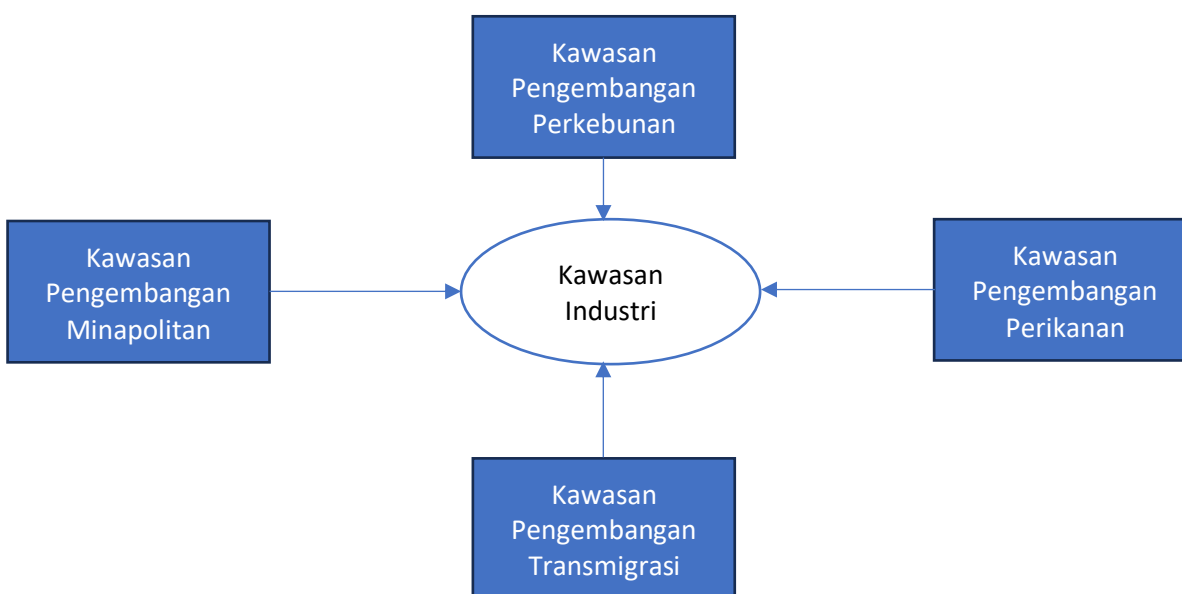
Sumber: RTRW Revisi Kabupaten Pasangkayu

Selain mempertimbangkan dokumen RTRW, penentuan pusat pertumbuhan wilayah juga mengacu pada dokumen sektoral, salah satunya rencana pembangunan industri Kabupaten Pasangkayu. Rencana

pembangunan industri bersifat mengikat karena ditetapkan oleh Perda No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2018-2038. Dalam dokumen tersebut, pemerintah daerah menetapkan dua industri unggulan yang akan dikembangkan sepanjang periode 2018-2038 yaitu Industri Pangan dan Industri Hulu Agro. Kedua industri ini masih relevan atau sejalan dengan pembagian kawasan strategis di RTRW.

Berdasarkan dokumen RTRW revisi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pasangkayu, maka dibuat skema pusat pertumbuhan wilayah sebagai berikut:

Gambar 2.69.  
Skema Keterkaitan Antara Kawasan Strategis di Kabupaten Pasangkayu



Sumber: Tim Penyusun

Skema keterkaitan antar kawasan strategis mengacu pada teori kutub pertumbuhan yang dijelaskan di awal tulisan, bahwa untuk mendorong kutub pertumbuhan, perlu dibangun keterkaitan antar kutub pertumbuhan. Dalam konteks ini yang dimaksud kutub pertumbuhan adalah kawasan-kawasan strategis. Skema keterkaitan antar kawasan menunjukkan bahwa empat kawasan strategis berfungsi sebagai penghasil komoditas yang masih perlu dinaikkan nilai tambahnya. Misalnya, kawasan perikanan menghasilkan beberapa komoditas perikanan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, komoditas perikanan harus dinaikkan nilai tambahnya, dan agar nilai tambahnya naik maka komoditas yang dihasilkan menjadi bahan baku bagi industri yang berada di kawasan industri. Dalam dokumen Rencana

Pembangunan Industri, industri pangan yang akan dibangun adalah Ikan awet (beku, kering, dan asap) dan fillet, serta industri Aneka olahan ikan (carragenan, minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya). Begitupun dengan tiga kawasan lainnya, komoditas yang masih mentah, perlu diolah menjadi barang setengah atau barang jadi di dalam kawasan industri. Sedangkan untuk kawasan pariwisata, tak berkaitan dengan kawasan industri karena karakteristiknya berbeda.

Untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasangkayu, ada beberapa indikasi program/proyek strategis yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang. Indikasi program/proyek strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21.  
Indikasi Program/Proyek Strategis Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasangkayu

Kawasan Strategis	Indikasi Program/Proyek Strategis
Kawasan Industri	Penyusunan dokumen Rencana Induk (Master Plan), Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).
	Penyusunan Perencanaan Detail Engineering Design (DED)
	Pembangunan infrastruktur penunjang (jalan, air bersih, listrik, pelabuhan, telekomunikasi).
	Pemberian insentif pajak dan retribusi daerah kepada investor
	Peningkatan kualitas SDM untuk memenuhi kebutuhan industri
Kawasan Perikanan	Mendirikan pusat penelitian yang fokus pada inovasi dalam budidaya ikan, teknologi pengolahan, dan manajemen sumber daya perikanan.
	Menciptakan teknologi baru dan praktik budidaya yang efisien.
	Menyelenggarakan pelatihan bagi petani ikan dan pekerja perikanan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam manajemen budidaya, teknologi modern, dan praktek keberlanjutan.
	Membangun sistem budidaya ikan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi.
	Membangun fasilitas pengolahan ikan modern dengan standar keamanan pangan tinggi.
	Mengembangkan strategi pemasaran untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan lokal dan ekspor.
	Menerapkan program sertifikasi keberlanjutan untuk petani ikan lokal.
	Memberikan insentif kepada petani yang mempraktikkan budidaya ikan berkelanjutan.
	Membangun kemitraan dengan perusahaan untuk meningkatkan akses pasar dan pembiayaan proyek.
	Pendampingan bagi petani



Kawasan Strategis	Indikasi Program/Proyek Strategis
Kawasan Minapolitan	Menyusun rancang bangun/ <i>blue print</i> Minapolitan;
	Pembangunan infrastruktur
	Menyediakan bibit berkualitas
	Menghubungkan antara kawasan minapolitan dengan kawasan industri
	Meningkatkan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam budidaya komoditas perikanan dan pengolahan komoditas perikanan
	Penyediaan teknologi budidaya dan pengolahan
	Pengadaan dan distribusi pakan murah berkualitas, pabrik pakan penyangga produksi;
	Bantuan teknis dan permodalan, lembaga keuangan, dan pengembangan investasi; dan
	Pendampingan usaha dan bantuan teknis di sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran unggulan berupa penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis.
Kawasan Transmigrasi	Penyediaan lahan untuk kawasan transmigrasi
	Pengembangan kewirausahaan untuk para transmigran
	Pembangunan infrastruktur dasar
	Pengembangan komoditas unggulan kawasan
	Pengembangan UMKM di kawasan transmigrasi
Kawasan Pariwisata	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah
	Pembangunan infrastruktur (aksesibilitas) pariwisata
	Pengembangan atraksi wisata
	Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata
	Penigkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia
	Meningkatkan kualitas kelembagaan pariwisata

Sumber: Tim Penyusun

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan dasar dalam menentukan visi dan misi jangka panjang Kabupaten Pasangkayu. Rumusan permasalahan Pembangunan daerah merupakan simpulan dari hasil analisis data tentang indikator Pembangunan daerah yang masih dianggap perlu dilakukan perbaikan dalam jangka panjang. Berikut beberapa rumusan masalah Pembangunan daerah di Kabupaten Pasangkayu;

#### **3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah**

- **Melambatnya Pertumbuhan ekonomi.**

Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasangkayu disebabkan oleh pandemi COVID-19. Krisis di sektor kesehatan ini memaksa hampir seluruh negara di dunia untuk membatasi aktivitas ekonomi guna mengerem laju penyebaran virus tersebut. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu mengalami kontraksi hingga menjadi minus 2,73 persen. Meskipun sempat menguat di tahun 2021 dengan pertumbuhan 3,8 persen, perekonomian Kabupaten Pasangkayu kembali melambat hingga tumbuh sebesar minus 0,12 persen di tahun 2022. Padahal di waktu yang sama, pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Sulawesi Barat tetap tumbuh positif masing-masing sebesar 5,3 persen dan 2,3 persen. Lebih lanjut, tren perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasangkayu sebenarnya telah terjadi sebelum pandemi COVID-19. Setelah sempat mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 16,4 persen di tahun 2014,

pertumbuhan ekonomi terus menurun hingga menjadi 5,28 persen di tahun 2019. Perlambatan ini dikontribusikan oleh melambatnya pertumbuhan sektor-sektor penopang, khususnya pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 2022, sektor ini berkontribusi sebesar 48 persen terhadap PDRB, sedikit lebih rendah dibanding tahun 2010 yang mencapai 52 persen. Penurunan kontribusi sektor pertanian sejalan dengan perlambatan pertumbuhan yang terjadi, dimana sektor ini tumbuh sebesar 13,3 persen di tahun 2011, sedangkan di tahun 2022 hanya bertumbuh hampir 1 persen. Selama kurun waktu 2011 – 2016, rata-rata pertumbuhan sektor pertanian sebesar 7,23 persen, sedangkan rata-rata 2017 – 2022 hanya bertumbuh 2,68 persen. Perlambatan yang terjadi erat kaitannya dengan penurunan produksi dan luas lahan perkebunan kelapa sawit. Meskipun produktivitas kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu masih paling tinggi di Provinsi Sulawesi Barat, tetapi terjadi penurunan signifikan pada volume produksi kelapa sawit dari 185.729 ton di tahun 2016 menjadi 138.568 ton di tahun 2021, sedangkan luas lahan perkebunan sawit juga berkurang dari 54.761 ha di tahun 2016 menjadi 36.671 ha di tahun 2021. Fluktuasi harga kelapa sawit merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penurunan tersebut.

- **Rendahnya tingkat partisipasi penduduk dalam pasar tenaga kerja.**

Kondisi ini tercermin pada indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang cenderung fluktuatif dan relatif lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Bila selama 18 tahun terakhir dibagi ke dalam tiga periode, maka rata-rata TPAK sebesar 65,41 persen pada periode 2005 – 2010, 71,64 persen pada periode 2011 – 2016, dan 69,53 persen pada periode 2017 – 2022. Hal ini menunjukkan rata-rata TPAK yang tinggi terjadi pada periode 2011 – 2016, dimana pada periode tersebut rata-rata pertumbuhan ekonomi juga tergolong tinggi, yaitu sebesar 10,72 persen. Adapun rata-rata pertumbuhan pada periode 2005 – 2010 dan 2017 – 2022 masing-masing hanya sebesar 8,58 persen dan 2,84 persen. Hal ini mengindikasikan adanya korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan TPAK. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang berimplikasi pada terbukanya peluang kerja yang lebih banyak, sehingga akan mendorong partisipasi masyarakat untuk memasuki

pasar tenaga kerja. Sejalan dengan hal tersebut, perlambatan pertumbuhan yang terjadi di Kabupaten Pasangkayu dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana diuraikan di bagian sebelumnya, utamanya karena perlambatan pada sektor penopang PDRB, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan yang terutama terjadi pada periode 2017 – 2022.

- **Rendahnya kualitas pembangunan manusia.**

Secara relatif, IPM Kabupaten Pasangkayu kedua tertinggi setelah Kabupaten Mamuju dengan angka 68,61. Tapi angka tersebut masih termasuk dalam kategori IPM “sedang”, hanya satu kategori diatas IPM “rendah”. Hal itu disebabkan oleh tiga komponen penyusun IPM berkembang cukup lambat, terutama pada aspek pendidikan dan kesehatan. Selain itu, walau setiap tahun angka absolutnya naik, tapi tren pertumbuhan IPM Kabupaten Pasangkayu cenderung turun dalam 13 tahun terakhir. Tahun 2011, IPM Kabupaten Pasangkayu pernah naik 1,53 persen, kenaikan tertinggi dalam 13 tahun terakhir karena setelah itu Kabupaten Pasangkayu tak pernah lagi melampaui atau mencapai angka yang sama. Bahkan selama periode ini, ada beberapa tahun tertentu IPM Kabupaten Pasangkayu tumbuh di bawah 1 persen yaitu di tahun 2014, 2016, 2017, 2020, 2021, dan 2022. Lambatnya perkembangan usia harapan hidup (UHH) menjadi salah satu penyebab. Butuh waktu lima tahun bagi Kabupaten Pasangkayu untuk menaikkan UHH dari 64 ke 65 tahun, butuh waktu tiga tahun untuk naik dari 65 ke 66 tahun, dan kemungkinan untuk naik dari 66 ke 67 tahun juga butuh waktu tiga tahun. Penyebabnya ada di tujuh variabel yang berpengaruh terhadap UHH dan masih menjadi persoalan di Kabupaten Pasangkayu yaitu rumah tangga dengan sumber air minum bersih, rumah tangga yang memiliki akses air minum layak, rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar, morbiditas, perempuan yang pernah kawin berumur 10 tahun ke atas dengan umur perkawinan pertama  $\leq 16$  tahun, perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan, dan perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Dari aspek pendidikan, angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kabupaten Pasangkayu masih relatif rendah. HLS Kabupaten Pasangkayu paling rendah

di Provinsi Sulawesi Barat, sementara RLS-nya masih tertinggal dari banyak daerah di Indonesia dengan capaian 8,69 tahun. Ada Sembilan variable yang menentukan cepat-lambatnya perkembangan HLS dan RLS Kabupaten Pasangkayu yaitu angka partisipasi sekolah 7-12 tahun, angka partisipasi sekolah 13-15 tahun, angka partisipasi sekolah 16-18 tahun, angka partisipasi sekolah 19-24 Tahun, angka tidak bersekolah 7-12 tahun, angka tidak bersekolah 13-15 tahun, angka tidak bersekolah 16-18 tahun, angka melanjutkan/transisi ke SMP/Sederajat, angka melanjutkan/transisi ke SMA/ sederajat. Misalnya, angka partisipasi sekolah, terutama untuk usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun masih perlu diakselerasi karena keduanya masih rendah dan secara relatif dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sulawesi Barat juga masih tertinggal. Dimensi standar hidup layak juga masih perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan IPM Kabupaten Pasangkayu. Meski menjadi daerah dengan standar hidup layak tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat, tapi tren pertumbuhannya sepanjang tahun 2010 hingga 2022 cenderung melambat. Pertumbuhan tertinggi pernah dicapai di tahun 2021 sebesar 6,38 persen, setelah itu anjlok dan hanya mampu tumbuh paling tinggi diangka 4 persen. Tahun 2021, bahkan mengalami kontraksi ke -0,35 persen.

- **Meningkatnya angka kemiskinan.**

Kemiskinan masih perlu menjadi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu karena dalam dua dekade terakhir jumlah penduduk miskin cenderung meningkat, meski tingkat kemiskinannya menurun. Berbanding terbalik dengan tren P0, pertumbuhan jumlah penduduk miskin Kabupaten Pasangkayu menunjukkan kecenderungan naik dalam 16 tahun terakhir. Setelah turun 15,60 persen tahun 2007 dan 24,46 persen tahun 2008, di tahun 2009 dan 2010, jumlah penduduk miskin bertambah masing-masing 2,73 persen dan 17,65 persen, tertinggi selama kurun waktu 16 tahun terakhir. Beberapa tahun kemudian, pertumbuhan jumlah penduduk miskin menurun di beberapa tahun tertentu, tapi penurunannya tidak sebanding dengan kenaikannya, sehingga menyebabkan tren pertumbuhannya cenderung naik. Tiga tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kabupaten Pasangkayu bertambah 7,14 persen tahun 2020, kemudian 7,30 persen

tahun 2021, dan tahun 2022 mencapai 9,03 persen. Kecenderungan tren kenaikan pertumbuhan penduduk miskin di Kabupaten Pasangkayu disebabkan oleh kenaikan garis kemiskinan tidak sejalan dengan kenaikan pendapatan rata-rata penduduk. Dari tahun 2006 hingga 2022, garis kemiskinan Kabupaten Pasangkayu naik 145,54 persen, yang sebelumnya Rp. 164.668 per bulan per kapita menjadi Rp. 404.318 per bulan per kapita, sementara daya beli yang diukur dengan pengeluaran per kapita riil disesuaikan hanya tumbuh 33,59 persen dari Rp. 8,48 juta ke Rp. 11,33 juta. Hal itu disebabkan oleh upah yang diterima pekerja, terutama pekerja formal cenderung subsisten, sehingga jika terjadi guncangan seperti inflasi harga makanan, maka pengeluaran mereka dengan mudah terjerembab dibawah garis kemiskinan. Selain masalah upah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu yang melambat dalam satu dekade terakhir juga menjadi salah satu penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin Kabupaten Pasangkayu. Ketergantungan perekonomian Kabupaten Pasangkayu terhadap komoditas kelapa sawit berpotensi meningkatkan laju pertumbuhan penduduk miskin karena komoditas ini rentan terhadap *shock*, terutama dari faktor eksternal.

- **Rendahnya kualitas lingkungan hidup.**

Pembangunan yang berwawasan lingkungan masih perlu menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu masih tertinggal dibanding dua daerah lainnya seperti Mamuju dan Mamuju Tengah. Degradasi hutan dan deforestasi tidak terhindarkan akibat penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2022 masih kategori sedang (65,43), lebih rendah dibandingkan dengan Mamuju (83,25/baik), Mamuju Tengah (81,05/baik) dan Mamasa (77,41/baik). Selain itu, pencemaran air dan kelangkaan air juga menjadi persoalan lingkungan lainnya yang kemudian mengancam akses air bersih dan layak bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Kualitas Air yang masih tergolong sedang dengan angka 61,52 dan masih lebih rendah dibandingkan dengan Mamuju Tengah (63,33). Rendahnya kualitas air ini dipengaruhi oleh tingginya eksploitasi tanah khususnya air tanah bagian dalam, berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang secara alamiah menjadi penyaring sekaligus penampung

untuk air hujan, serta banyaknya limbah atau buangan industri dan rumah tangga yang polutif. Berikutnya permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh Kabupaten Pasangkayu yakni pengelolaan sampah. Pada tahun 2022, tercatat 84,46 persen sampah yang belum tertangani. Masih lemahnya ekosistem antara bank sampah atau tempat pembuangan sampah dengan pelaku masyarakat dan para pendaur ulang menjadi salah satu penyebab. Selain itu, hal tersebut juga dipengaruhi oleh masih kurangnya tenaga kebersihan, termasuk ketersediaan serta kelayakan armada dan kontainer sampah yang masih rendah.

- **Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan.**

Tata kelola yang baik diperlukan dalam upaya memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang prima. Selama ini tata kelola masih menjadi salah satu kendala di dalam mencapai pembangunan yang inklusif. Kendala ini dipengaruhi oleh fenomena inefisiensi birokrasi serta pemerataan pelayanan publik yang prima. Tercermin dari Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2022 masih berada di angka 50,38 atau termasuk kategori masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar (CC, cukup/memadai). Capaian ini juga masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Barat dengan kategori baik (B, baik) dan Kabupaten Polewali Mandar (B, baik). Selanjutnya, masih rendahnya kualitas pelayanan publik juga menjadi indikasi tata kelola yang belum baik. Terbukti dari Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2021 yang termasuk kategori C- atau cukup (dengan catatan), dan capaian ini relatif tertinggal dibandingkan Provinsi (B-, baik dengan catatan) serta kabupaten lainnya. Rendahnya kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh masih rendahnya kualitas berbagai aspek seperti kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi masih perlu perbaikan berarti. Berikutnya, Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Pasangkayu tahun 2022 masih termasuk kategori CC (cukup/memadai), tertinggal dibandingkan Provinsi (B) dan Kabupaten lainnya seperti Polewali Mandar (BB), Mamuju (B), dan Majene (B). Artinya



akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pasangkayu masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar.

### **3.2. Isu-Isu Strategis**

#### **3.2.1. Isu Strategis Global**

##### **A. Perubahan Iklim (Cuaca Ekstrem)**

Laporan *The Global Risks Report 2022 17<sup>th</sup> Edition* yang diterbitkan oleh *World Economic Forum (WEF)* menyebutkan isu perubahan iklim sebagai salah satu ancaman warga dunia. Hal itu disebabkan oleh dampak perubahan iklim bisa menyebar ke banyak aspek kehidupan manusia dan akhirnya menghambat pembangunan, termasuk di Kabupaten Pasangkayu. Menurut Greenpeace, penyebab utama perubahan iklim adalah pembakaran bahan bakar fosil - seperti batu bara, minyak, dan gas - untuk menghasilkan energi dan menggerakkan transportasi yang serangkai dengan aktivitas manusia lainnya, seperti menebang hutan dan pertanian, hal ini menghasilkan polusi penangkap panas yang disebut gas rumah kaca ke atmosfer, yang memanaskan planet dan mengganggu iklim.

Dampak perubahan iklim pada berbagai sektor masyarakat saling terkait. Kekeringan dapat merugikan produksi pangan dan kesehatan manusia. Banjir dapat menyebabkan penyebaran penyakit dan kerusakan pada ekosistem dan infrastruktur. Masalah kesehatan manusia dapat meningkatkan kematian, mempengaruhi ketersediaan makanan, dan membatasi produktivitas pekerja. Dampak perubahan iklim terlihat di setiap aspek kehidupan manusia. Itu sebabnya pemerintah Kabupaten Pasangkayu harus mengantisipasi potensi meluasnya dampak negatif dari perubahan iklim.

Salah satu potensi dampak negatif yang akan dirasakan oleh Kabupaten Pasangkayu terhadap perubahan iklim adalah penurunan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Sebagai daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Pulau Sulawesi, perekonomian Kabupaten Pasangkayu sangat tergantung pada produktivitas komoditas kelapa sawit. Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa pertanian merupakan salah satu sektor yang paling terdampak perubahan iklim, tak terkecuali pertanian komoditas perkebunan, termasuk kelapa sawit. Dalam buku yang disusun oleh Iswanto, dkk berjudul Dampak



Perubahan Iklim dan Fenomena El Nino Terhadap Sub Sektor Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kopi, dan Kakao), dijelaskan bahwa meningkatnya suhu global akan mengakibatkan terjadinya perubahan pola tekanan dan sirkulasi udara. Laju penguapan pada akhirnya dapat mengakibatkan pergeseran musim hujan maupun musim kemarau. Tanaman perkebunan seperti kopi, karet, kakao, dan kelapa sawit sangat tergantung pada sinar matahari, tanah, udara dan air. Kondisi alam ini akan terdampak dengan adanya fenomena El Nino karena komoditas tersebut membutuhkan curah hujan yang cukup dengan intensitas cahaya optimal. Hal serupa juga dikemukakan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS). Fenomena ENSO negatif/El Niño dapat menyebabkan kekeringan jangka panjang pada tanaman kelapa sawit, yang akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan serta menurunkan produktivitas. Kekeringan lebih sering terjadi di wilayah selatan dan timur Indonesia. Perubahan iklim akan membuat Sumatera lebih basah di masa depan, sedangkan wilayah Indonesia lainnya akan lebih kering.

Tak hanya pertanian, hampir semua aspek dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Pasangkayu akan menerima dampak perubahan iklim. Jika tak diantisipasi, maka Kabupaten Pasangkayu akan menanggung beban pembangunan di masa depan yang sulit untuk dihadapi ditengah keterbatasan sumberdaya. Itu sebabnya isu perubahan iklim mesti menjadi perhatian dalam desain pembangunan jangka panjang Kabupaten Pasangkayu karena pengaruhnya sangat signifikan terhadap pembangunan daerah. Harapannya, dengan memasukkan isu perubahan iklim, semua pelaku pembangunan, tak hanya pemerintah daerah, memberikan perhatian serius terhadap isu perubahan iklim.

## **B. Digitalisasi**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang begitu pesat mendorong dunia saat ini memasuki digitalisasi. Digitalisasi ini dapat menjadi peluang dan tantangan bagi perkembangan perekonomian daerah ke depan. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi bergerak menuju digitalisasi dan otomatisasi. Harapannya akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari proses produksi, begitu halnya aktivitas konsumen menjadi mudah dan nyaman. Dalam proses pembangunan

diberbagai bidang, digitalisasi dan otomatisasi telah banyak digunakan seperti, pertahanan dan keamanan dengan *cyber security*, inklusi keuangan dengan *fin-tech*, pendidikan dengan *e-learning*, pengembangan UMKM dengan adanya *e-commerce*, serta pertanian melalui mekanisasi alat mesin pertanian (*Alsintan*).

Namun di sisi lain, digitalisasi bisa berpotensi mendisrupsi berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya menghilangkan jenis pekerjaan sehingga meningkatkan angka pengangguran. Berbagai studi mengungkapkan hal tersebut bahwa sektor-sektor usaha yang berisiko hilang karena terdampak adanya digitalisasi dan otomatisasi seperti, sektor perhotelan dan restoran, perdagangan eceran, serta konstruksi dan manufaktur. Tidak hanya itu, digitalisasi juga berpeluang semakin memperlebar ketimpangan antara orang kaya dan miskin. Ada kecenderungan orang dengan kemampuan menengah ke atas, misalnya, memiliki kemampuan lebih untuk membeli perangkat telekomunikasi dan pulsa dibanding orang miskin yang memiliki kebutuhan pokok yang harus diprioritaskan. Hanya 57,76 persen penduduk berpenghasilan rendah di Kabupaten Pasangkayu yang mampu mengakses internet.

Selain itu, belum meratanya akses terhadap infrastruktur dan jaringan digital juga menjadi penyebab ketimpangan. Hingga tahun 2022, 71,86 persen penduduk perkotaan di Provinsi Sulawesi Barat telah mengakses internet. Angka ini jauh lebih besar dibanding pengguna internet di perdesaan yang hanya sekitar 58,33 persen. Studi Smeru (2021) menyebutkan bahwa hingga 2018, sekitar 64 persen desa di wilayah kabupaten di Indonesia belum memiliki menara pemancar dan penerima sinyal atau yang lebih dikenal dengan sebutan BTS (Base Transceiver Station). Temuan mereka juga mengungkapkan status literasi digital pengguna internet Indonesia masih berada pada tingkat sedang, yakni dengan skor 3,47 dari 5, tertinggal dari Vietnam dan Malaysia. Oleh karena itu, dalam menghadapi digitalisasi, beberapa isu yang perlu diperhatikan oleh Kabupaten Pasangkayu yakni peningkatan kualitas manusia terutama di wilayah perdesaan, ketersediaan infrastruktur atau akses jaringan internet, dan regulasi atau kebijakan terkait digital ekonomi.

### **C. Pembangunan Berkelanjutan**

Komitmen pemerintah Indonesia dalam berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) tidak hanya ikut serta dalam penandatanganan *UN Sustainable Development Summit*, namun juga menindaklanjuti kesepakatan global tersebut menjadi agenda pembangunan nasional. TPB/SDGs ini merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar. Dalam menjamin pelaksanaan TPB/SDGs dalam agenda perencanaan pembangunan, Pemerintah mengeluarkan Perpres No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini secara jelas juga digambarkan dalam lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) merupakan penanggung jawab pencapaian TPB. Pemerintah daerah harus menjadikan TPB/SDGs sebagai bagian dari program pembangunan, sehingga perlu diselaraskan kedalam dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dan tahunan. Dasar hukum dari penyelarasan tersebut adalah Permendagri No. 86 Tahun 2017. Beberapa indikator TPB/SDGs yang difokuskan untuk dilanjutkan pelaksanaannya dari MDGs antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan serta disparitas capaian target antar provinsi yang masih lebar.

Keharusan mengintegrasikan TPB/SDGs kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah kemudian memberikan konsekuensi besar bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah dianggap sebagai aktor penting yang harus aktif menyusun agenda aksi pencapaian TPB/SGDs. Kegagalan mencapai

beberapa target MGDs salah satunya dipengaruhi oleh rendahnya pelibatan pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian tersebut. Meskipun demikian, keharusan untuk mencapai TPB/SDGs juga membuat kewenangan pemerintah daerah menjadi bertambah. Sementara disaat bersamaan beberapa daerah menghadapi hambatan fiskal termasuk Kabupaten Pasangkayu. Hal tersebut kemudian menjadi isu penting yang memerlukan strategi khusus dalam upaya pencapaian TPB/SDGs.

### **3.2.2. Isu Strategis Nasional**

#### **A. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)**

Pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada tanggal 29 April 2019. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menjadi dasar hukum. Pembangunan IKN dilakukan dalam lima tahapan yaitu Tahapan Pertama (2022-2024), Tahapan Kedua (2024-2029), Tahapan Ketiga (2030-2034), Tahapan Keempat (2035-2039), dan Tahapan Kelima (2040-2045). Pembangunan IKN di desain untuk menjadi sumber pertumbuhan baru Indonesia dan menjadi *economic super hub* yang menggerakkan rantai nilai perekonomian Indonesia. Itu artinya keberadaan IKN tak memberikan *multiplier effect* terhadap Provinsi Kalimantan Timur atau Pulau Kalimantan, tapi juga akan berdampak terhadap wilayah disekitar Pulau Kalimantan, salah satunya Kabupaten Pasangkayu.

Efek penggada dari IKN terhadap daerah di sekitarnya bisa terjadi dalam bentuk kerjasama antar daerah. Perpres No.63 Tahun 2022 telah mengatur pengembangan kerja sama dan kolaborasi antara IKN dan Daerah Mitra. Daerah mitra adalah wilayah tertentu di Pulau Kalimantan yang ditetapkan oleh Badan Otorita IKN untuk pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi IKN. Daerah Mitra IKN memungkinkan berkolaborasi dan bersinergi dengan daerah lain yang telah berkembang sebelumnya di wilayah Pulau Kalimantan dan wilayah lainnya di Indonesia, termasuk Kabupaten Pasangkayu.

Badan otorita IKN telah menetapkan 8 (delapan) sektor pembangunan dalam kerja sama antar daerah yang berpotensi dikerjasamakan oleh mitra IKN antara lain (i) Sektor Ekonomi dan Industri, (ii) Logistik dan Konektivitas, (iii) SDM dan Ketenagakerjaan, (iv) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, (v) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (vi) Energi dan Kelistrikan, (vii) Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan (viii) Pengelolaan Sumber Daya Air. Jika memenuhi salah satu dari delapan sektor kerjasama, maka potensi Kabupaten Pasangkayu untuk menjadi daerah mitra IKN terbuka luas.

Dari sisi letak geografis, Kabupaten Pasangkayu memiliki kedekatan wilayah dengan IKN. Jarak Kabupaten Pasangkayu dari IKN hanya 215 Km ditempuh melalui jalur laut. Agar dapat terkoneksi dengan IKN, Kabupaten Pasangkayu mesti memperkuat infrastruktur transportasi, terutama via laut. Setelah terkoneksi, perlu memperkuat sektor mana dari sembilan sektor yang dikerjasamakan oleh IKN. Selain itu, Kabupaten Pasangkayu perlu memaksimalkan komoditas atau produk yang bisa menyangga pembangunan IKN atau kehidupan sosial ekonomi IKN. Inilah yang akan memicu efek pembangunan IKN terhadap pembangunan Kabupaten Pasangkayu ke depan.

## **B. Ancaman Krisis Energi**

Saat ini, ketergantungan terhadap fosil sebagai sumber energi masih sangat besar. Misalnya, hampir 87 persen produksi listrik di Indonesia pada tahun 2020 masih bersumber dari bahan bakar fosil, seperti batu bara, gas bumi, dan minyak bumi. Padahal, energi yang bersumber dari fosil memiliki kekurangan, terutama dampak lingkungan yang ditimbulkan dan keterbatasan cadangan yang terus menurun. Cadangan sumber daya alam energi fosil di Indonesia terus berkurang setiap tahun. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, tanpa penemuan cadangan yang baru, terhitung dari tahun 2020, minyak bumi di Indonesia diperkirakan akan habis dalam sembilan tahun ke depan (2029), gas bumi akan habis 22 tahun ke depan (2042), dan batu bara akan habis dalam 65 tahun mendatang (2082). Meskipun Indonesia tergolong memiliki cadangan fosil yang masih sangat besar, tetapi tetap perlu diantisipasi keterbatasan energi tersebut dalam jangka panjang. Salah satu bukti bahwa cadangan sumber daya alam terus berkurang adalah posisi Indonesia yang tidak lagi menjadi negara net eksportir minyak sejak tahun 1997 hingga sekarang.

Memang saat ini muncul upaya untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan yang berasal dari sejumlah sumber, seperti angin, air, surya, dan lainnya. Namun proporsi penggunaan energi baru dan terbarukan masih rendah. Menurut data dari BPS dan Kementerian ESDM, proporsi energi

terbarukan di Indonesia pada tahun 2020 masih sebesar 11,27 persen dari total konsumsi energi final, sedikit meningkat dari tahun 2019, yaitu sebesar 9,19 persen. Salah satu persoalannya adalah aspek ekonomis dari pengembangan energi baru dan terbarukan, sehingga masih sedikit investor yang berminat untuk mengembangkannya.

Lebih lanjut, salah satu implikasi riil dari ancaman krisis energi ini adalah kelangkaan pasokan energi ke masyarakat, di antaranya seperti BBM, gas, dan listrik. Kelangkaan pasokan energi ini akan semakin meningkat di masa mendatang seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat dan dunia industri. Meskipun isu ancaman kelangkaan energi ini merupakan isu nasional, bahkan juga internasional, tetapi implikasinya akan dirasakan hingga level lokal, tak terkecuali di Kabupaten Pasangkayu. Keterbatasan pasokan energi, seperti BBM dengan harga yang terjangkau, tidak hanya akan menghambat kegiatan ekonomi, tapi juga berpotensi menimbulkan isu sosial dan keamanan. Hal ini tentunya perlu diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam menyusun perencanaan jangka panjang.

### **C. Ancaman Krisis Pangan**

Salah satu implikasi dari perubahan iklim adalah terganggunya produksi pada sektor-sektor yang berkaitan dengan pangan. Di sisi lain, dengan pertambahan penduduk, kebutuhan terhadap pangan akan semakin meningkat. Di Indonesia, hasil studi Bappenas (2019) menyatakan bahwa terjadi defisit pada neraca pangan nasional. Artinya, jumlah yang diproduksi lebih rendah dibanding yang dikonsumsi. Masih menurut studi Bappenas, diperkirakan defisit pada neraca pangan tersebut akan semakin membesar di masa mendatang.

Di tingkat nasional, saat ini sejumlah bahan pangan strategis memang masih diimpor dari negara lain, seperti besar, gula, dan daging. Hal ini berpotensi menimbulkan ketergantungan negara Indonesia terhadap pasokan pangan dari luar. Parahnya, apabila terjadi gangguan dalam pasokan, maka harga pangan akan melambung tinggi dan bahkan tidak mungkin pasokan pangan dari luar akan berkurang atau berhenti.

Meskipun dampak dari ancaman krisis pangan ini bisa berbeda antar provinsi dan/atau kabupaten/kota, tetapi dampak yang lebih besar akan

dirasakan oleh wilayah yang tidak menjadi basis produksi pangan. Kabupaten Pasangkayu termasuk wilayah yang bukan penghasil utama produk pangan. Di Provinsi Sulawesi Barat, kontribusi produksi padi Kabupaten Pasangkayu hanya sebesar 0,8 persen dari total produksi di Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pasangkayu memiliki ketergantungan padi/beras dari wilayah di sekitarnya. Salah satu implikasi dari ketergantungan pangan adalah ancaman terhambatnya pasokan pangan dari wilayah lain, serta harga yang cenderung lebih tinggi apabila terjadi gangguan pada proses distribusi. Untuk itu, upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan di Kabupaten Pasangkayu perlu menjadi perhatian khusus dalam dokumen perencanaan jangka panjang.

#### **D. Pergeseran Struktur Demografi**

Dalam teori transisi demografi, kondisi kependudukan di masa mendatang akan ditandai dengan persentase penduduk usia tua (non-produktif) yang semakin tinggi dan jumlah kelahiran yang semakin rendah. Penyebabnya adalah umur harapan hidup yang semakin tinggi, sehingga penduduk akan hidup lebih lama. Peningkatan kesejahteraan penduduk dan didukung oleh layanan kesehatan yang memadai merupakan faktor utama yang membuat penduduk lebih sehat dan bisa hidup lebih lama. Di sisi lain, angka kehaliran yang semakin rendah terjadi karena berbagai faktor, diantaranya adalah semakin tingginya biaya yang ditanggung orang tua ketika memiliki anak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan biaya hidup lainnya, serta tuntutan pekerjaan, terutama dialami oleh perempuan, sehingga biaya kesempatan untuk memiliki anak semakin tinggi.

Namun, peningkatan persentase penduduk yang semakin menua (*aging population*) berimplikasi setidaknya pada dua hal, yaitu semakin rendahnya proporsi penduduk berusia produktif yang bisa berkontribusi pada perekonomian dan semakin meningkatnya beban pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan khusus kepada penduduk usia tua. Umumnya usia produktif memiliki rentang usia antara 15–64 tahun, sedangkan usia non-produktif terdiri usia kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas. Untuk itu, peningkatan jumlah penduduk usia tua (65 tahun ke atas), yang tidak sebanding dengan peningkatan usia produktif karena kelahiran yang



semakin turun, akan mendorong penurunan persentase penduduk yang berusia produktif. Implikasinya ketersediaan penduduk yang siap bekerja akan semakin berkurang, dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Lebih lanjut, pemerintah juga memiliki tanggung jawab lebih untuk menyiapkan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan oleh penduduk usia lanjut. Umumnya penduduk yang berusia lanjut lebih rentan terkena penyakit, sehingga akan membutuhkan perawatan kesehatan yang intensif. Beban pelayanan kesehatan ini tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja kesehatan pemerintah, tidak hanya di tingkat pusat, tapi juga dialami di daerah.

Di Kabupaten Pasangkayu, persentase penduduk usia produktif memang masih sangat dominan dibanding usia non-produktif, yaitu sebesar 69 persen di tahun 2022, sehingga tergolong masih dalam fase bonus demografi. Tetapi, jika melihat perkembangan dalam 18 tahun terakhir, persentase penduduk usia 65 tahun ke atas meningkat dari 2 persen di tahun 2005 menjadi 3 persen di tahun 2022, sedangkan penduduk usia < 15 tahun turun dari 34 persen menjadi 24 persen. Namun, seiring berjalannya waktu, persentase penduduk usia 65 tahun ke atas akan meningkat secara perlahan. Untuk itu, kondisi ini perlu diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang.

### **3.2.3. Isu Strategis Regional**

#### **A. Pulau Sulawesi Sebagai Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis Sumberdaya**

Pemerintah telah selesai merampungkan draf akhir RPJPN 2025-2045 dan akan dibahas Bersama eksekutif sebelum akhir disahkan menjadi UU. Meski belum disahkan menjadi UU, tapi dokumen draf akhir RPJPN sudah cukup memberikan gambaran tentang peta jalan pembangunan Indonesia 20 tahun ke depan. Dalam peta jalan tersebut, RPJPN memuat tentang arah pembangunan wilayah, dimana Pulau Sulawesi ingin dijadikan sebagai wilayah penunjang superhub ekonomi nusantara dan industri berbasis sumberdaya.

Menjadikan Pulau Sulawesi sebagai wilayah penunjang superhub ekonomi dan industri berbasis sumberdaya tidak lepas dari potensi yang dimiliki. Secara geografis, Pulau Sulawesi berada di ALKI II dan ALKI II yang



berpotensi mendukung Wilayah Sulawesi sebagai hub dan pintu gerbang internasional di wilayah KTI. Pembangunan IKN di Pulau Kalimantan juga berpotensi mendorong pembangunan ekonomi di Pulau Sulawesi sebagai daerah penyangga IKN. Kontribusi Pulau Sulawesi sebagai daerah penyangga IKN dalam dimaksimalkan melalui peningkatan nilai tambah beberapa komoditas unggulan. Komoditas unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Pasangkayu yang potensial mendorong pembangunan di Pulau Sulawesi adalah beberapa diantaranya adalah kelapa dan kakao.

Arah pembangunan Pulau Sulawesi yang diinginkan dalam dokumen RPJPN 2025-2045 merupakan peluang bagi Kabupaten Pasangkayu untuk mengembangkan dua komoditas perkebunan potensial yaitu kelapa dan kakao. Karena dianggap sebagai komoditas yang bisa mendorong pembangunan di Pulau Sulawesi, maka kemungkinan pemerintah pusat dan provinsi akan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan komoditas unggulan. Ini bisa menjadi momentum bagi Kabupaten Pasangkayu untuk melakukan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi yang selama ini bertumpu pada satu komoditas yaitu kelapa sawit.

## **B. Kerjasama Regional Pulau Sulawesi**

Pulau Sulawesi terdiri dari enam provinsi yang memiliki potensi dan keunikan masing-masing. Potensi ekonomi yang dimiliki setiap provinsi ini dapat dikembangkan dan dikerjasamakan untuk mendorong kemajuan ekonomi wilayah. Kerjasama regional antar provinsi ini dapat berkembang apabila sumber daya di masing-masing provinsi dapat dikembangkan dan diintegrasikan antar provinsi. Salah satu upaya untuk mendorong kerjasama antar provinsi melalui pembangunan jaringan transportasi yang menghubungkan antar satu provinsi dengan provinsi yang lain, serta dukungan kelembagaan yang dapat mendorong terjalannya kerjasama tersebut.

Saat ini, pemerintah pusat memiliki rencana untuk membangun jaringan transportasi kereta api Trans Sulawesi yang akan menghubungkan provinsi di Pulau Sulawesi mulai dari Sulawesi Selatan (Makassar) sampai ke Sulawesi Utara (Manado). Pembangunan sarana dan prasarana kereta api akan memperlancar perpindahan manusia dan barang dari suatu provinsi ke provinsi lain dengan harga yang relatif lebih murah dan waktu tempuh yang lebih cepat

dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Selain itu, keberadaan sarana dan prasarana ini turut mendukung pengembangan kegiatan pariwisata dan industri yang dimiliki oleh setiap provinsi. Saat ini, jaringan transportasi rel kereta api tahap pertama sedang dibangun dengan rute Makassar – Parepare. Ke depan, pembangunan rel kereta api akan menjangkau seluruh provinsi di Pulau Sulawesi.

Pengembangan kerjasama regional antar provinsi di Pulau Sulawesi juga telah didukung dengan kelembagaan dengan terbentuknya Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) sejak tahun 2000. Badan ini memiliki tugas untuk mengkoordinasikan kerjasama antar provinsi di Pulau Sulawesi guna memajukan provinsi-provinsi yang menjadi anggotanya. Badan ini juga telah memiliki Sekretariat yang berkantor pusat di Kota Makassar. Keberadaan BKPRS ini sangat strategis mengingat anggota-anggotanya adalah para Gubernur di Pulau Sulawesi. Selain sebagai wadah untuk menjalin kerjasama antar provinsi, keberadaan BKPRS ini juga bisa menguatkan *positioning* pemerintah provinsi di Pulau Sulawesi dalam menyampaikan aspirasi dan dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah pusat.

Kerjasama antar pemerintah provinsi di Pulau Sulawesi semakin diperlukan, terutama sejak pemerintah pusat menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai pulau terdekat dari IKN, Sulawesi berpeluang untuk menjadi penopang utama IKN, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Namun pemerintah provinsi di Sulawesi mesti berkolaborasi dan saling mendukung untuk mengoptimalkan potensi yang ada di masing-masing wilayah. Tentunya, manfaat dari kerjasama ini dapat dirasakan juga oleh Kabupaten Pasangkayu, sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi Barat, dengan mengoptimalkan potensi ekonomi di wilayahnya.

### **C. Sulawesi Barat sebagai Sentra Pengolahan Komoditas Perkebunan**

Provinsi Sulawesi Barat telah lama dikenal sebagai salah satu sentra pengolahan komoditas perkebunan di Indonesia. Dengan kekayaan alam yang melimpah dan iklim tropis yang ideal, daerah ini menjadi pusat produksi berbagai komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, kakao, kelapa, dan kopi. Perkebunan di Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat, tetapi juga berkontribusi signifikan

terhadap perekonomian daerah dan nasional. Peran strategis Provinsi Sulawesi Barat dalam sektor perkebunan menjadikannya wilayah yang sangat penting dalam rantai pasok komoditas perkebunan Indonesia. Selain itu, melimpahnya komoditas perkebunan di Provinsi Sulawesi Barat berpotensi menjadikan wilayah ini sebagai pusat industri pengolahan produk perkebunan yang berdaya saing.

Salah satu komoditas perkebunan utama di Provinsi Sulawesi Barat adalah kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit di daerah ini telah berkembang pesat, didukung oleh investasi dari pemerintah dan swasta, serta kondisi alam yang sesuai. Sebagian besar hasil dari produk perkebunan juga diolah menjadi produk turunan kelapa sawit seperti minyak sawit mentah (CPO) yang telah diekspor ke berbagai negara dan memberikan devisa yang besar bagi Indonesia. Selain itu, pengolahan produk turunan kelapa sawit ini juga menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat lokal, meningkatkan taraf hidup mereka dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Kabupaten Pasangkayu sebagai daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Provinsi Sulawesi Barat memegang peran penting bagi pengolahan dan peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan di wilayah ini. Di samping itu, kolaborasi Kabupaten Pasangkayu dengan daerah lain yang juga menjadi penghasil kelapa sawit, terutama di lingkup Provinsi Sulawesi Barat, diperlukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku dalam rangka pengolahan produk turunan yang berkelanjutan.

## BAB IV

# VISI DAN MISI DAERAH

### 4.1. Visi Daerah

Di dalam peraturan perundangan, Visi didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi jangka panjang harus memiliki beberapa kriteria, antara lain: (1) menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang (*clarity of direction*); (2) menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang; (3) menjelaskan/mengakomodasikan kekuatan dan peluang serta keunikan “kompetitif” yang dimiliki daerah dalam jangka panjang; dan (4) menggambarkan nilai-nilai kunci (*core values*) yang perlu dilaksanakan.

Visi jangka panjang Kabupaten Pasangkayu dirumuskan dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan daerah, memperhatikan kinerja pembangunan daerah yang telah dicapai, mencermati potensi sumberdaya yang dimiliki, permasalahan utama yang harus diselesaikan, tantangan yang bakal dihadapi, isu-isu strategis yang berpengaruh, dan mempedomani Visi pembangunan jangka panjang Nasional dan Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Barat.

Dengan demikian, maka Visi jangka panjang Kabupaten Pasangkayu Tahun 2045 adalah:

**“Kabupaten Pasangkayu yang Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan”**

Rumusan Visi ini berangkat dari sebuah kesadaran bahwa muara dari seluruh penyelenggaraan pembangunan daerah adalah terciptanya kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapabilitas individu (penduduk) agar mampu mengelola seluruh sumberdaya daerah secara optimal. Namun kesejahteraan atau kemakmuran yang ingin dicapai harus dinikmati secara merata diantara seluruh kelompok masyarakat agar dapat terwujud kehidupan sosial yang lebih egaliter dan harmonis. Sumberdaya ekonomi yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran harus dipastikan terkelola secara berkelanjutan agar tetap dapat memberi manfaat lintas generasi dan tidak membebani generasi mendatang.

Rumusan Visi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2045 terdiri atas tiga pokok Visi atau kata kunci Visi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Sejahtera**, dapat dimaknakan bahwa pembangunan Kabupaten Pasangkayu sepenuhnya diarahkan dan difokuskan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu tujuan bernegara, sebagaimana disebutkan di dalam Konstitusi Republik Indonesia. Perwujudan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup, menurunnya angka kemiskinan, terciptanya kesempatan kerja, meningkatnya daya beli, membaiknya kualitas pembangunan manusia, dan sebagainya.

**Maju**, dapat dimaknakan bahwa pembangunan Kabupaten Pasangkayu akan menghasilkan kemajuan daerah di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Kemajuan dimaksud juga harus bersifat inklusif, dimana setiap kelompok penduduk tanpa kecuali dipastikan memperoleh manfaat dari hasil-hasil pembangunan. Setiap wilayah harus mendapatkan perlakuan yang proporsional terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, baik antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan, maupun antar wilayah kecamatan.

**Berkelanjutan**, dapat dimaknakan bahwa pembangunan Kabupaten Pasangkayu senantiasa berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yaitu sebuah prinsip yang terus berusaha menjaga keseimbangan benefit antar generasi, wilayah, dan antar makhluk hidup tanpa merusak sumberdaya dan lingkungan. Ciri utama pembangunan berkelanjutan

adalah tetap menjaga kelestarian lingkungan sambil tetap mendorong kemajuan ekonomi dan menjaga tatanan kehidupan sosial. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan penting bagi Kabupaten Pasangkayu mengingat pengembangan kegiatan ekonominya masih bertumpu pada pengelolaan sumberdaya alam yang berpotensi merusak lingkungan. Pembangunan Kabupaten Pasangkayu yang berkelanjutan ditandai dengan membaiknya kualitas lingkungan hidup, menurunnya efek gas rumah kaca, dan sebagainya.

Tabel 4.1.

Penyelarasan Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Barat, dan RPJPD Kabupaten Pasangkayu

Visi RPJP Nasional	Visi RPJPD Prov. Sulawesi Barat	Visi RPJPD Kab. Pasangkayu
Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Sulawesi Barat Malaqbi, Maju, dan Berkelanjutan	Pasangkayu Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan

Tabel 4.2.

Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Barat dan RPJPD Kabupaten Pasangkayu

RPJPD Provinsi Sulawesi Barat				RPJPD Kabupaten Pasangkayu			
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2023	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2023	Target 2045
Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	39,24	162,33	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	72,24	185,53
	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	31,23 (2025)	283,19		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)		
	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	11,23	15,86		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	27,28	35,10
Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	11,49	0,28	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	4,79	2,50
	Rasio Gini (Indeks)	0,351	0,308		Rasio Gini (Indeks)	0,319	0,252
	Kontribusi PDRB Prov. Sulawesi Barat Terhadap Nasional (%)	0,27 (2025)	0,19		Kontribusi PDRB Kab. Pasangkayu Terhadap Prov. Sulawesi Barat (%)	24,57	25,15
Daya saing daerah meningkat	Indeks Daya Saing Daerah	3,2	4,0	Daya saing daerah meningkat	Indeks Daya Saing Daerah		
Daya saing sumberdaya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0,55 (2025)	0,70	Daya Saing Sumberdaya Manusia Meningkat	Indeks Modal Manusia		
Intensitas emisi grk menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	61,65 (2025)	97,89	Intensitas Emis GRK Menurun Menuju Net Zero Emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)		

## 4.2. Misi Daerah

Di dalam peraturan perundangan, Misi diartikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan sasaran pokok yang ingin dicapai dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

Untuk mencapai Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasangkayu 2045, maka ditetapkan Delapan Misi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang kuat;

2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat;
3. Menciptakan pemerataan pembangunan daerah;
4. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas;
5. Menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
7. Menciptakan rasa aman dan tenteram;
8. Membangun sarana dan prasarana yang berkualitas.

Tabel 4.3.

Keterkaitan Pokok Visi, Misi dan Penjelasan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

<b>Pokok Visi</b>	<b>Misi</b>	<b>Penjelasan Misi</b>
Sejahtera	Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang kuat	Misi ini diarahkan untuk mendorong perekonomian daerah agar dapat bertumbuh secara berkelanjutan melalui penguatan struktur ekonomi dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
	Meningkatkan taraf hidup masyarakat	Misi ini diarahkan untuk meningkatkan derajat dan kualitas hidup masyarakat dengan berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar.
	Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas	Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan dan perluasan akses penduduk terhadap layanan pendidikan dan layanan kesehatan.
Maju	Menciptakan pemerataan pembangunan daerah	Misi ini diarahkan untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok penduduk dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan harus dilaksanakan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan pemerataan kesempatan, akses terhadap sumberdaya ekonomi, dan hasil-hasil pembangunan.
	Membangun sarana dan prasarana yang berkualitas	Misi ini diarahkan untuk membangun dan mengembangkan berbagai sarana dan prasarana ekonomi dan sosial di berbagai wilayah dengan menekankan pada pembangunan infrastruktur dasar.
	Menciptakan rasa aman dan tenteram	Misi ini diarahkan untuk menciptakan dan menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban sebagai prasyarat untuk membangun daerah, termasuk memberikan perlindungan masyarakat.
Berkelanjutan	Menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan	Misi ini diarahkan untuk menjaga dan merawat lingkungan hidup dengan terus meningkatkan kualitas tanah/lahan, air, dan udara.



	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Misi ini diarahkan untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong inovasi dan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
--	---	--

Tabel 4.4.  
Penyelarasan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Barat, dan RPJPD Kabupaten Pasangkayu

Misi RPJP Nasional	Misi RPJPD Prov. Sulawesi Barat	Misi RPJPD Kab. Pasangkayu
Transformasi ekonomi	Mewujudkan perekonomian daerah yang kuat dan berdaya saing	Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang kuat
Transformasi sosial	Mewujudkan keadilan sosial	Meningkatkan taraf hidup masyarakat
Transformasi tata kelola	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi	Menegakkan supremasi hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban	Menciptakan rasa aman dan tenteram
Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas	Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas
Pembangunan kewilayahan dan merata dan berkeadilan	Mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah	Menciptakan pemerataan pembangunan daerah
Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas	Membangun sarana dan prasarana yang berkualitas
Kesinambungan pembangunan	Menjaga kelestarian lingkungan hidup	Menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan

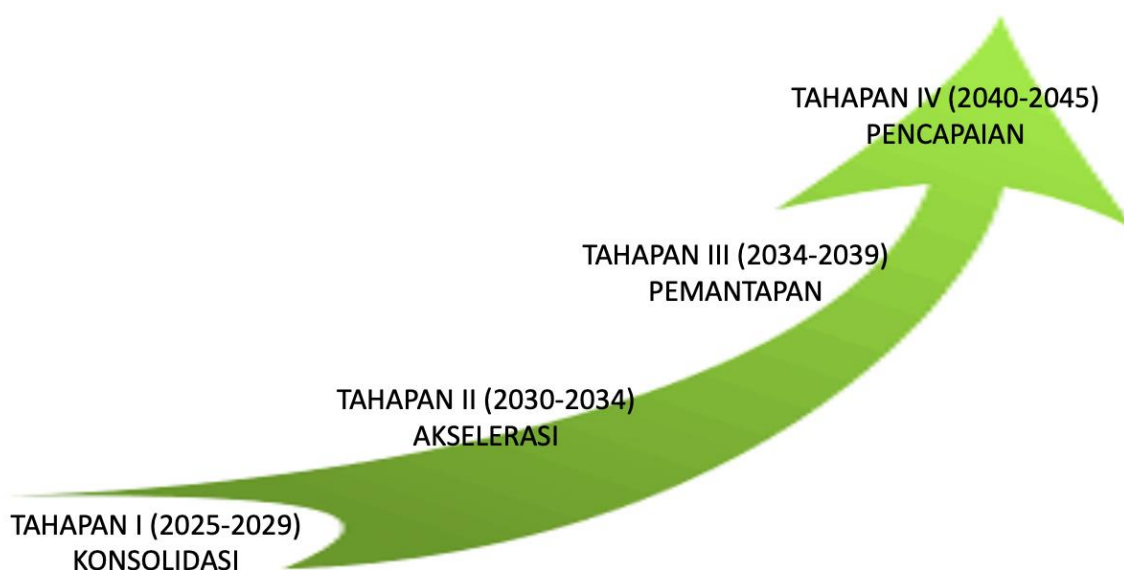
## BAB V

# ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

### 5.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD. Perumusan arah kebijakan didasarkan pada sasaran pokok dan target kinerja yang ingin dicapai serta permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi dan isu strategik yang berpengaruh.

Gambar 5.1.  
Pentahapan Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu



Tabel 5.1.  
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasangkayu

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Kabupaten Pasangkayu yang Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan	Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang kuat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan kawasan industri yang berbasis pada pengolahan hasil-hasil pertanian dan pertambangan.</li> <li>▪ Identifikasi potensi investasi pada sektor-sektor potensial non-pertanian.</li> <li>▪ Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.</li> <li>▪ Pengembangan rantai nilai komoditas unggulan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan kawasan industri yang berbasis pada pengolahan hasil-hasil pertanian dan pertambangan.</li> <li>▪ Peningkatan investasi pada sektor-sektor potensial non-pertanian.</li> <li>▪ Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang berkelanjutan.</li> <li>▪ Pengembangan rantai nilai komoditas unggulan.</li> <li>▪ Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perluasan kawasan industri yang berbasis pada pengolahan hasil-hasil pertanian dan pertambangan.</li> <li>▪ Pengembangan investasi pada berbagai sektor ekonomi potensial.</li> <li>▪ Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang berkelanjutan.</li> <li>▪ Pengembangan rantai nilai dan daya saing komoditas unggulan.</li> <li>▪ Peningkatan peran ekonomi biru dalam perekonomian daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemantapan kawasan industri yang berbasis pada pengolahan hasil-hasil pertanian dan pertambangan.</li> <li>▪ Perluasan investasi pada berbagai sektor ekonomi potensial.</li> <li>▪ Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang berkelanjutan.</li> <li>▪ Pengembangan rantai nilai dan daya saing komoditas unggulan.</li> <li>▪ Peningkatan kontribusi ekonomi biru dalam perekonomian daerah.</li> </ul>
	Meningkatkan taraf hidup masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.</li> <li>▪ Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).</li> <li>▪ Peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Percepatan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.</li> <li>▪ Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).</li> <li>▪ Peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.</li> <li>▪ Peningkatan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).</li> <li>▪ Peningkatan produktivitas tenaga kerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perluasan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.</li> <li>▪ Peningkatan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).</li> <li>▪ Peningkatan produktivitas tenaga kerja.</li> </ul>
	Menciptakan pemerataan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerataan sarana dan prasarana ekonomi di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerataan sarana dan prasarana ekonomi di</li> </ul>

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		di berbagai wilayah kecamatan. ▪ Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat klas bawah (desil 1 dan 2).	di berbagai wilayah kecamatan. ▪ Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat klas bawah (desil 1 dan 2).	berbagai wilayah kecamatan. ▪ Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat klas bawah (desil 1 dan 2). ▪ Pengembangan sentra-sentra ekonomi di berbagai wilayah.	berbagai wilayah kecamatan. ▪ Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat klas bawah (desil 1 dan 2). ▪ Pengembangan dan pemerataan sentra-sentra ekonomi di berbagai wilayah.
	Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas	▪ Peningkatan akses penduduk terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. ▪ Perluasan fasilitas pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah. ▪ Peningkatan partisipasi sekolah anak usia sekolah ▪ Penurunan angka putus sekolah. ▪ Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan berkualitas. ▪ Perbaikan kualitas layanan kesehatan. ▪ Peningkatan pemenuhan gizi masyarakat. ▪ Percepatan penanganan stunting.	▪ Peningkatan akses penduduk terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. ▪ Perluasan fasilitas pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah. ▪ Peningkatan partisipasi sekolah anak usia sekolah ▪ Penurunan angka putus sekolah ▪ Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan berkualitas. ▪ Perbaikan kualitas layanan kesehatan ▪ Peningkatan pemenuhan gizi masyarakat	▪ Perluasan dan pemerataan akses penduduk terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. ▪ Perluasan fasilitas pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah. ▪ Peningkatan partisipasi sekolah anak usia sekolah ▪ Penurunan angka putus sekolah ▪ Pemerataan tenaga kesehatan berkualitas. ▪ Perbaikan kualitas layanan kesehatan. ▪ Peningkatan pemenuhan gizi masyarakat	▪ Perluasan dan pemerataan akses penduduk terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. ▪ Perluasan fasilitas pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah. ▪ Peningkatan partisipasi sekolah anak usia sekolah. ▪ Penurunan angka putus sekolah. ▪ Pemerataan tenaga kesehatan berkualitas. ▪ Perbaikan kualitas layanan kesehatan. ▪ Peningkatan pemenuhan gizi masyarakat
	Menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan	▪ Penertiban dan penanganan aktivitas	▪ Penertiban dan penanganan aktivitas	▪ Pencegahan aktivitas pembangunan yang merusak lingkungan.	▪ Pencegahan aktivitas pembangunan yang merusak lingkungan.

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		pembangunan yang merusak lingkungan. ▪ Pengendalian konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman.	pembangunan yang merusak lingkungan. ▪ Pengendalian konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. ▪ Pengenalan penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan.	▪ Pengendalian konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. ▪ Peningkatan penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan.	▪ Pengendalian konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. ▪ Peningkatan penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan.
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	▪ Peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. ▪ Peningkatan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan publik ▪ Pengembangan inovasi daerah dalam pelayanan publik oleh seluruh perangkat daerah, termasuk kecamatan dan desa/kelurahan. ▪ Peningkatan penggunaan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	▪ Peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. ▪ Peningkatan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan publik ▪ Pengembangan inovasi daerah dalam pelayanan publik oleh seluruh perangkat daerah, termasuk kecamatan dan desa/kelurahan. ▪ Peningkatan penggunaan teknologi digital dalam penyelenggaraan	▪ Peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. ▪ Peningkatan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan publik ▪ Pengembangan inovasi daerah dalam pelayanan publik oleh seluruh perangkat daerah, termasuk kecamatan dan desa/kelurahan. ▪ Peningkatan penggunaan teknologi digital dalam penyelenggaraan	▪ Peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. ▪ Peningkatan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan publik ▪ Pengembangan inovasi daerah dalam pelayanan publik oleh seluruh perangkat daerah, termasuk kecamatan dan desa/kelurahan. ▪ Peningkatan penggunaan teknologi digital dalam penyelenggaraan

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			pemerintahan dan pelayanan publik.	pemerintahan dan pelayanan publik.	pemerintahan dan pelayanan publik.
	Menciptakan rasa aman dan tenteram	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat.</li> <li>▪ Peningkatan toleransi dan kerukunan antar kelompok masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat.</li> <li>▪ Peningkatan toleransi dan kerukunan antar kelompok masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat.</li> <li>▪ Peningkatan toleransi dan kerukunan antar kelompok masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat.</li> <li>▪ Peningkatan toleransi dan kerukunan antar kelompok masyarakat.</li> </ul>
	Membangun sarana dan prasarana yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di berbagai wilayah.</li> <li>▪ Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di berbagai wilayah.</li> <li>▪ Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.</li> <li>▪ Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di lingkungan permukiman dan perumahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di berbagai wilayah.</li> <li>▪ Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.</li> <li>▪ Perluasan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di lingkungan permukiman dan perumahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di berbagai wilayah.</li> <li>▪ Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.</li> <li>▪ Perluasan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di lingkungan permukiman dan perumahan</li> </ul>

## 5.2. Sasaran Pokok

Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dirumuskanlah sejumlah sasaran pokok yang ingin dicapai dalam 20 tahun yang akan datang. Pada dasarnya, suatu sasaran pokok pembangunan jangka panjang adalah kuantifikasi Visi dan Misi pada akhir periode tahun ke-20 (2045). Sasaran pokok menjelaskan target kinerja dari capaian pembangunan jangka panjang daerah pada akhir tahun ke-20 (2045).

Sasaran Pokok bersifat makro daerah dengan perspektif jangka panjang yang dinyatakan secara kuantitatif. Ini penting karena Sasaran Pokok dimaksud akan digunakan dalam empat periode RPJMD sehingga dengan pilihan Sasaran Pokok yang minimal akan mempermudah bagi Kepala Daerah untuk berkreasi dalam menyusun Prioritas Pembangunan Kepala Daerah, namun tidak meninggalkan/tetap mengindahkan Sasaran Pokok di dalam RPJPD.

Tabel 5.2.

Keterkaitan Visi, Misi, Sasaran Pokok, Indikator dan Target Kinerja 2045 Kabupaten Pasangkayu

Visi	Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Target 2045
Kabupaten Pasangkayu yang Sejahtera, Merata, dan Berkelanjutan	Mewujudkan struktur perekonomian yang kuat	Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.	Pertumbuhan Ekonomi	7,02 %
			Rasio PDRB Industri Pengolahan	35,10%
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	7,40
	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Meningkatnya pendapatan Masyarakat	PDRB Per Kapita	Rp 185,53 Juta
		Menurunnya angka kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	2,50 %
	Menciptakan pemerataan pembangunan daerah	Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan	Indeks Gini	0,252
		Menurunnya ketimpangan pembangunan antar wilayah	Indeks Ketimpangan Wilayah	
	Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas	Membaiknya kualitas pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79.12
		Meningkatnya pembangunan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,72 Tahun

Visi	Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Target 2045
			Rata-rata Lama Sekolah	10,00 Tahun
		Meningkatnya pembangunan kesehatan.	Usia Harapan Hidup	72,09 Tahun
			Prevalensi Stunting	5 %
		Meningkatnya kualitas SDM tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja	Tingkat Pengangguran	1,53 %
	Menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan	Membaiknya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	90,12
			Persentase Penurunan Emisi GRK	33
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Membaiknya pelaksanaan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	81,21 (A)
			Indeks Pelayanan Publik	5
		Meningkatnya inovasi dan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	85 (Sangat Inovatif)
			Indeks SPBE	4,33 (Memuaskan)
	Menciptakan rasa aman dan tenteram	Menurunnya kasus kejahatan dan konflik sosial	Angka Kriminalitas	28
	Membangun sarana dan prasarana yang berkualitas	Tersedianya sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan Masyarakat	Indeks Infrastruktur Daerah	100

### 5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu telah diselaraskan dengan Arah Pembangunan Daerah RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045 dan juga disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan permasalahan pembangunan daerah. Jumlah Arah Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam dokumen RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045 sebanyak 17 (tujuh belas), yaitu:



Tabel 5.3.  
Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat dan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Pasangkayu

Arah Pembangunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat	Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Pasangkayu
1. Kesehatan untuk semua	1. Kesehatan untuk semua
2. Pendidikan berkualitas yang merata	2. Pendidikan berkualitas yang merata
3. Perlindungan sosial yang adaptif	3. Perlindungan sosial yang adaptif
4. Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi	4. Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi
5. Penerapan ekonomi hijau	5. Penerapan ekonomi hijau
6. Transformasi digital	6. Transformasi digital
7. Peningkatan produktivitas tenaga kerja	7. Peningkatan produktivitas tenaga kerja
8. Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	8. Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
9. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	9. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
10. Keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat	10. Keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
11. Stabilitas ekonomi makro	11. Stabilitas ekonomi makro
12. Daya saing daerah	12. Daya saing daerah
13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
15. Lingkungan hidup berkualitas	15. Lingkungan hidup berkualitas
16. Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan	16. Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan
17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

### 5.2.2. Indikator Utama Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Pasangkayu diturunkan dari Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu untuk 20 tahun ke depan. Jumlah Indikator Utama Pembangunan yang tertuang di dalam dokumen RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045 sebanyak 45 (empat puluh lima), yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi;
2. PDRB Per Kapita;
3. Tingkat Kemiskinan;
4. Indeks Gini;
5. Indeks Ketimpangan Wilayah;

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
7. Harapan Lama Sekolah (HLS);
8. Rata-rata Lama Sekolah (RLS);
9. Usia Harapan Hidup (UHH);
10. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi;
11. Prevalensi Stunting;
12. Angka Kematian Ibu (AKI);
13. Angka Kematian Bayi (AKB);
14. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
17. Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
18. Indeks Reformasi Birokrasi
19. Indeks Pelayanan Publik;
20. Indeks Inovasi Daerah;
21. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
22. Angka Kriminalitas;
23. Indeks Infrastruktur Daerah;
24. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
25. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja Di Sektor Formal;
26. Rasio PDRB Industri Pengolahan;
27. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum;
28. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif;
29. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah;
30. Rasio Kewirausahaan Daerah;
31. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan;
32. Tingkat Penguasaan Iptek;
33. Indeks Ekonomi Hijau Daerah;
34. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
35. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan;
36. Persentase Desa Mandiri;

- 37. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB;
- 38. Tingkat Inflasi;
- 39. Indeks Pembangunan Kebudayaan;
- 40. Indeks Kerukunan Umat Beragama;
- 41. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga;
- 42. Indeks Ketimpangan Gender;
- 43. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman;
- 44. Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah;
- 45. Indeks Risiko Bencana.

Tabel 5.4.

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Kinerja Menurut Periode Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline (2023)	Target Kinerja				Arah Kebijakan Transformasi
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,78	7,00	7,20	7,40	7,60	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang berkelanjutan, serta pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya.</li> <li>2. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.</li> <li>3. Industrialisasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.</li> <li>4. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.</li> <li>5. Peningkatan rantai nilai melalui penguatan kerjasama antardaerah dan pengembangan ekspor komoditas unggulan.</li> <li>6. Pemberiaan dukungan pengembangan pelabuhan untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi.</li> </ol>
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	27,28	29,80	31,60	33,40	35,10	
		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	5,35	5,90	6,40	6,90	7,40	
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,12	0,50	1,00	1,50	2,00	

									7. Pemanfaatan ALKI II secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.
	Daya saing daerah	Tingkat Penguasaan Iptek	%	3,57	3,75	4,25	4,5	4,95	1. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan. 2. Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) 3. Optimalisasi peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif.
		Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	%	0,213	0,373	0,573	0,773	1,093	
		Persentase Desa Mandiri	%	14,75	20,80	32,20	40,14	50,12	
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Stabilitas ekonomi makro	PDRB Per Kapita	Rp Juta	72,24	97,78	121,17	153,35	185,53	1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, dan optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD). 2. Penguatan pengendalian inflasi daerah.
		Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	%	7	13	18	23	28	
		Tingkat Inflasi	%	2,49	2,4	2,35	2,3	2	
Menurunnya angka kemiskinan	Perlindungan sosial yang adaptif	Tingkat Kemiskinan	%	4,79	4,00	3,58	3,15	2,50	1. Pengentasan kemiskinan terutama melalui perlindungan sosial adaptif. 2. Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran. 3. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. 4. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	24,03	25,23	26,49	28,35	31,18	

									5. Pemberiaan kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.
Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	Indeks Gini	Indeks	0,319	0,302	0,285	0,267	0,252	1. Pemberdayaan dan pelibatan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia. 2. Pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif. 3. Penciptaan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, serta pemenuhan hak bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas.
Menurunnya ketimpangan pembangunan antar wilayah	Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Indeks Ketimpangan Wilayah	Indeks						1. Peningkatan kontribusi pusat-pusat pertumbuhan baru untuk pengembangan produk unggulan dalam mendukung pengembangan wilayah. 2. Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di berbagai wilayah secara merata.
Membaiknya kualitas pembangunan manusia	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,42	73,11	75,02	77,00	79.12	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	60	60,02	60,05	60,15	60,25	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	16	18	20	22	24	
		Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	

		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja Di Sektor Formal	%	0,01	2,01	4,01	6,01	8,01	3. Pemberdayaan dan pelibatan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia di berbagai bidang pembangunan
Meningkatnya pembangunan pendidikan	Pendidikan berkualitas yang merata	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,07	12,57	13,02	13,43	13,72	1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). 2. Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar daerah (kecamatan). 3. Percepatan peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi. 4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi daerah.
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,12	8,60	9,05	9,55	10,00	
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	35,02	51,94	55,74	61,45	62,72	
Meningkatnya pembangunan kesehatan	Kesehatan untuk semua	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,09	70,68	71,17	71,64	72,09	1. Perluasan upaya promotif-preventif pembudayaan perilaku hidup sehat. 2. Percepatan penanganan stunting serta percepatan eliminasi penyakit menular. 3. Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak ( <i>mobile health services</i> ), khususnya daerah perdesaan yang sulit diakses. 4. Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan berkualitas dengan mengutamakan tenaga kesehatan masyarakat lokal. 5. Pengembangan sistem telemedicines yang didukung oleh peningkatan cakupan
		Prevalensi Stunting	%	25,8	20	15	10	5	
		Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	224	168	126	94,5	70,88	
		Angka Kematian Bayi	Per 10.000 Kelahiran Hidup	23,36	22,19	21,08	20,03	19,03	
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	89,51	98,01	98,9	99,9	100	

									jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan). 6. Peningkatan diversifikasi pangan untuk meningkatkan derajat kesehatan
Meningkatnya kualitas SDM tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,38	2,34	2,04	1,78	1,53	1. Pembangunan ekosistem riset dan inovasi, serta ekosistem pariwisata yang berbasis digital untuk meningkatkan perluasan lapangan kerja 2. Pelaksanaan afirmasi <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> bagi angkatan kerja, terutama di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan. 3. Peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	0,007	0,01	0,02	0,029	0,036	
		Rasio Kewirausahaan Daerah	%	20	50	70	90	90	
Membaiknya kualitas lingkungan hidup	Penerapan ekonomi hijau;	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Indeks	76,77	81,41	83,89	86,88	90,12	1. Perencanaan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, luasan hutan, serta wilayah jelajah satwa spesies dilindungi. 2. Pengembangan <i>natural based solution</i> untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai dan konservasi mangrove di pesisir. 3. Penerapan teknologi <i>climate smart agriculture</i>
		Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks						
	Lingkungan hidup berkualitas	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	30	31,5	32	32,5	33	1. Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan



									alam dan bakau serta menjaga luasan hutan 2. Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan dalam penyediaan listrik
	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	Indeks	186,83	179,33	172,83	166,83	161,33	1. Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan pasca bencana. 2. Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan dan penggunaan teknologi seperti <i>flood early warning system</i> . 3. Penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan bencana pada kelompok rentan.
Membaiknya pelaksanaan reformasi birokrasi	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	50,38 (CC)	68,21 (B)	73,14 (BB)	77,43 (BB)	81,21 (A)	1. Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah. 2. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan pemerintahan digital. 3. Pengawasan proses pengembangan karier promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,51	4	4,5	4,7	5	
Meningkatnya inovasi dan digitalisasi dalam penyelenggaraan	Transformasi digital	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	12,9 (Kurang Inovatif)	30 (Kurang Inovatif)	53 (Inovatif)	67 (Inovatif)	85 (Sangat Inovatif)	1. Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

pemerintahan dan pelayanan publik		Indeks SPBE	Indeks	1,89 (Cukup)	2,34 (Cukup)	2,91 (Baik)	3,58 (Sangat Baik)	4,33 (Memuaskan)	2. Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas
		Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	5,49	5,75	6,15	6,5	7,2	3. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital.
Menurunnya kasus kejahatan dan konflik sosial	Keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat	Angka Kriminalitas	Kasus	14	14	18	24	28	1. Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal. 2. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks						1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	1,75	2,50	3,00	3,50	3,80	2. Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, dan pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial seperti perkawinan anak.
Tersedianya sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan masyarakat	Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	77,26	84,76	92,26	99,76	100	1. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan.
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	59,52	64,52	69,52	74,52	79,52	2. Peningkatan ketahanan energi dengan pendekatan terpadu FEW ( <i>Food, Energy, and Water</i> ) Nexus.
		Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	54,4					3. Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga. 4. Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif. 5. Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan

									akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan. 6. Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kaidah Pelaksanaan**

RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Penanggung jawab pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2045 adalah Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu setiap periode masa jabatan. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPJPD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasangkayu berkewajiban untuk mengkoordinasikan penjabaran RPJPD ke dalam RPJMD setiap lima tahun.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasangkayu bertugas menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045 dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045 sesuai dengan periode DPRD setiap lima tahun.
3. Seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pasangkayu berkewajiban untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang di dalam RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045 sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Mengingat RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah 20 tahunan, maka dokumen

ini harus dijabarkan setiap lima tahun ke dalam RPJMD yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2045 dilakukan pada paruh waktu dan akhir periode RPJPD oleh Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Pasangkayu.
6. RPJPD Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2045 harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah secara sungguh-sungguh, konsisten, disiplin, dan bertanggungjawab sesuai dengan kewenangan masing-masing. RPJPD ini juga menjadi arahan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah untuk turut terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan daerah.

## **6.2. Pembiayaan Pembangunan**

Untuk mewujudkan Visi, Sasaran Visi dan Sasaran Pokok pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2045, dibutuhkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah dilakukan melalui perluasan sumber-sumber pembiayaan, baik dari sektor publik maupun dari sektor non-publik, pengembangan inovasi pembiayaan, peningkatan peran sektor keuangan, dan pengembangan skema dan mekanisme baru dalam pembiayaan pembangunan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

---